



**PROGRAM  
CONVEY  
INDONESIA**

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Enhancing the Role of Religious Education in  
Countering Violent Extremism in Indonesia

**RINGKASAN EKSEKUTIF  
PROGRAM CONVEY INDONESIA**

CONVEY INDONESIA © 2018

vi + 98 hlm (15 cm x 23 cm)

ISBN 978-623-94591-1-6

**PENULIS**

PPIM UIN Jakarta

**PENERBIT:**

PPIM UIN Jakarta

Gedung PPIM UIN Jakarta

Jalan Kertamukti No. 5, Pisangan Barat,

Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Banten, Indonesia 15419

**Telp.** (021) 7499272, 7423543

**Emai:** ppim@uinjkt.ac.id **Website:** ppim.uinjkt.ac.id

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang memperbanyak dalam bentuk apapun dan dengan cara  
apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## CONVEY Indonesia

Berbagai serangan terrorisme di beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kecenderungan paham ekstrimisme berbasis kekerasan (violent extremism) di Indonesia memang semakin menguat. Jumlah kekerasan di Indonesia yang berbasis pada identitas agama dan intoleransi juga semakin meningkat secara stabil selama sepuluh tahun terakhir ini.

Dari kekhawatiran tersebut, sebuah gerakan bernama Counter Violent Extremism for Youth (CONVEY) diinisiasi oleh Pusat Islam dan Masyarakat bekerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP). Gerakan ini dibentuk dengan tujuan untuk membangun perdamaian di Indonesia dengan mengedepankan potensi pendidikan agama dalam mempromosikan inklusivitas dan toleransi, sebagai cara untuk menangkal radikalisasi dan violent extremism.

Selain itu, CONVEY disusun untuk mengidentifikasi dan menjawab permasalahan di balik faktor-faktor yang menyebabkan tumbuhnya violent extremism di berbagai sekolah dan kampus, serta mengintegrasikan potensi konstruktif dari pendidikan agama dengan metode belajar dan mengajar yang menitikberatkan pada nilai-nilai keragaman Indonesia.

CONVEY punya beberapa tujuan utama, yakni memproduksi pengetahuan berbasis bukti (evidence-based knowledge) melalui penelitian dan survey tentang violent extremism yang sensitif akan nilai-nilai gender. Selain itu, gerakan ini bertujuan memperkuat advokasi dan keterlibatan pemangku kebijakan serta masyarakat dalam melawan violent extremism. Paling utama, CONVEY ingin meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya dan bagaimana menangkal violent extremism yang tengah menggejala di masyarakat. Tentu, dalam implementasi CONVEY, PPIM UIN Jakarta dan UNDP menggandeng dan membentuk satu kolaborasi utuh dalam menangkal dan mencegah paham esktrimisme berbasis kekerasan di Indonesia.

## PENGANTAR

Problem ekstremisme bernuansa kekerasan (Violent Extremism, disingkat VE) bukan hal yang baru dan bukan pula problem salah satu agama, negara, atau wilayah tertentu. VE adalah problem lama setua umur peradaban manusia itu sendiri. Faktor penyebab VE ini juga bermacam-macam; dari politik, ekonomi, perubahan sosial, kejiwaan, agama (ideologi) hingga keluarga. Tidak mengherankan jika perkelahian antarpemuda yang kebetulan mempunyai latar belakang agama berbeda di Ambon, Maluku, menjadi bara api konflik kekerasan komunal agama.

Kompleksitas masalah VE ini harus diselesaikan dengan melibatkan banyak pihak dalam menanganinya, salah satunya adalah bagaimana masyarakat sipil dan lembaga pendidikan ikut andil secara aktif dalam mengatasinya. Proyek CONVEY (Countering Violent Extremism for Youth) Indonesia dimaksudkan untuk merangkul masyarakat sipil, lembaga riset kampus, dan pemerintah agar berperan aktif menangani masalah VE di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta karena PPIM sadar bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara bersama-sama, gotong royong, sesuai dengan kearifan lokal bangsa kita.

CONVEY memilih ranah pendidikan sebagai basis dari program-programnya. Hal ini berangkat dari keyakinan bahwa sebuah program penanggulangan VE juga harus menciptakan sistem pencegahan yang kuat di masyarakat. Pendidikan dinilai tepat untuk menumbuhkembangkan pikiran yang toleran dan terbuka terhadap perbedaan-perbedaan. Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu kanal yang dapat menghubungkan program ini dengan para -pemuda Indonesia-generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan negara ini di masa mendatang.

CONVEY sangat peduli dengan pemuda karena mereka adalah kelompok yang sangat rentan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang berpaham kekerasan ekstrem. Sifat pemuda yang ingin tahu, ingin mencoba sesuatu yang baru, atau bahkan sesuatu yang dianggap heroik, sangat mudah dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem. Oleh karena itu, mengawal pendidikan untuk terus memberikan materi yang mencerdaskan, merawat kebinekaan, dan mencegah pemuda untuk melakukan kekerasan adalah hal yang penting. Memang belum banyak yang dilakukan oleh CONVEY, tetapi dengan mengungkapkan kepada publik dan pemangku kebijakan tentang salah satu hasil riset CONVEY bahwa sudah banyak siswa dan mahasiswa yang terpapar dengan ide-ide VE, maka menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya pendidikan menjadi signifikan.

Melakukan perlawanan terhadap kekerasan ekstrem melalui pendidikan ibarat membangun tembok pertahanan diri dari pengaruh negatif propaganda dan indoktrinasi kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan dalam menyuarakan aspirasinya.

Selama satu tahun ini, setidaknya ada jejak-jejak kecil yang dapat ditemukan dalam berbagai produk CONVEY. Produk berupa buku-buku seperti buku khutbah Jumat, videografi & infografi, foto, taklimat kebijakan (policy brief), CONVEY Report, dan ringkasan eksekutif (executive summary) yang disarikan dari kegiatan-kegiatan CONVEY kami harapkan dapat berkontribusi bagi tumbuh kembang perdamaian di bumi Indonesia.

Terakhir, terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada individu-individu hebat di Project Management Unit (PMU) yang telah mengabdikan dirinya untuk Program CONVEY Indonesia, terutama kepada Fuad Jabali (Project Manager) dan Ismatu Ropi (Deputy Project Manager). Untuk para Project Officer dan Technical Adviser, Din Wahid, Didin Syafruddin, Ali Munhanif, Jajang Jahroni, Dadi Darmadi, dan Hamid Nasuhi saya ucapkan salute buat mereka karena sudah mau berkomunikasi sampai lupa waktu dengan mitra-mitra CONVEY. Tentu saja ucapan terimakasih juga saya hanturkan kepada teman-teman muda mulai dari Herda Maulida, Narsih, Dani, Ridwansyah, Wiwik Julistianti, Dita Kirana, Utami Sandyarani, Endi Aulia Garadian, Hani Samantha, Abdallah Sy, Syaifa Rodiyah dan Amalia Nurul, yang sudah rela mengorbankan waktu malam minggunya demi CONVEY.

Selain itu, terima kasih juga saya sampaikan setinggi-tingginya kepada Direktur Eksekutif PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Umam, yang telah mewakafkan waktunya untuk ikut rapat-rapat PMU di luar kota dan tentu saja meninggalkan anak-istri di rumah. Kepada teman-teman UNDP Indonesia, Pak Christophe Bahuet, Pak Syamsul Tarigan, Pak Usman Situmorang, dan nama-nama lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terimakasih sebesar-besarnya karena sudah berlelah-lelah membantu PPIM UIN Jakarta dalam melaksanakan program CONVEY Indonesia selama ini. Semoga teman-teman semua tidak kapok!

Ciputat, 22 Maret 2018

Jamhari Makruf  
Team Leader Project Management Unit (PMU)  
CONVEY Indonesia

# DAFTAR ISI

PENGANTAR  
DAFTAR ISI

API DALAM SEKAM: KEBERAGAMAAN GEN Z, 1

ARAH DAN CORAK KEBERAGAMAAN KAUM MUDA MUSLIM:  
KONSERVATISME, HIBRIDASI IDENTITAS, DAN TANTANGAN RADIKALISME, 2  
CORAK, PENYEBARAN, DAN AKSESABILITAS LITERATUR KEISLAMAN  
DI KALANGAN GENERASI MILENIAL, 17

PESANTREN SALAFI DI INDONESIA:  
TEMUAN RISET DATABASE GERAKAN SALAFI, 25

RADIKALISME DI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL, 33

PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN KESISWAAN (OSIS) DALAM MEMPERKUAT  
KEBINEKAAN DAN KEHIDUPAN INKLUSIF DI SEKOLAH MENENGAH ATAS  
DAN MADRASAH ALIYAH, 43

EKONOMI KAUM MUDA DAN PENANGGULANGAN TERORISME  
DI INDONESIA, 51

ASESMEN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI KEMASYARAKATAN  
DI DAERAH PERBATASAN YANG TERKENA DAMPAK RADIKALISME, 57

KEGIATAN ASESMEN PROGRAM-PROGRAM DERADIKALISASI DI DALAM  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN, 61

ASESMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI MANTAN NAPITER & KOMBATAN  
DI JABODETABEK, LAMONGAN DAN POSO, 69

REVITALISASI PRAMUKA DAN KARANG TARUNA DALAM RANGKA MENANGKAL  
EKSTRIMISME-KEKERASAN, 77

RESPON PEMBACA TERHADAP PUBLIKASI BULETIN MUSLIM MUDA  
INDONESIA, 87

LEMBAGA KONTRIBUTOR, 92

RINGKASAN EKSEKUTIF

**API DALAM SEKAM:  
KEBERAGAMAAN GEN Z  
SURVEI NASIONAL TENTANG SIKAP  
KEBERAGAMAAN DI SEKOLAH  
DAN UNIVERSITAS DI INDONESIA**

PUSAT PENGAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT (PPIM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JAKARTA



## **LATAR BELAKANG**

Penelitian ini bermaksud melihat pandangan serta sikap keberagamaan siswa/mahasiswa dan guru/dosen di sekolah dan di perguruan tinggi. Sekolah dan perguruan tinggi biasanya memiliki pengajaran pendidikan agama Islam, yang semestinya mamperkuat civic values (kebebasan, persamaan, keadilan, toleransi, dan persatuan) berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Sekolah dan perguruan tinggi juga memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas bersama, memperkuat konsolidasi demokrasi, dan sebagai ruang yang membentuk keadaban publik.

Ironisnya, sekolah dan perguruan tinggi kehilangan esensinya dalam proses ini. Guru/dosen yang dipercaya sebagai “fasilitator keadaban”, malah cenderung intoleran dan radikal. Sikap keberagamaan mereka yang eksklusif menutup jalan mereka pada sikap toleran. Ruang kelas yang semestinya menjadi ruang dialog berubah menjadi ruang indoktrinasi. Pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah maupun di perguruan tinggi tidak membuka wawasan keislaman yang komprehensif, melainkan menumpulkan kepekaan terhadap kebhinekaan.

Tidak menutup kemungkinan virus radikal dan intoleran menjangkiti siswa/mahasiswa disebabkan tertutupnya ruang dialog di kelas, sehingga siswa/mahasiswa mencari alternatif lain dengan mengakses internet untuk memperoleh pengetahuan agama. Akses internet yang terbuka lebar menjadi peluang bagi mereka untuk membaca situs-situs radikal.

Oleh karena itu penting sekali kolaborasi bersama untuk mengatasi situasi di atas. Misalnya, kurikulum yang ada terkait pendidikan agama Islam bisa dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mempromosikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, meningkatkan nilai-nilai kebangsaan serta hubungan antara Islam dan negara. Ir. Soekarno pernah menegaskan pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni tahun 1945, bahwa “bertuhan yang tumbuh di Indonesia haruslah bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, berkeadaban, hormat menghormati, dan berbudi pekerti” (Feith & Castle, 1988, h.24).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini target populasi survei kami adalah siswa dan guru di tingkat SMA, dan mahasiswa dan dosen perguruan tinggi, yang berada di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Survei ini dilakukan pada rentang waktu antara 1 September sampai 7 Oktober 2017. Penelitian ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia, di mana untuk setiap provinsi dipilih secara acak (random) 1 kabupaten dan 1 kota. Jumlah sekolah diambil menggunakan teknik proportional sampling sehingga kabupaten atau kota yang lebih banyak jumlah sekolahnya memiliki jumlah

sampel sekolah yang lebih banyak pula. Total jumlah sampel dalam survei ini adalah 2.181 orang, yang terdiri dari 1.522 siswa dan 337 mahasiswa serta 264 guru dan 58 dosen Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur untuk mengukur tingkat intoleransi dan radikalisme. Pertama, alat ukur Implicit Association Test (IAT) untuk melihat potensi intoleransi dan radikalisme secara implisit. Kedua, menggunakan kuesioner self-report dalam menilai intoleransi dan radikalisme serta faktor-faktor yang mempengaruhi intoleransi dan radikalisme. Penekanan dalam survei ini adalah pada persoalan-persoalan toleransi beragama di Indonesia, seperti masalah-masalah khilafiyah antarumat Islam, pandangan mereka tentang kelompok Ahmadiyah dan Syiah, dan pandangan mereka tentang kebebasan beragama, dan lain-lain. Penelitian ini juga menggali persepsi mereka tentang islamisme (hubungan agama dan negara), seperti pandangan mereka tentang Pancasila dan UUD 1945, syariat Islam, negara Islam, jihad, serta kesesuaian Islam dengan demokrasi.



## BEBERAPA TEMUAN

Pada level opini, siswa/mahasiswa cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran. Hal tersebut tercermin dari persebaran antara opini radikal, toleransi eksternal, dan toleransi internal siswa. Dari ketiga kategori tersebut, pandangan keagamaan siswa yang paling intoleran (warna orange tua) terdapat pada opini radikal (58.5%) disusul opini intoleransi internal (51.1%) dan opini intoleransi eksternal (34.3%).

Sedangkan dari sisi aksi, tampak bahwa siswa/mahasiswa memiliki perilaku keagamaan yang cenderung moderat/toleran. Mereka yang termasuk dalam kategori aksi radikal, hanya 7.0% dan aksi intoleransi eksternal 17.3%. Namun pada aksi intoleransi internal, cenderung lebih tinggi, yaitu 34.1%.

Pada level opini, guru/dosen cenderung memiliki pandangan keagamaan yang toleran/moderat. Fakta ini berkebalikan dengan yang terjadi pada siswa. Hal tersebut tercermin dari persebaran opini guru/dosen pada lebih rendahnya opini intoleransi internal (33.9%), opini intoleransi eksternal (29.2%), dan opini radikal (23.0%).

Sedangkan pada level aksi, tampak adanya dua perbedaan signifikan antara aksi toleransi internal dan aksi radikal. Guru/dosen mempunyai kecenderungan kuat memiliki perilaku sangat intoleran pada kategori aksi toleransi internal (69.3%), sedangkan pada kategori aksi radikal 8.4%, dan pada kategori aksi toleransi eksternal 24.2%.

Skema di atas menunjukkan bahwa model pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berpotensi membentuk radikalisme siswa. Sama halnya dengan opini radikal guru, model pembelajaran PAI dari guru juga bisa memengaruhi radikalisme siswa. Artinya, guru menjadi faktor penting dalam pembentukan seseorang dalam proses menjadi intoleran dan radikal. Hal ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan guru dalam pembelajaran.

Kode	Porsi Pendidikan Agama terhadap pengaruh tidak bergaul dengan pemeluk agama lain	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Besar	431	23.18%
2	Cukup Besar	479	25.77%
3	Sedikit	396	21.30%
4	Sangat Sedikit	124	6.67%
5	Tidak Sama Sekali	429	23.08%
	Total	1859	100.00%

## JIHAD ADALAH PERANG MELAWAN NON-MUSLIM

**37.71**  
SETUJU



**62.29**  
TIDAK SETUJU

Data di atas menunjukkan bahwa anak-anak muda gemar mencari pengetahuan agama melalui internet (blog, website dan media sosial) dengan persentase 54.87%. Sumber rujukan kedua adalah buku/kitab dengan persentase 48.57%, channel televisi menempati posisi ketiga dengan persentase 33.73%.

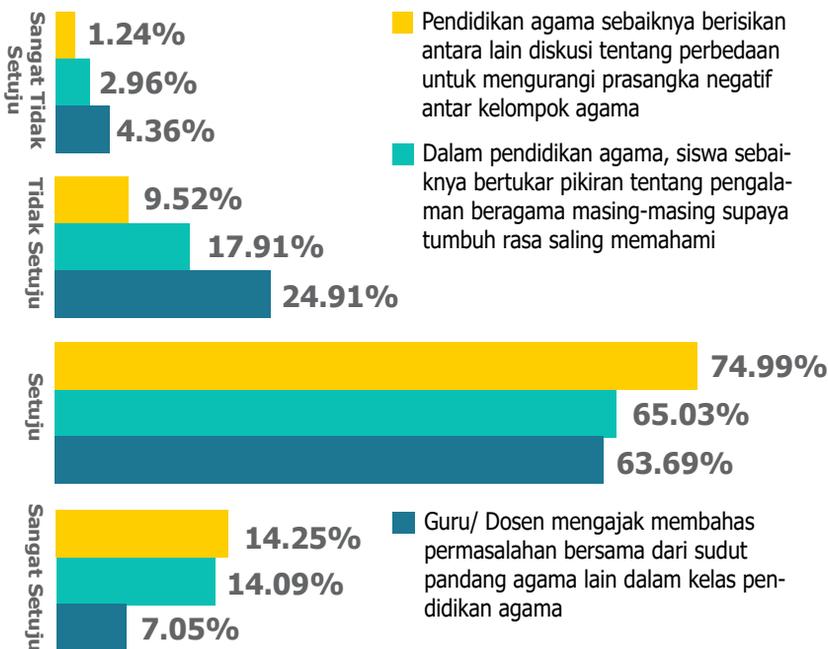
Jihad merupakan salah satu isu intoleran yang sering diusung kelompok Jihadis. Bagi mereka jihad adalah qital (perang) dan terutama ditujukan melawan non-muslim. Sebanyak 37.71% responden setuju jihad adalah melawan non-muslim.

*Relasi dengan Non-Muslim: dosen/guru dan siswa/mahasiswa bisa menerima keberadaan agama lain (ko-eksistensi) tapi tidak dengan Yahudi*

1. 83.85% (guru dan dosen) dan 79.07% (siswa dan mahasiswa) menyatakan bahwa orang Kristen bukan musuh orang Islam.
2. 66.15% (guru dan dosen) dan 76.22% (siswa dan mahasiswa) berpendapat bahwa orang Kristen tidak membenci orang Islam.
3. 64.60% (guru dan dosen) dan 70.36% (siswa dan mahasiswa) tidak keberatan jika mereka yang berbeda agama memberi bantuan kepada lembaga-lembaga Islam.
4. Namun 55.51% (siswa dan mahasiswa) dan 34.47% (guru/dosen) memberikan persetujuan apabila ada rencana pendirian rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka tinggal.
5. 57.76% (guru dan dosen) dan 53.74% (siswa dan mahasiswa) setuju bahwa orang Yahudi adalah musuh orang Islam.
6. 63.66% (guru dan dosen) dan 52.99% (siswa dan mahasiswa) setuju bahwa orang Yahudi itu membenci Islam.

*Relasi dengan Muslim aliran minoritas: dosen/guru dan siswa/mahasiswa sulit menerima Muslim yang mengikuti ajaran Ahmadiyah dan Syi'ah*

1. 30.99% (siswa dan mahasiswa) menyebut Syi'ah sebagai kelompok yang tidak disukai di urutan pertama sedangkan 19.72% (siswa dan mahasiswa) menyebut Ahmadiyah di urutan kedua. Sementara 64.66% (guru dan dosen) menyebut Ahmadiyah di urutan pertama dan 55.60% (guru dan dosen) menyebut Syiah diurutan kedua sebagai kelompok yang tidak disukai.
2. 44.72% (guru dan dosen) dan 49.00% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju jika pemerintah harus melindungi penganut Syiah dan Ahmadiyah.
3. 87.89% (guru dan dosen) dan 86.55% (siswa dan mahasiswa) setuju jika Pemerintah melarang keberadaan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam.
4. 34.16% (guru dan dosen) dan 64.17% (siswa dan mahasiswa) mendukung pemerintah mengembalikan pengungsi Ahmadiyah Syiah di Sidoarjo ke tempat asal mereka.



Mayoritas siswa/mahasiswa (>70%) setuju bahwa dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam ada konten dan diskusi tentang agama lain. 74.99% responden setuju bahwa sebaiknya di dalam materi Pendidikan Agama memuat diskusi perbedaan antaragama untuk mengurangi prasangka terhadap agama lain. 65.03% setuju bahwa siswa sebaiknya bertukar pikiran tentang pengalaman beragama masing-masing untuk menumbuhkan rasa saling memahami antar penganut agama. Selanjutnya, 63.69% setuju bahwa guru/dosen mengajak siswa/mahasiswa untuk membahas permasalahan bersama dari sudut pandang penganut agama lain di dalam kelas Pendidikan Agama Islam.

Meskipun lebih dari 50% guru dan dosen setuju jika mata pelajaran/PAI mengajarkan tentang agama selain Islam, jumlah dosen yang setuju jauh lebih banyak dibandingkan dengan guru.

#### *Mengapa Menjadi Intoleran: Deprivasi Ekonomi dan Hukum*

1. Kondisi ekonomi, terutama kesenjangan ekonomi kaya-miskin, dipersepsi responden sudah dalam taraf parah. Sebanyak 52.29% menyatakan parah dan sangat parah. 43.46% menyebut sedang atau cukup parah.
2. Persepsi penerapan hukum yang tidak adil juga sangat besar. Sekitar 69.80% menyatakan kurang hingga sangat tidak adil.

#### *Umat Islam dalam Kondisi Terzalimi*

1. 62.11% (guru dan dosen) dan 55.08% (siswa dan mahasiswa) setuju dengan pendapat bahwa umat Islam saat ini dalam kondisi terzalimi.
2. 54.35% (guru dan dosen) dan 48.04% (siswa dan mahasiswa) berpendapat bahwa secara ekonomi, orang-orang non-Muslim lebih diuntungkan dibandingkan orang Muslim.
3. 40.06% (guru dan dosen) dan 36.79% (siswa dan mahasiswa) yang percaya bahwa orang non-Muslim bertanggung jawab atas ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia.

#### *Jihad: guru/dosen dan siswa/mahasiswa tidak setuju makna Jihad diartikan sebagai cara kekerasan*

1. 82.30% (guru dan dosen) dan 62.29% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju bahwa Jihad yang sesungguhnya adalah berperang melawan non-Muslim.
2. 93.17% (guru dan dosen) dan 76.65% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju jika tindakan pengeboman atau bom bunuh diri atas nama agama adalah jihad yang sesungguhnya.
3. 81.37% (guru dan dosen) dan 65.57% (siswa dan mahasiswa) tidak setuju jika orang yang murtad boleh dibunuh.

## **REKOMENDASI**

1. Pengenalan studi agama-agama dan kepercayaan perlu diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam
  - a) Terkait materi: dalam pengajaran PAI, perlu mengembangkan religious literacy, interfaith education.
  - b) Perlu memberikan banyak praktik pengalaman keberagaman, dan pengalaman mengatasi masalah bersama, seperti siswa-siswi yang berbeda agama bisa menceritakan pengalaman mereka merayakan hari besar agamanya, berbagi kisah tentang nilai-nilai agama yang menjunjung harkat kemanusiaan.
  - c) Penggunaan berbagai macam metode pendidikan yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakter pembelajar, seperti audio visual, infografis dan media sosial, dll.
2. Reformasi rekrutmen, pendidikan dan pelatihan Guru Agama Islam.
3. Negara berkewajiban mengembangkan pendidikan keagamaan yang terbuka, toleran, dan inklusif.
4. Pemerintah membuka peluang lebih besar pada guru-guru untuk mengikuti pelatihan tentang wawasan kebangsaan, keislaman, dan keindonesiaan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

**ARAH DAN CORAK KEBERAGAMAAN  
KAUM MUDA MUSLIM:  
KONSERVATISME, HIBRIDASI  
IDENTITAS, DAN TANTANGAN  
RADIKALISME**

CENTER FOR THE STUDY OF RELIGION AND CULTURE (CSRC)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JAKARTA



## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini hendak mengetahui secara mendalam struktur dasar sikap dan perilaku kaum muda Muslim generasi milenial (15-24 tahun) tentang kekerasan dan ekstremisme. Melibatkan kurang lebih 935-an aktivis muda Muslim yang terdiri dari 555 narasumber in-depth interview dan 380 narasumber FGD dengan varian ideologi yang sangat beragam di 18 kota/kabupaten, penelitian ini menemukan bahwa secara umum sikap dan perilaku kaum muda Muslim bisa dikategorikan moderat, namun pada saat yang sama tren konservatisme dengan ciri skriptural (cenderung memahami agama secara literal dan ahistoris) dan komunal juga menguat.

Kecenderungan terakhir ini melahirkan tantangan tersendiri bagi munculnya sikap dan perilaku intoleran, sekaligus menguatnya dukungan terhadap radikalisme dan ekstremisme di kalangan muda Muslim Generasi Z. Demi memudahkan pembacaan terhadap sikap dan perilaku kaum muda Muslim, studi ini mengajukan beberapa tema sebagai panduan wawancara mendalam dan FGD untuk mengukur seperti apa dan sejauhmana derajat dukungan mereka terhadap kekerasan dan esktrisme. Tema-tema tersebut merentang mulai dari yang paling ringan, misalnya soal pengalaman dan pendidikan keberagamaan, sampai pada yang paling berat seperti kekerasan dan terorisme. Secara spesifik, tema-tema yang diajukan mencakup pokok-pokok berikut: 1) religiusitas: pemahaman keagamaan dan pengalaman keberagamaan kaum muda Muslim, 2) pendidikan dan pembelajaran keagamaan, 3) keragaman (diversity) dan toleransi, 4) kebebasan individu dan Hak Asasi Manusia, 5) wawasan kebangsaan (nasionalisme), dan 6) radikalisme dan ekstremisme.

Kalangan aktivis muda Muslim menerima pendidikan dan pengajaran agama yang beragam, mulai dari pendidikan dalam keluarga, pendidikan formal, hingga pendidikan informal. Untuk pendidikan formal, mereka belajar agama di sekolah umum dan sekolah agama mulai dari SD/MI hingga jenjang-jenjang pendidikan di atasnya. Sekolah-sekolah Islam terpadu menjadi salah satu alternatif pembelajaran agama yang relatif digandrungi. Namun, di era milenial, media sosial menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya bagi anak muda dalam belajar agama. Mereka umumnya menyukai ustadz-ustadz yang digital-friendly karena mereka dapat mengakses ceramah ataupun tausiyahnya secara mudah di manapun dan kapan pun mereka menginginkannya. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum pengaruh media sosial relatif signifikan mereduksi peran pendidikan agama dalam keluarga dan peran guru agama di sekolah.

## **HIBRIDASI IDENTITAS**

Selain itu, penanda yang relatif dominan dari kaum muda Muslim Generasi Z sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini adalah mereka mengalami suatu fenomena yang disebut dengan hybridation of identity (hibridasi identitas). Yang dimaksud dengan hibridasi identitas di sini adalah adanya proses “persilangan” afiliasi dan orientasi keagamaan berdasarkan dinamika dan

interaksi sosial-politik-keagamaan yang mereka alami dengan lingkungan sosialnya. Fenomena hibridasi identitas ini juga dimaknai sebagai sebuah bentuk lahirnya identitas baru akibat percampuran budaya, tradisi, nilai dan prinsip yang dipegang oleh kaum muda Muslim akibat proses interaksi intensif antara seseorang atau sekelompok orang dengan konteks dan tradisi yang ada di sekitarnya. Seseorang dapat bersikap "akomodatif" terhadap nilai-nilai baru yang diperolehnya dari keluarga, guru, lingkungan, lembaga pendidikan, organisasi, dan lain-lain.

Hibridasi identitas kaum muda Muslim terjadi disebabkan oleh pengalaman yang mereka dapatkan sejak masih usia anak-anak sampai remaja dan atau sampai masa studi di perguruan tinggi. Tidak banyak dari kaum muda Muslim yang memiliki pengalaman yang linear dalam satu tradisi keagamaan. Dalam konteks ini, hibridasi identitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada aspek-aspek: 1) latar belakang keagamaan keluarga pada umumnya tidak diwarisi secara linear oleh kaum muda Muslim; 2) lembaga pendidikan maupun pemahaman keagamaan, baik yang diperoleh dari keluarga, lembaga formal, informal, internet, dan media sosial, menunjukkan persilangan nilai-nilai identitas budaya, sosial, dan politik-ekonomi yang saling mempengaruhi satu sama lain; 3) organisasi atau aktivisme yang mereka geluti sering tidak linear, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut (di sekolah, di kampus, maupun setelah lulus kuliah, dan bahkan hingga saat ini); 4) karakter urban dari kaum muda Muslim, di mana perpindahan tempat dari desa ke kota, atau perubahan status dari pelajar menjadi mahasiswa, membuat mereka berinteraksi dengan hal-hal baru yang belum didapatkan baik ketika di desa maupun ketika di bangku sekolah. Pertautan dan perjumpaan dengan dunia yang lebih luas dan kompleks ini membuat mereka mengalami hibridasi identitas yang sampai saat ini sedang berlangsung (dalam proses).

## **TOLERANSI, HAM, DAN IDEOLOGI NEGARA**

Respon terhadap keberagaman dan toleransi kaum muda Muslim dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua corak. Pandangan pertama menekankan pada toleransi komunal. Cara pandang ini dimungkinkan oleh dominannya skripturalisme dalam beragama, yaitu sikap keberagaman yang mengacu kepada dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang dipahami secara literal, tanpa melalui proses nalar perbandingan, dan tanpa mempertimbangkan konteks turunnya ayat atau munculnya hadits sehingga dapat ditarik prinsip-prinsip umum untuk diterapkan dalam situasi sosial-historis yang berubah. Skripturalisme ini berpengaruh pada cara menentukan batasan-batasan dalam toleransi beragama, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dalam toleransi komunal, nilai-nilai kolektif umat Islam lebih diutamakan daripada nilai-nilai individual sehingga pergaulan dan interaksi Muslim dan non-Muslim diterima sepanjang tidak mengorbankan nilai-nilai kolektif tersebut. Pandangan ini sebagian besar didukung oleh aktivis dakwah (ROHIS, LDK, dan kelompok dakwah di luar sekolah dan universitas).

Pandangan kedua berpijak pada toleransi kewargaan. Sebagian besar didukung oleh aktivis pergerakan kemahasiswaan Islam yang sudah mapan seperti HMI, PMII, IMM, dan organisasi keislaman di luar kampus yang progresif. Toleransi kewargaan ini dipraktikkan secara sadar dan aktif atas dasar nilai-nilai kewargaan/demokrasi yang disinari oleh konsepsi keislaman yang terbuka dan kontekstual. Pada tingkat tertentu, beberapa aktivis Islam progresif telah bergerak melampaui sekadar toleransi, tapi telah menjadikan keragaman sebagai prinsip dalam kehidupan beragama. Pandangan toleransi kewargaan juga didukung oleh anak-anak muda yang berhaluan nasionalis seperti GMNI, Pemuda Pancasila, dan KNPI. Namun, toleransi kewargaan nasionalis ini dicirikan dengan kecenderungan berjarak dengan diskursus keagamaan karena dirasakan sensitif. Akibatnya toleransi beragama yang ditampilkan bersifat pasif belaka.

Sejalan dengan sikap dan perilaku kaum muda Muslim atas keragaman dan toleransi sebagaimana diurai, respon mereka terhadap kebebasan individu dan HAM juga masih relatif kuat dengan unsur konservatisme, komunalisme dan skripturalisme. Terhadap tema ini, ada tiga kecenderungan pandangan. Pertama, pandangan yang setuju dengan kebebasan individu dan HAM, namun kebebasan itu sendiri harus dibatasi oleh nilai-nilai agama dan budaya setempat. Aspek komunal masih cukup kuat dalam matra yang pertama ini. Pandangan ini didukung oleh kaum muda Muslim yang sebagian besar aktif di ROHIS, LDK, OSIS, BEM dan dalam derajat tertentu Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan (OKP) seperti IMM dan KAMMI. Kedua, pandangan yang menolak sama sekali kebebasan individu dan HAM. Mereka berpendapat bahwa konsep HAM berasal dari Barat dan bukan dari Islam. Justru HAM diperkenalkan kepada kaum Muslim dalam rangka merusak umat Islam dengan menciptakan kebebasan individu yang tanpa batas. Pada umumnya pandangan ini didukung oleh kaum muda Muslim yang aktif dalam kelompok-kelompok organisasi Islam yang memang mencita-citakan kekhilafahan, seperti HTI. Bagi kelompok ini, kebebasan individu dan HAM harus dievaluasi dengan parameter Islam. Ketiga, pandangan yang percaya bahwa antara Islam dan HAM berjalan seiring. Mereka yang aktif di PMII, HMI, IPPNU, KNPI, Pemuda Pancasila, dan organisasi Islam progresif, mendukung pandangan bahwa kebebasan individu dan HAM tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Namun, dari ketiga kecenderungan pandangan di atas, hampir semuanya tidak setuju dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan pembubaran HTI. Kaum muda Muslim di hampir semua kalangan, mulai dari ROHIS hingga yang berhaluan nasionalis, tidak setuju dengan pembubaran HTI, kecuali mereka yang sebagian besar berlatar belakang NU, baik di kalangan aktivis PMII maupun IPPNU. Bagi kalangan aktivis muda NU, pembubaran HTI sudah tepat karena HTI sendiri mengkampanyekan suatu ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Terkait peran perempuan, kaum muda Muslim yang tergolong konservatif dan Islamis tetap memandang perempuan tidak berhak menjadi pemimpin. Bersandar pada al-Qur'an Surah Al-Māidah (34): "laki-laki sebagai pemimpin wanita.", mereka secara tegas menolak kepemimpinan perempuan. Kelompok ini bersepakat bahwa apabila perempuan menjadi pemimpin maka akan men-

yalahi kodratnya. Aktivistis ROHIS, LDK, HTI, Gema Pembebasan, Khilafatul Muslimin (KM), FPI, LUIS (Laskar Umat Islam Surakarta), dalam derajat tertentu, KAMMI mendukung pemikiran yang seperti ini. Para aktivis GMNI, PP, dan juga Islam moderat seperti PMII, IMM, dan HMI justru berpendapat bahwa feminisme harus dikampanyekan sebagai bentuk equal right dan social justice. Bahkan mereka mengharapkan kesetaraan gender menjadi cita-cita yang diidam-idamkan bersama, di mana perempuan dapat berperan aktif di ruang publik dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Lebih dari itu, mereka berharap subordinasi perempuan terhadap laki-laki harus direduksi jika emansipasi yang tengah diperjuangkan dapat membuahkan hasil yang baik.

Adapun dukungan aktivis muda Muslim terhadap Pancasila juga memiliki empat kecenderungan, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Pertama, mendukung Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara secara bulat karena Pancasila diyakini sebagai simbol perekat/pemersatu dan penopang prinsip kebhinekaan (diversity) dan kebangsaan. Kaum muda yang mendukung pandangan ini kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi dengan basis nasionalisme yang kuat seperti GMNI, KNPI, PMII, dan Pemuda Pancasila. Kedua, mengakui dan mendukung Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara sepenuhnya karena keseluruhan isi dan esensi sila-sila Pancasila bersifat islami, dalam artian cocok dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ketiga, mengakui dan menerima Pancasila secara ambivalen. Dalam tipologi ini terdapat dua kelompok: anak-anak muda Muslim yang bergabung ke Ormas seperti FPI mengakui Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, tetapi memiliki agenda ideologis mengembalikan Pancasila ke spirit Piagam Jakarta; sedangkan para aktivis HTI mengakui Pancasila tetapi memiliki agenda ganda sekaligus, penerapan syariat dan khilafah. Karenanya, pengakuan aktivis HTI terhadap Pancasila harus dilihat secara kritis sebagai pernyataan politik (political statement). Keempat, menolak Pancasila secara bulat. Penolakan terhadap Pancasila dijumpai di Bulukumba, Lamongan, Tasikmalaya, Lampung, Bogor, dan di beberapa tempat lainnya. Di Bulukumba, aktivis FPDI (Forum Pemuda Dakwah Islam) menolak seluruh hukum manusia kecuali hukum Allah, termasuk Pancasila. Di Lamongan, anak muda Pondok Pesantren Al-Islam di Tenggulon menolak mengakui Pancasila sebagai dasar dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Di Lampung, sejumlah aktivis muda mendambakan Khilafatul Muslimin dipimpin seorang Khalifah bernama Abdul Qodir Hasan Baraja. Di Bogor, terdapat generasi muda dengan corak pemikiran dan keislaman yang menginginkan negara Islam (daulah islamiyah) berdasarkan syariat Islam di segala aspek kehidupan. Corak utopian ini dianut para pemuda Islam yang pernah menjadi aktivis HTI.

## **KEKERASAN DAN EKSTREMISME**

Dalam kaitannya dengan kekerasan, secara umum terdapat tiga kecenderungan sikap dan perilaku kaum muda Muslim tentang kemungkaran yang muncul di masyarakat: pertama, menolak sama sekali razia dan sweeping. Kecenderungan pertama ini paling dominan di antara kaum muda Muslim di Indonesia di hampir semua tempat dan organisasi. Kedua, setuju razia/sweeping tanpa kekerasan dan

pengrusakan. Respon kedua ini lebih dominan di kalangan ROHIS dan LDK, dan beberapa aktivis OSIS, BEM, dan kalangan moderat dan nasionalis. Ketiga, setuju razia/sweeping secara penuh. Kecenderungan ketiga ini lebih banyak tampak dari kalangan aktivis muda Muslim yang memang terlibat dalam organisasi-organisasi yang sering melakukan hisbah (amar makruf nahi munkar).

Terkait dengan radikalisme, penelitian ini dapat mengklaim bahwa para aktivis muda Muslim cenderung menolak radikalisme dan ekstremisme yang mencoba melakukan perubahan sosial-politik secara revolusioner dan menyeluruh. Ide menggantikan Pancasila dengan kekhalifahan, yang resonansinya kuat di kalangan aktivis HTI, Khilafatul Muslimin, Jama'ah Muslimin, tidak terlalu mereka hiraukan. Meski demikian, kalangan muda Muslim ini menunjukkan corak keberagaman yang skripturalis dan konservatif dengan penekanan yang kuat pada nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai kewargaan. Pada kadar tertentu, sikap keberagaman skriptural dan komunal ini rentan terhadap pengaruh wacana radikalisme manakala relasi sosial mereka dengan kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda diwarnai oleh eksklusivisme sosial dan prasangka komunal.

Konsekuensi pandangan konservatif dan skripturalis di kalangan muda, dapat dilihat dari temuan lapangan di berbagai daerah, di mana sebagian mereka berupaya mereformulasi konsep-konsep keislaman yang berkembang di kalangan kelompok radikal. Salah satu contohnya adalah gagasan tentang khilafah yang resonansinya berkembang di kalangan muda, dan tidak terbatas di kalangan HTI. Terdapat kelompok muda Muslim yang meyakini kekhalifahan akan tegak pada saatnya nanti, terlepas didakwahkan atau tidak sebagaimana dilakukan HTI dan yang lainnya. Sementara secara umum, hampir semua kaum muda Muslim di Indonesia, baik di kalangan OSIS, ROHIS, LDK, BEM, dan OKP moderat, apalagi yang berhaluan nasionalis, sama sekali tidak yakin dengan pemikiran yang ingin mengakkan kekhalifahan atau kepemimpinan Islam. Bagi kaum muda yang termasuk ke dalam kategori terakhir ini, mereka berkeyakinan bahwa sangat sulit mengganti Indonesia dengan ideologi Pancasila menjadi negara khilafah dengan syariat Islam.

Penelitian ini menemukan indikasi yang kuat bahwa sangat minim aktivis muda Muslim milenial menganut sikap dan perilaku keberagaman yang ekstrim. Walaupun ada, sikap seperti itu dianut mereka yang memang sudah bergabung dengan kelompok-kelompok jihadis yang jumlahnya terbatas. Bahkan sebagian besar kaum muda Muslim memoderasi makna jihad. Tetapi menariknya, di tempat-tempat tertentu terjadi sejumlah anomali akibat pengaruh lingkungan sekitar ketika para pemuda melihat hal ini. Di Lamongan misalnya, terdapat sejumlah kaum muda Muslim yang secara mengejutkan menyatakan dukungannya terhadap apa yang telah dilakukan Amrozi dkk, pelaku Bom Bali. Yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa sejumlah aktivis yang berhaluan nasionalis seperti GMNI, Pemuda Pancamarga, dan KNPI justru berpendapat bahwa Amrozi bukanlah teroris.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara umum sikap dan perilaku kaum muda Muslim milenial terhadap radikalisme tidak menunjukkan adanya kecenderungan yang ajeg. Namun, pada saat yang sama mereka umumnya menunjukkan sikap dan perilaku keberagamaan yang konservatif, dengan coraknya yang komunal, skriptural, dan puritan. Sekalipun demikian, mereka pada dasarnya terbuka pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip moderatisme, dan nir-kekerasan, dengan penghargaan yang cukup baik pada kebebasan individu dan HAM, meski dibatasi oleh norma-norma agama dan budaya. Sikap seperti itu juga tercermin pada bagaimana mereka menceritakan hubungan-hubungan sosial mereka dengan kelompok-kelompok keagamaan yang berbeda-beda.

Corak dan identitas keberagamaan seperti itu adalah cerminan dari proses pembelajaran, pemahaman dan pengalaman keberagamaan yang dipengaruhi konteks agama, budaya dan sosial-politik yang kompleks. Hibridasi identitas, sebagaimana dijelaskan, tampaknya berpengaruh secara kuat terhadap proses pembentukan pandangan, sikap dan perilaku ini. Luas dan kompleksnya pelbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum muda Muslim milenial, membuat mereka memiliki kecenderungan konservatif dalam keberagamaan, terutama bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah dan perguruan tinggi tingkat awal. Jangkauan pengetahuan mereka yang masih terbatas, serta proses pencarian yang terus-menerus, membuat mereka mudah terdorong untuk mengikuti pandangan-pandangan normatif ketika disuguhkan isu-isu sensitif seperti keragaman dan toleransi, kebebasan individu dan HAM, wawasan kebangsaan maupun perihal radikalisme dan ekstremisme.

Namun demikian, kesimpulan di atas tidak lantas dipahami sebagai sesuatu yang linear dan konstan. Karena semua spektrum ideologis dari kaum muda Muslim dalam penelitian ini juga memperlihatkan patahan-patahan kecil di mana kecenderungan pada konservatisme dan kemudian radikalisme juga muncul. Mulai dari ROHIS, OSIS, BEM, LDK, HMI, IMM, PMII, KAMMI, dan bahkan organisasi yang berhaluan nasionalis sekalipun seperti GMNI, Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, dan KNPI memperlihatkan patahan-patahan tersebut. Dalam temuan studi ini, dukungan mereka terhadap pijakan doktrin keagamaan dalam menilai keberagamaan dan toleransi, kebebasan individu dan Hak Asasi Manusia, dukungan terhadap Pancasila dan demokrasi, dan dukungan terhadap radikalisme dan esktrisme sebagaimana diulas dalam temuan di atas relatif konsisten.

Berpijak dari kesimpulan di atas, ada beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini yang bisa dijadikan pertimbangan oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, universitas, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, dan masyarakat luas: 1) perlu memperbanyak dan memperluas perjumpaan-perjumpaan di kalangan kaum muda Muslim dengan beragam latar belakang yang berbeda, terutama dari sisi etnis dan ras. Misalnya, kemah antar etnis, antar agama dan sejenisnya. Perjumpaan-perjumpaan yang demikian akan memungkinkan kaum muda Muslim ini bisa mempelajari kelompok lain dengan cara

yang lebih respek dan terbuka; 2) membatasi pengaruh gerakan dan aktivisme Islam konservatif, garis keras dan radikal dalam lembaga pendidikan formal tanpa terjebak pada kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif, misalnya pelanggaran, pembekuan, dan sejenisnya; 3) memperkenalkan diskursus nilai-nilai kewargaan bagi kelompok-kelompok konservatif seperti ROHIS dan LDK melalui kurikulum formal di sekolah dan universitas; 4) sekolah atau universitas jangan mengabaikan program-program ROHIS dan LDK seperti liqa dan yang sejenis berjalan sendiri begitu saja tanpa intervensi dari otoritas sekolah dan kampus dengan diskursus nilai-nilai kewargaan; 5) selain itu penting juga mengekspos dan memperkenalkan keragaman penafsiran di dalam Islam terhadap kelompok-kelompok konservatif dengan ragam metode yang lebih populer; 6) mendorong kelompok-kelompok moderat untuk terlibat aktif dalam area-area dakwah yang lebih luas seperti ROHIS dan LDK, dan tidak hanya berebut dalam BEM semata.

RINGKASAN EKSEKUTIF

**CORAK, PENYEBARAN,  
DAN AKSESABILITAS LITERATUR  
KEISLAMAN DI KALANGAN GENERASI  
MILENIAL**

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
YOGYAKARTA



## LATAR BELAKANG

Kerentanan kaum muda Indonesia, khususnya pelajar dan mahasiswa, terhadap radikalisme, ekstremisme, dan terorisme berkait erat dengan kegamangan mereka menghadapi problem-problem struktural dan ketidakpastian masa depan. Dampak paling nyata dari modernisasi dan globalisasi yang berlangsung cepat tentu saja dirasakan oleh generasi milineal. Lahir dalam rentang 25 tahun terakhir, mereka tumbuh dan besar dalam dominasi budaya digital. Dalam situasi serba tidak pasti, generasi milenial berhadapan langsung dengan masifnya pengaruh ideologi Islamis yang datang menawarkan harapan dan mimpi tentang perubahan. Dibangun di atas narasi yang menekankan pentingnya semangat kembali kepada dasar-dasar fundamental Islam dan keteladanan generasi awal, ia berusaha membuat jarak dan demarkasi antara Islam dengan dunia terbuka (*open society*) yang digambarkan penuh dosa-dosa *bid'ah*, *syirik*, dan kekafiran. Meskipun bersifat utopis, ideologi Islamis ternyata memiliki daya tarik, terutama karena kemampuannya menawarkan mengartikulasi rasa ketidakadilan dan membingkai semangat perlawanan terhadap kemapanan.

Peran literatur keislaman dalam persemaian ideologi Islamis di kalangan pelajar dan mahasiswa sangatlah signifikan. Ideologi Islamis umumnya menyusup melalui buku-buku dan bacaan keagamaan yang menyebar di kalangan pelajar dan mahasiswa. Pada kenyataannya, literatur yang berusaha menjajakan ideologi Islamis—yang berpusat pada tuntutan tentang totalitas penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan dan bermuara pada keinginan untuk mengganti sistem negara-bangsa demokratis dengan khilafah, bahkan jika perlu ditempuh dengan kekerasan—hadir mencolok, membanjiri arena dan lanskap sosial di sekitar SMA dan Perguruan Tinggi Indonesia.

## FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini adalah melihat pola-pola produksi, transmisi dan penyebaran literatur-literatur keislaman dengan berbagai macam corak dan kecenderungan ideologisnya serta memahami tingkat aksesibilitas dan keberterimaannya di kalangan generasi milenial.

## METODE

Penelitian diselenggarakan di 16 kota, yaitu Medan, Pekanbaru, Padang, Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Jember, Pontianak, Banjarmasin, Makasar, Palu, Mataram, Ambon dan Denpasar. Kota-kota ini dipilih dengan mempertimbangkan sebaran, tipologi dan karakteristik-karakteristik penting yang melekat di dalamnya. Sebagai sampling kami memilih beberapa SMA, SMK dan MA, baik negeri maupun swasta, juga PT negeri yang berada di bawah Kemenristek-dikti dan Kemenag serta PT swasta yang keseluruhannya mewakili peta keragaman dan ketersebaran institusi pendidikan menengah dan tinggi di masing-masing kota tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, survey, FGD yang melibatkan lebih dari 320 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa, serta wawancara mendalam yang melibatkan lebih dari 280 informan. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan buku-buku keislaman yang tersebar di kalangan pemuda.

## TEMUAN-TEMUAN KUNCI

Literatur-literatur keislaman diproduksi oleh berbagai penerbit yang berafiliasi dengan gerakan-gerakan dan organisasi Islamis yang berkembang di berbagai kota di Indonesia. Solo menjadi kota yang paling banyak melahirkan penerbit yang aktif memproduksi literatur Islamisme, diikuti Yogyakarta, Jakarta dan Bogor. Dalam konteks ini peran agency jelas tidak bisa diabaikan. Ada hubungan yang paralel antara pertumbuhan produksi literatur keislaman di sebuah kota dengan perkembangan gerakan-gerakan islamis di kota tersebut.

Solo menjadi rumah utama bagi penerbit-penerbit dan toko buku semisal Jazera, Arafah, Aqwan, Al Qowam, dan Gazza Media, yang memiliki kedekatan dengan Pesantren Ngruki dan aktif memproduksi buku-buku jihadisme di Indonesia. Counterpart-nya memang ada di beberapa kota lain, misalnya Al-Qamar Media (Yogyakarta), Pustaka Ibnu Umar (Bogor), Pustaka At-Taqwa (Bogor), Darul Haq (Jakarta) Pustaka Imam Adz-Dzahabi (Bekasi), Pustaka Imam asy-Syafi'i (Bekasi), dan Risalah Ilmu (Cibubur). Sementara di Yogyakarta terdapat penerbit Pro-U Media yang terhubung dengan Masjid Jogokaryan dan aktif memproduksi literatur tarbawi dalam berbagai genre, termasuk yang bercorak populer. Di Jakarta dan Bogor berkembang Al-Fatih Press dan Khilafah Press, yang gigih menerbitkan buku-buku yang memuat pesan tentang pentingnya perjuangan menegakkan khilafah.

Dari penerbit-penerbit di atas literatur keislaman sampai ke tangan generasi milineal melalui aktor-aktor perantara (intermediate actors), termasuk distributor, agen-agen penjualan, pemilik toko, pedagang, pengelola diskusi dan pameran buku, tokoh-tokoh gerakan Islam, dan aktivis dakwah. Mereka berupaya mendistribusikan buku-buku keislaman melalui jejaring agen-agen penjualan dan toko buku tertentu, yang men-display-nya pada pojok-pojok strategis toko buku mereka. Secara berkala, jaringan agen, distributor dan pedagang serta toko buku akan mengadakan pameran buku keislaman (Islamic Book Fair) untuk menjaring peminat dalam skala yang lebih luas.

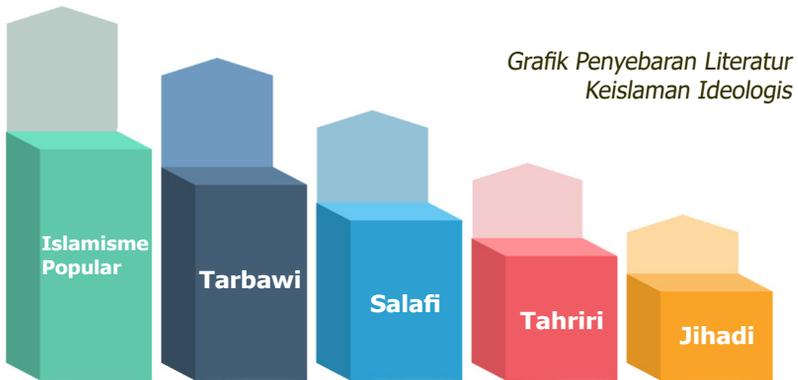
Berkembangnya budaya digital mendorong pergeseran minat generasi milineal dari media cetak (printed media) kepada media online. Mereka kini lebih suka mengakses sumber-sumber pengetahuan keislaman melalui internet. Tak sedikit juga yang mempelajari Islam melalui media online, seperti aplikasi smartphone, facebook, instagram, youtube, line, whatsapp, dan Instagram. Memahami pergeseran ini, banyak penerbit juga mulai memproduksi literatur keislaman berbasis digital.

Para agen penjualan dan toko buku menjalin hubungan dengan aktivis-aktivis Rohis dan LDK yang bertanggung jawab mengorganisir mentoring Islam, pengajian, halaqah, daurah, liqa', mabit dan aktivitas lainnya. Kebutuhan para pelajar dan mahasiswa yang terlibat dalam Rohis dan LDK terhadap literatur keislaman cukup besar karena kaderisasi Rohis dan LDK dibarengi dengan tuntutan agar mereka menguasai literatur-literatur kunci keislaman. Para anggota bahkan didorong untuk membaca setiap hari setidaknya 5 halaman. Banyak pelajar dan mahasiswa mengaku senang belajar agama model mentoring atau liqa' dan halaqah karena hubungan antara

mereka dan murabbi atau mentor lebih dekat dan informal. Tingginya minat pelajar dan mahasiswa terhadap buku tertentu akan mendorong para aktivis Rohis dan LDK untuk menggelar acara bedah buku yang menghadirkan penulis buku tersebut.

Merespons gencarnya serbuan literatur keislaman yang berusaha menjajakan ideologi Islamis dengan berbagai variannya, pemerintah melalui kementerian terkait melakukan berbagai terobosan, di antaranya dengan menerbitkan buku standard PAI bagi pelajar SMA bertajuk Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mengikuti Kurikulum 2013, buku ini berusaha menyajikan materi keislaman yang bercorak "moderat-progresif", dengan penekanan tertentu terhadap pendidikan karakter. Di Madrasah Aliyah situasinya tidak jauh berbeda. Buku-buku yang dijadikan pegangan utama di kelas adalah buku-buku terbitan Kementerian Agama yang bercita-cita "menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan umat beragama", sebagaimana dinyatakan tegas oleh Dirjen Pendis dalam kata pengantar buku-buku tersebut. Namun di beberapa tempat masih terdapat gap antara cita-cita dan kenyataan yang tertulis. Berbeda dengan buku-buku PAI yang dipakai di SMA dan MA, buku Pendidikan Agama Islam Bagi Mahasiswa terbitan Kemenristek-Dikti (2016) gagal menempatkan dirinya sebagai bacaan utama dalam mata kuliah PAI di perguruan tinggi. Alih-alih, dosen mendorong mahasiswa membaca literatur karya dosen itu sendiri atau hasil kompilasi mereka atas bacaan dari berbagai sumber dalam bentuk modul-modul, handout serta slide presentasi.

Walaupun demikian, celah bagi literatur keislaman bermuatan ideologi Islamis masih cukup terbuka untuk memengaruhi aspirasi dan pandangan para pelajar dan mahasiswa. Celah tersebut masih terbuka bukan saja karena beberapa ketidakjelasan arah diskusi yang dikembangkan dan ketidakpercayaan stakeholders, terutama untuk PAI perguruan tinggi, terhadap buku-buku tersebut, namun juga karena penekanan yang berlebihan terhadap isu-isu moralitas dan pendidikan karakter. Hal terakhir ini melipatgandakan kegamangan kaum muda, tertama pelajar dan mahasiswa, menghadapi masa depan, yang diperparah terjangan isu 'kepanikan moral' sebagai akibat meluasnya pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan kenakalan khas remaja dan kaum muda lainnya. Mereka kemudian berupaya untuk membentengi diri dengan mengeksplorasi lebih jauh literatur-literatur keislaman yang memberi pesan kuat tentang dekandensi moral yang melanda umat sebagai dampak ekspansi budaya sekuler Barat atau dunia kontemporer yang digambarkan penuh dosa-dosa bid'ah dan kekafiran, yang hanya bisa diatasi dengan penerapan syariah secara menyeluruh. Di sinilah literatur bercorak jihadi, tahriri, salafi, tarbawi, dan Islamisme populer menemukan celah untuk masuk ke dalam alam pikiran pelajar dan mahasiswa.



Meskipun dalam skala terbatas, literatur jihadi—yang menggambarkan dunia saat ini berada dalam situasi perang menyeluruh sebagai akibat di-baikannya kedaulatan mutlak ilahi dan karena itu menekankan keharusan bagi umat Islam mengobarkan jihad di manapun mereka berada—mengisi peta literatur keislaman di Tanah Air. Di antara buku jihadi yang laku dan mengemuka adalah *Tarbiyah Jihadiyah* karya Abdullah Azzam dan *Jihad Jalan Kami* karya Abdul Baqi Ramdhun.

Literatur tahriri mengintip di belakangnya dan berhasil—dalam skala yang lebih luas daripada literatur jihadi—menyebarkan pengaruhnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Literatur jenis ini meliputi buku-buku terjemahan karya Taqiyyuddin An-Nabhani dan Abdul Qadim Zallum. Dalam perkembangannya para aktivis Hizbut Tahrir atau simpatisan mereka mengadaptasi dan mengappropriasi ide-ide tahriri ke dalam bahasa yang lugas, sederhana dan sesuai dengan aspirasi kaum muda Muslim saat ini. Termasuk dalam kategori ini dua buku karya Felix J. Siau, penulis dan ustadz kondang di kalangan anak muda yang sangat aktif di media sosial, yang berjudul *Beyond the Inspiration* dan *Muhammad Al-Fatih 1453*, yang banyak dibaca generasi milenial.

Literatur salafi juga berhasil mengembangkan pengaruhnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, bahkan lebih menonjol dibandingkan literatur tahriri. Di antara literatur salafi yang membidik pelajar dan mahasiswa adalah buku-buku terjemahan karya Aidh al-Qarni, semisal *La Tahzan* dan *Pelajar Berprestasi* yang keduanya diterbitkan Qisthi Press. Literatur salafi yang lebih klasik, semisal karya-karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ataupun literatur salafi yang ditulis otoritas salafi kontemporer seperti Nasir al-Din al-Albani dan Muhammad Salih al-Usaamin, juga banyak beredar di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Dibandingkan literatur salafi, buku-buku tarbawi yang membawa misi menyebarkan ideologi Ikhwanul Muslimin berhasil menancapkan akar secara lebih luas dan mendalam di kalangan pelajar dan mahasiswa. Corak awal dari literatur tarbiyah adalah terjemahan karya-karya ideolog Ikhwanul Muslimin seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, dan Said Hawwa. Dalam konteks kekinian literatur tarbawi yang banyak disebut dan dikonsumsi oleh pelajar dan maha-

siswa adalah buku-buku yang mengapropriasi misi ideologis Banna, Qutb dan Hawwa menjadi pesan perubahan yang menempuh jalan bertahap, dengan terlebih dahulu menanamkan moralitas dan komitmen keberislaman. Contohnya adalah karya Salim A Fillah; Jalan Cinta Para Pejuang, dan karya Solikhin Abu Izzuddin berjudul New Quantum Tarbiyah: Membentuk Kader Dahsyat Full Manfaat.

Menarik untuk ditekankan bahwa jika literatur tahriri, salafi dan tarbawi berhasil dalam beberapa tingkat mengambil hati sebagian pelajar dan mahasiswa, literatur jihadisme tampaknya mengalami kegagalan signifikan. Sekalipun tersedia cukup memadai, pengaruhnya tetap terbatas di kalangan yang selama ini telah bersentuhan secara intens dengan simpul-simpul dan tokoh-tokoh gerakan jihadis ataupun institusi yang mendukungnya. Ini terutama karena literatur jihadi memberikan pilihan yang serba hitam-putih kepada kaum muda dan memaksa mereka untuk mengikuti kode perilaku dan tindakan tertentu yang berbahaya. Contoh literatur jihadi yang cukup banyak beredar adalah Tarbiyah Jihadiyah karya Abdullah Azzam.

Menghadapi serbuan literatur keislaman, kaum muda milineal rupanya tetap memiliki daya seleksi, adaptasi, dan apropriasi, mengikuti kecenderungan mereka sebagai generasi milineal yang tumbuh dalam arus budaya konsumsi. Mereka tidak mudah terbawa ke dalam pusaran ideologi tertentu, apalagi yang ingin mendikte dan mengunci mereka

dengan pilihan yang serba hitam-putih, sesuai ekspresi kultural kaum muda. Alih-alih, pelajar dan mahasiswa mencoba mencari literatur yang dapat memahami suasana hati dan identitas budaya mereka, sambil menunjukkan jalan bagaimana menyelesaikan problem-problem keseharian yang mereka temui sekaligus membangun optimisme menghadapi tantangan kekinian dan harapan masa depan.

Dalam konteks inilah buku-buku dan majalah keislaman yang mengusung tema-tema keseharian dan populer rupanya mendapat tempat yang sangat penting di kalangan pelajar dan mahasiswa. Pengaruhnya paling luas dibandingkan dengan corak-corak literatur keislaman yang dijelaskan di atas. Kuncinya antara lain, sekalipun disisipi dengan pesan-pesan ideologis, literatur Islamisme populer mengemas isi dengan renyah dan trendy serta menawarkan berbagai tuntunan praktis dalam mengarungi kehidupan. Disuguhkan dengan corak fiksi, populer dan komik, ia menyodorkan narasi-narasi pendek dengan bahasa sederhana yang tidak menggurui, dan dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik. Dengan cara demikian, ia mampu masuk ke dalam alam pikiran kaum muda seiring usaha mereka mencari berbagai alternatif mengatasi dilema dan paradoks kehidupan yang sedang mereka hadapi. Di antara buku-buku yang masuk dalam kategori Islamisme populer adalah buku-buku karya Felix J Siauw seperti *Udah Putusin Aja!* dan *Yuk Berhijab!*

Penting menggarisbawahi bahwa, sekalipun literatur keislaman sebagaimana digambarkan di atas, terus bermunculan dengan berbagai kecenderungan ideologis dan genre, teks-teks keislaman moderat ternyata masih mampu bertahan bahkan mengalami perkembangan. Merespons serbuan lit-

eratur Islamisme, Muslim Indonesia berusaha memproduksi buku-buku keislaman alternatif. Teks-teks alternatif ini mencakup buku-buku teks keislaman tradisional, buku-buku teks keislaman moderat dan progresif, dan buku-buku teks kontra narasi yang berusaha mengimbangi penyebaran paham-paham radikal.

## REKOMENDASI

1. Untuk mengimbangi penyebaran pengaruh literatur keislaman ideologis yang disebarkan jaringan gerakan-gerakan Islamis, Pemerintah perlu memperkuat literatur keislaman yang mengemban misi menyemai Islam arus-utama bercorak moderat, yang dapat dijadikan pegangan pokok pelajar dan mahasiswa dalam mempelajari Islam.
2. Penyediaan literatur Islam moderat perlu diikuti dengan penguatan kesadaran dan perluasan wawasan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengajaran agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi, terutama guru dan dosen, sehingga mereka dapat dengan baik menjelaskan isu literatur tersebut.
3. Penekanan pada pendidikan karakter, yang seolah-olah menuntut seluruh pelajar dan mahasiswa menjalani pendidikan dalam bayang-bayang keharusan menjadi pribadi yang berkarakter dan religius, perlu dikurangi jika Pemerintah belum mampu menyediakan literatur terkait yang proporsional, tepat dan memadai, serta mampu membaca dan memahami jalan pikiran kaum muda. Ketiadaan literatur semacam itu hanya akan memberi jalan bagi literatur-literatur keislaman ideologis berkembang lebih jauh dan menancapkan pengaruhnya di kalangan pelajar dan mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan keislaman luar kelas.
4. Jika tidak dapat melakukan kontrol dan pembatasan atas literatur keislaman yang beredar di pasaran, Pemerintah bisa mengimbangi penyebaran literatur keislaman ideologis yang berbahaya dengan mendorong publikasi buku-buku yang mengusung misi penyemaian Islam arus-utama yang moderat, termasuk karya-karya terjemahan penulis Muslim progresif dari berbagai belahan dunia, oleh penerbit-penerbit swasta dengan insentif
5. tertentu yang menggairahkan.  
 Karena ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa, karya-karya semacam itu harus ditulis dengan gaya populer dan isinya dikemas dengan renyah dan trendy menawarkan berbagai tuntunan praktis dalam mengarungi tantangan-tantangan kehidupan, tanpa mendikte secara berlebihan. Karya-karya itu dapat disuguhkan dengan corak fiksi dan komik atau corak lainnya yang populer.



RINGKASAN EKSEKUTIF

**PESANTREN SALAFI DI INDONESIA:  
TEMUAN RISET DATABASE  
GERAKAN SALAFI**

PUSAT PENGAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT (PPIM)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JAKARTA



## PENDAHULUAN

Dalam dua dasawarsa terakhir, kita menyaksikan pesatnya perkembangan gerakan Salafi di Indonesia. Gerakan Salafi adalah gerakan yang mengklaim diri sebagai pengikut manhaj Salaf, yakni tiga generasi pertama umat Islam, dengan jargon “kembali kepada al-Qur’an dan hadits” dan menjadikan manhaj Salaf sebagai sumber ketiga setelah al-Qur’an dan hadits. Gerakan ini dibawa oleh alumni dari Saudi Arabia dan Yaman pada akhir tahun 1980-an dengan menyelenggarakan kajian Salafi. Gerakan ini mendapatkan sambutan dari masyarakat luas, dan kini penyokong gerakan ini telah berhasil mendirikan lembaga pendidikan pesantren, madrasah, sekolah di berbagai kota di Tanah Air. Beberapa pesantren Salafi kini berhasil menerbitkan majalah yang terbit secara berkala dengan oplah yang cukup besar. Bahkan kini, telah berdiri radio dan televisi Salafi.

Beberapa pesantren Salafi menimbulkan kontroversi dan ketegangan di kalangan masyarakat. Bulan Agustus tahun lalu, kita dikejutkan oleh kasus pembakaran umbul-umbul merah putih oleh seorang ustadz di pesantren Ibnu Mas’ud di Bogor, disusul kemudian penolakan sebagian masyarakat Bogor atas pembangunan masjid Imam ibn Hanbal, tempat di mana pengajian Salafi diselenggarakan secara rutin. Reaksi negatif terhadap gerakan Salafi juga muncul di beberapa kota seperti Batam<sup>1</sup> dan Surakarta<sup>2</sup>.

Meskipun penelitian tentang gerakan Salafi di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa ahli seperti Noorhaidi Hasan<sup>3</sup>, Din Wahid<sup>4</sup>, Jajang Jahroni<sup>5</sup>, dan Sunarwoto<sup>6</sup>, namun kajian mereka tidak memberikan data seberapa banyak jumlah pesantren Salafi di Indonesia saat ini. Tahun 2004, International Crisis Group (ICG) mengidentifikasi 29 pesantren Salafi beserta tokoh-tokohnya yang tersebar di Indonesia<sup>7</sup>. Setelah ICG hingga kini belum ada penelitian yang membangun sebuah database gerakan Islam tersebut. Dengan latar belakang di atas, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian Database Gerakan Salafi di Indonesia. Laporan singkat ini hanya memaparkan temuan penelitian terkait dengan pesantren Salafi.

---

<sup>1</sup> Media Zainul Bahri, “Islamisme Terselubung versus Moderat Islam: Mencermati Geliat Radio-Radio Dakwah Di Batam,” in *Suara Salafisme: Radio Dakwah Di Indonesia*, ed. Din Wahid and Jamhari Makruf (Jakarta: PPIM, 2017).

<sup>2</sup> Sunarwoto, “Contesting Religious Authority: A Study of Dakwah Radio in Surakarta Indonesia” (Tillburg University, 2015).

<sup>3</sup> Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Ithaca: Cornell University, 2006).-

<sup>4</sup> Din Wahid, “Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia” (Utrecht Universiteit, 2014).

<sup>5</sup> Jajang Jahroni, “The Political Economy of Knowledge: Salafism in Post-Soeharto Urban Indonesia” (Boston University, 2015).

<sup>6</sup> Sunarwoto, “Contesting Religious Authority: A Study of Dakwah Radio in Surakarta Indonesia.”

<sup>7</sup> International Crisis Group, “Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don’t Mix,” ICG Asia Report (2004: International Crisis Group, 2004).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di 25 kota/kabupaten di 13 provinsi, yaitu: Jakarta, Banten (Tangerang Selatan dan Pandeglang), Jawa Barat (Bekasi, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, dan Indramayu), Jawa Tengah (Temanggung dan Surakarta), Yogyakarta, Jawa Timur (Surabaya dan Lamongan), NTB (Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Bima), Sulawesi Selatan (Makassar), Riau (Pekanbaru), Kepulauan Riau (Batam), Kalimantan Selatan (Banjarasin dan Martapura), Maluku (Ambon), dan Aceh (Banda Aceh). Wilayah-wilayah ini dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan gerakan Salafi cukup signifikan di area tersebut dibandingkan wilayah lainnya. Pengambilan data dilakukan selama 2 bulan (15 Agustus s/d 15 Oktober 2017) dengan melibatkan 15 peneliti dan 25 asisten peneliti.

## **TEMUAN-TEMUAN PENELITIAN**

Penelitian ini berhasil menemukan 111 lembaga pendidikan Salafi, yang terdiri dari 95 pesantren, 11 Sekolah Dasar, 3 Perguruan Tinggi, dan 2 lembaga kursus. Pesantren Salafi adalah pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Salafi, terutama karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahhabisme, dan Ibn Taymiyyah, seperti al-Ushul al-Tsalatsah, Kitab al-Tawhid, Kasyf al-Syubhat, dan al-'Aqidah al-Wasithiyyah. Pesantren Salafi berbeda dengan pesantren Salafiyah yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama yang bercirikan pengajaran kitab-kitab kuning dan melanggengkan tradisi.

Riset ini menemukan bahwa sebagian besar (59%) pesantren-pesantren Salafi berupaya mengintegrasikan program pendidikan mereka dengan kurikulum nasional, dan sisanya, 41%, pesantren Salafi menolak kurikulum nasional. Kelompok yang pertama adalah kelompok pesantren Salafi yang berafiliasi ke Saudi Arabia dan Kuwait. Kelompok ini menerapkan kurikulum Saudi Arabia dalam bidang ilmu-ilmu agama, dan mengkombinasikannya dengan kurikulum nasional dalam bidang ilmu-ilmu umum. Dengan cara seperti ini, pesantren kelompok ini berupaya untuk mendapatkan akreditasi (mu'adalah) dari Saudi Arabia, dan pada saat yang sama bisa mengikuti ujian negara atau ujian persamaan melalui Paket A, B atau C. Dengan demikian, alumni pesantren ini bisa melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi (baik PTKI maupun PTU). Sementara itu, kelompok pesantren yang kedua adalah mereka yang berafiliasi ke Yaman karena sebagian besar pemimpinnya adalah murid-murid Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i di Yaman. Pesantren ini hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan cara meng-copy paste kurikulum, materi dan metode pengajaran di Darul Hadits, Dammaj. Pelajaran umum yang ditambahkan hanya Bahasa Indonesia dan Matematika atau Berhitung. Keduanya ditambahkan karena dinilai penting untuk komunikasi dan transaksi bisnis. Konsekuensinya, pesantren jenis ini tidak mengikuti ujian negara. Alumninya bisa melanjutkan ke program pendidikan tingkat yang lebih tinggi yang diselenggarakan oleh pesantren sejenis dalam jaringan mereka, dan selanjutnya ke Yaman.

Perbedaan afiliasi ini disebabkan, salah satunya, oleh akses sumber dana dari luar negeri. Pesantren Salafi mendapatkan dukungan dana dari Timur Tengah, baik secara kelembagaan maupun individual. Dua lembaga yang dikenal banyak menggelontorkan dana, terutama di masa awal pendirian pesantren, adalah Jam'iyah Ihya al-Turats al-Islami (Kuwait) dan Yayasan Syeikh Aid Al-Tsani al-Khairiyya (Qatar). Namun demikian, harus diakui bahwa aksi terorisme atas World Trade Center (WTC) di New York tahun 2001 telah mengubah pola penyaluran aliran dana ini. Hal ini disebabkan beberapa yayasan yang dicurigai terkait aksi teror dibekukan dan Pemerintah Indonesia memperketat pengawasan atas aliran dana yang masuk. Untuk itu, pesantren Salafi dituntut harus mampu menggali sumber dana sendiri agar bisa mandiri secara finansial. Terkait dengan hal ini, beberapa pesantren Salafi yang berhasil mengembangkan pendidikan dengan kualitas yang sangat baik berhasil menggali dana dengan baik dari uang masuk yang cukup besar dan iuran SPP yang mahal. Selain itu, tentunya masih banyak dana yang bisa dihimpun dari pendukung dan simpatisan dakwah Salafi secara individual.

Afiliasi di atas juga berpengaruh pada program pendidikan formal yang ditawarkan oleh pesantren Salafi. Pesantren yang berafiliasi ke Yaman pada umumnya menawarkan program Taman Kanak-kanak (TK), Tahfizh untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Tadrib al-Du'at (Kader Da'i), Tarbiyat al-Nisa (untuk putri). Sedari dini, pesantren Salafi berusaha menanamkan ajaran Salafi dengan cara yang sangat sederhana. Sebagai contoh, siswa TK tidak diajarkan untuk bernyanyi, mendengarkan musik, dan menggambar atau melukis makhluk hidup. Sementara itu Program Tahfizh menjadi salah satu andalan bagi pesantren ini, dan diharapkan selama 6 tahun siswa bisa menghafal al-Qur'an. Tadrib al-Du'at diprogramkan untuk mencetak kader da'i Salafi, dan biasanya diikuti oleh siswa alumni SMA atau mahasiswa. Sementara itu Tarbiyat al-Nisa' diorientasikan untuk menyiapkan siswi menjadi seorang istri yang salehah. Kelompok pesantren yang berafiliasi ke Saudi dan Kuwait menawarkan program pendidikan formal untuk semua jenjang, dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi.

Lalu apa yang membedakan pesantren Salafi dari pesantren/madrasah lainnya? Untuk ini, kita perlu menelisik lebih rinci tentang materi dan kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Salafi. Berbeda dari pesantren tradisional yang menekankan pada pengajaran fikih, pesantren Salafi menekankan pada pengajaran aqidah di tempat pertama, lalu diikuti dengan pelajaran hadits dan fiqh. Untuk pelajaran 'aqidah, kitab yang digunakan adalah karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti al-Ushul al-Tsalatsah, Kitab al-Tawhid, Kasyf al-Shubuhah dan Masa'il al-Jahiliyah. Kitab lain yang juga diajarkan adalah al-'Aqidah al-Wasithiyah karya Ibn Taymiyya berserta syarahnya oleh Muhammad bin Salih al-Utsaymin, dan Aqidah al-Thahawiyah karya Imam al-Thahawi beserta syarahnya oleh Ibn Abi al-Izzi. Untuk materi hadits, kitab-kitab yang diajarkan sama dengan kitab-kitab yang digunakan di pesantren-pesantren lainnya, seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Bulughul Maram, al-Arba'in al-Nawawi dan Riyadh al-Shalihin. Yang membedakan adalah pensyarah kitab-kitab tersebut

di atas. Pesantren Salafi menggunakan syarah yang dikarang oleh ulama-ulama Salafi, seperti Syeikh Muhammad Shalih al-Utsaymin. Sementara itu, dalam bidang fikih, pesantren Salafi mengajarkan kitab fikih yang berbasis pada hadits. Kitab yang diajarkan, di antaranya, adalah al-Wajiz fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz karya Abd al-Azhim ibn Badawi dan 'Umdat al-Ahkam karya Ibn Qudamah beserta syarahnya Taysir al-Allam oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Alu Bassam. Kitab Shifat Shalat an-Nabi oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani yang berisi petunjuk praktis tentang tata cara salat yang dipraktikkan oleh Nabi sangat penting dan populer di kalangan pengikut Salafi.

Di samping tiga materi tersebut di atas, tentu disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya juga diajarkan, seperti Tafsir, Ushul Fiqh, Akhlak, dan Sirah Nabawi. Dalam kajian Tafir, kitab yang sering digunakan adalah Tafsir Ibn Katsir dan Tafsir al-Sa'diy. Penguasaan bahasa Arab juga mendapat perhatian yang sangat serius. Dalam bidang ini, kitab yang digunakan adalah al-'Arabiyyah li al-Nasyi'in dan Silsilah Ta'lim al-Lughah al-Arabiyya (keduanya terbitan LIPIA), al-Ajurumiyah karya Muhammad bin Daud al-Shanhaji dan Talkhish Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah, karya Ghufuran Aunur Rafiq, mudir Ma'had al-Furqan Gresik.

Semua materi di atas diarahkan untuk mengajarkan dan menanamkan ajaran Salafi kepada santri. Ada tiga ajaran Salafi yang sangat penting. Pertama, Tauhid yang dibagi menjadi Tauhid Rububiyah, Uluhiyyah, Asma wa Sifat, dan Mulkiyah. Kedua, al-Wala' wa al-Bara', yang secara sederhana dapat diartikan dengan cinta dan benci, atau asosiasi dan disosiasi. Konsep ini menekankan bahwa umat Islam harus mencintai dan menyukai segala usaha untuk memuliakan agama Islam dan umatnya, pada pada saat yang sama, umat Islam harus membenci segala sesuatu yang membenci Islam dan kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan umat Islam. Umat Islam harus bekerja untuk menjunjung tinggi Islam dan kemajuan umat Islam, dan harus membenci tindakan yang dapat merugikan umat Islam. Ketiga, Sami'na wa atha'na (taat dan patuh kepada penguasa). Doktrin ini mengajarkan umat Islam untuk patuh dan tunduk seutuhnya kepada penguasa; umat Islam tidak boleh memberontak kepada penguasa sezalim apapun penguasa tersebut selama umat Islam masih dibiarkan untuk menjalankan kewajibannya; umat Islam tidak boleh mengkritik pemerintah di depan umum. Secara umum, doktrin ini sama dengan doktrin Sunni, tetapi pengikut Salafi menerimanya hampir tanpa syarat. Pengikut Salafi, misalnya, mengharamkan demonstrasi.

Selain itu, di dalam pesantren santri tidak saja diajarkan doktrin-doktrin Salafisme, tetapi juga dibiasakan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dididik untuk hidup sesuai dengan manhaj (cara pandang dan perilaku) Salafi. Untuk itu, santri tidak dibenarkan untuk mendengarkan musik, menonton televisi, menggambar makhluk hidup. Mereka makan secara berkelompok 4-5 orang dari satu nampan yang besar, memelihara jenggot bagi santri dewasa, menghindari isbal (menggunakan celana atau sarung di atas mata kaki), dan menggunakan cadar bagi perempuan.

Sepintas tidak ada masalah dengan doktrin dan ajaran Salafisme, seperti terlihat dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren-pesantren Salafi.

Lalu, kenapa kemunculan pesantren Salafi, seperti di singgung di atas, menimbulkan gesekan, ketegangan dan konflik sosial di masyarakat? Banyak faktor yang menyebabkan konflik tersebut, dari perilaku sosial hingga kecemburuan ekonomi. Salah satu faktor penyebab konflik itu bisa ditelusuri hingga ke ajaran atau doktrin Salafisme, terutama doktrin tentang tauhid dan al-wala' wa al-bara'. Tauhid berarti mengesakan Tuhan, atau lawan dari syirik. Dalam praktiknya, penekanan kepada tauhid sering membuat dakwah Salafi menyinggung kelompok Muslim tradisional, karena kelompok Salafi menilai kelompok yang lain melakukan kemusyrikan dan bid'ah. Sementara itu, doktrin al-wala' wa al-bara', dalam pengamalannya kadang membuat pengikut Salafi menjadi eksklusif. Mereka membatasi komunikasi dan pergaulan, karena mereka khawatir terkontaminasi oleh pemikiran yang tidak sejalan dengan pemikiran Salafi. Akibatnya, bila tidak dipahami secara hati-hati dan diamalkan secara arif, kedua doktrin di atas bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

## **KESIMPULAN**

1. Riset ini berhasil mengidentifikasi 111 lembaga pendidikan Salafi di 25 kota/Kabupaten. Diyakini jumlah sesungguhnya jauh lebih banyak karena masih banyak wilayah yang belum diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pesantren Salafi bisa dianggap cukup pesat.
2. Pesantren Salafi tidak monolitik. Ada yang berkiblat ke Yaman dan menolak kurikulum nasional, sementara yang lain berkiblat ke Saudi Arabia dan Kuwait yang cenderung akomodatif terhadap tuntutan orang tua santri dengan mengadopsi kurikulum nasional.
3. Ajaran Salafisme, terutama Tauhid dan al-Wala' wa al-Barra' membuat pengikut Salafi sangat puritan dan militan, yang pada gilirannya bisa menimbulkan konflik dan ketegangan di tengah masyarakat.
4. Dukungan dana dari Timur Tengah dan dalam negeri, baik secara kelembagaan maupun individual sangat instrumental bagi perkembangan pesantren Salafi. Seiring dengan menurunnya dukungan finansial dari luar negeri, kini pesantren Salafi berusaha untuk mandiri secara finansial.

## **REKOMENDASI**

1. Pemerintah, terutama Kementerian Agama, harus terus melakukan komunikasi dan dialog dengan pimpinan pesantren Salafi, terutama pesantren-pesantren Salafi yang berafiliasi ke Yaman. Pemerintah diharapkan mampu merangkul para mudir pesantren Salafi dengan berbagai cara, seperti bantuan finansial, sehingga mereka merasa diperhatikan. Pada saatnya, diharapkan bahwa pemerintah bisa melakukan pembinaan bagi pesantren Salafi.
2. Untuk melengkapi data/jumlah pesantren Salafi, Kementerian Agama perlu melanjutkan riset serupa di kota dan kabupaten lain secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga pemerintah mempunyai data yang pasti tentang jumlah pesantren jenis ini. Data yang akurat ini diperlukan untuk membuat kebijakan terkait dengan pendidikan agama.



RINGKASAN EKSEKUTIF

# RADIKALISME DI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL

PUSAT STUDI BUDAYA DAN PERUBAHAN SOSIAL (PSBPS)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA



## LATAR BELAKANG

Indonesia, seperti juga banyak negara lain, berjibaku dengan ancaman terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme kekerasan yang dewasa ini kian kompleks. Sementara itu, penelitian tentang isu-isu radikalisme dan ekstrimisme kekerasan mendapat kritik internal maupun eksternal karena membingkai Islam sebagai sumber radikalisme dan kekerasan. Kritik juga ditujukan pada media yang dianggap bias karena banyak berfokus pada insiden dan aksi-aksi kekerasan di dunia Muslim, sambil menafikan aspek-aspek lain yang positif dan konstruktif dari masyarakat Muslim. Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) kini cenderung menggunakan pendekatan Mencegah daripada Melawan, atau Preventing Violent Extremism (PVE) daripada Countering Violent Extremism (CVE), untuk mempromosikan strategi yang lebih komprehensif, efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam upaya penjangkauan perdamaian dan keamanan global.

Berbagai hasil penelitian terdahulu di Indonesia menengarai maraknya radikalisme kekerasan di lembaga-lembaga pendidikan dan di media. Penelitian di mancanegara menegaskan hasil serupa: Rand Europe mengkonfirmasi bahwa media berbasis website memainkan peran besar dalam proses radikalisasi kalangan teroris dan ekstrimis kekerasan.<sup>1</sup> Bukti lapangan menegaskan bahwa media sosial meningkatkan peluang orang atau sekelompok orang menjadi radikal, sebagai pengaruh penjangkauan dan pelibatan, melalui penyebaran informasi, komunikasi dan propaganda keyakinan-keyakinan ekstrim. Sejalan dengan itu, Brookings Institute melaporkan lebih dari 46,000 akun Twitter dikendalikan pendukung ISIS guna memposting materi dan konten kekerasan untuk merekrut pengikut baru melalui YouTube, website Google, Facebook, dan sejenisnya. Konektivitas di dunia maya yang meningkat pesat telah memperburuk problem akut ini.<sup>2</sup>

Walaupun sudah ada penelitian sebelumnya tentang radikalisme dan ekstrimisme kekerasan di media online, belum ada penelitian akademis yang khusus membahas fenomena pengguna media sosial Indonesia dalam memproduksi dan mereproduksi wacana radikalisme dan ekstrimisme kekerasan. Penelitian ini dimaksudkan mengisi kekosongan tersebut, melalui analisis terhadap pembuatan, penyebaran dan konsumsi pesan-pesan radikal dan ekstrimisme kekerasan, dengan mempertimbangkan konteks geopolitik makro dari ideologi dan gerakan-gerakan ekstrimis pro-kekerasan. Peneliti, perumus kebijakan, dan praktisi yang prihatin akan ancaman kekerasan domestik dan global ini, perlu melakukan re-framing pendekatan-pendekatan baru yang berbasis-kan pada media online dan media sosial.

---

<sup>1</sup> Charlie Edwards and Luke Gribbon, "Pathways to Violent Extremism in the Digital Era," *The RUSI Journal* 158, no. 5 (October 2013): 40–47, <https://doi.org/10.1080/03071847.2013.847714>.

<sup>2</sup> J.M. Berger and Jonathon Morgan, "The ISIS Twitter Census: Defining and Describing the Population of ISIS Supporters on Twitter," Analysis Paper, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World (Brookings: The Brookings Institute, 2015).

## **TUJUAN DAN FOKUS PENELITIAN**

Memahami peran website dan media sosial dalam memproduksi dan menyebarkan ideologi-ideologi radikal yang mendukung maupun menolak radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Fokus penelitian ini adalah: 1) Popularitas website organisasi Islam di kalangan pegiat internet; 2) Respon website untuk isu-isu radikalisme; 3) Respon media sosial untuk isu-isu radikalisme; 4) Latar belakang dan motivasi memproduksi dan menyebarkan pesan radikal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Digital survey dengan menggunakan teknik web-mining/web-scraping terhadap 14 situs organisasi Islam sejak 1 Januari 2016 hingga 20 Oktober 2017.
2. Web-mining terhadap akun-akun media sosial (Facebook, Instagram, dan Twitter) yang diidentifikasi memproduksi pesan-pesan radikal.
3. Wawancara dengan 10 dari 14 redaksi website organisasi Islam.
4. Wawancara dengan 15 pengguna media sosial (5 Facebook, 5 Instagram, dan 5 Twitter).
5. Focused Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari akademisi, tokoh agama, pemerintah, pengusaha, ormas Islam, dan media

## **METODE PENELITIAN**

### *Website*

Website Organisasi Islam yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari 14 (semula 15) website, yang dianggap mewakili 3 kategori, yaitu:

1. Website Organisasi Islam Mainstream (yang berafiliasi pada organisasi Islam arus utama): NU Online (<http://nu.or.id>), dan Muhammadiyah (<http://suaramu-hammadiyah.id/>)
2. Website Islam yang berafiliasi pada organisasi Islam kontemporer: Forum Umat Islam (<http://www.suara-islam.com/>), Hidayatullah (<https://www.hidayatullah.com/>), Majelis Mujahidin (<http://www.majelismujahidin.com/>), Dewan Dakwah Islam Indonesia (<http://dewandakwah.or.id/>), Majelis Tafsir Al-Quran (<https://mta.or.id/>)
3. Website Unaffiliated (berdiri sendiri dengan menggunakan atribut Islam): Portal Islam (<http://www.portal-islam.id/>), Era Muslim (<https://www.era-muslim.com/>), VOA-Islam (<https://www.vo-islam.com/>), Muslim Moderat (<http://www.muslimoderat.net/>), Arrahmah (<https://www.arahmah.com/>), Thariquna (<http://www.thoriquna.id/>), Dakwatuna (<https://www.dakwatuna.com/>)

### Media Sosial

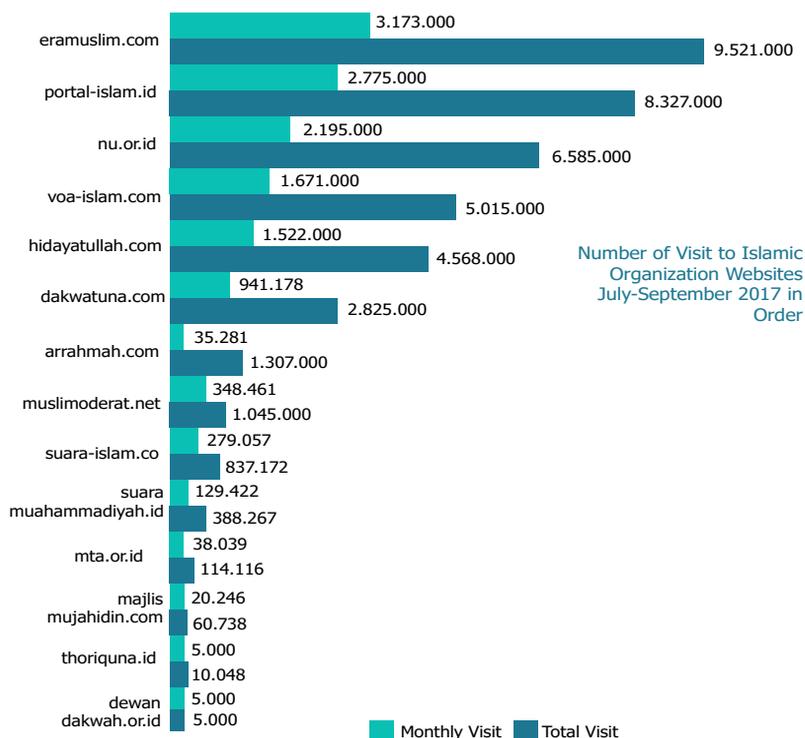
Media sosial yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari tiga platform, yaitu: Facebook (FB), Instagram, dan Twitter. Menurut wearesocial.com, jumlah pengguna FB saat ini mencapai dua milyar, dan Indonesia berada di peringkat keempat dunia dengan jumlah pengguna sebanyak 111 juta. Instagram berada di urutan ketiga dunia yang digunakan netizen dengan jumlah total pengguna di kisaran 600 juta. Twitter terbesar keenam yang digunakan pengguna internet secara global, dan Indonesia merupakan pengguna Twitter terbesar di dunia.

## TUJUAN DAN FOKUS PENELITIAN

Hasil penelitian secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Popularitas website Islam di kalangan pengguna internet ditentukan berdasarkan jumlah kunjungan pengguna internet dan peringkat website. Data yang digunakan adalah hasil perhitungan pemeringkatan Alexa (<https://www.alexa.com>) dan SimilarWeb (<https://www.similarweb.com>), dua situs yang menyediakan fasilitas informasi peringkat situs, didasarkan atas jumlah trafik pengunjung yang masuk ke situs tersebut. Alexa mengupdate data peringkat setiap hari, sedangkan SimilarWeb mengupdate setiap bulan.

### a) Jumlah Kunjungan



Berdasarkan perhitungan SimilarWeb, jumlah kunjungan pengguna internet pada website organisasi Islam selama Juli-September 2017 terbanyak adalah Era Muslim dengan total kunjungan 9.521.000. Website organisasi Islam arus utama yang paling banyak dikunjungi adalah NU Online, dengan total kunjungan sebanyak 6.585.000. Website organisasi Islam kontemporer lainnya yang paling banyak dikunjungi adalah Hidayatullah, dengan total kunjungan 4.568.000 atau 1.522.000 per bulan. Di antara website Islam non-afiliasi yang paling banyak dikunjungi adalah Era Muslim, dengan total kunjungan sebanyak 9,521,000.

## **b) Peringkat Website**

Data dari Alexa diambil dua kali pada tanggal 9 dan 29 Oktober 2017, sedangkan data dari SimilarWeb diambil pada 28 Oktober dan 30 November 2017. Perbandingan data yang diambil pada 9 Oktober 2017 dan 29 Oktober 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar website Islam mengalami kenaikan pengunjung. Kenaikan tertinggi terjadi pada website Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu sebanyak 769. Website yang peringkatnya mengalami penurunan adalah Arrahmah, Suara Islam, dan Majelis Mujahidin. Website Islam yang menduduki peringkat tertinggi secara nasional hingga 29 Oktober 2017 menurut Alexa adalah Portal Islam, yaitu peringkat 473 pada 9 Oktober 2017 atau 463 pada 29 Oktober 2017.

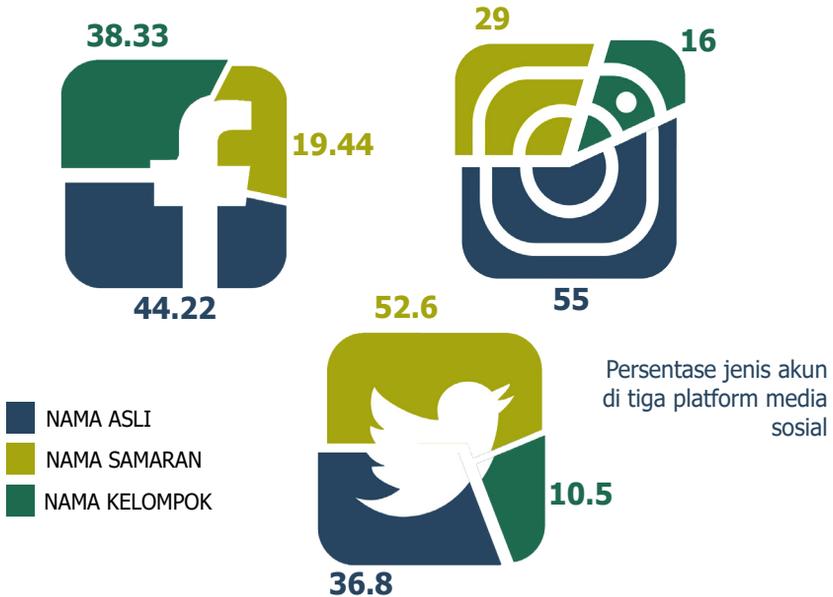
Berdasarkan data yang diambil dari SimilarWeb pada 28 Oktober 2017, peringkat tertinggi website Islam adalah Era Muslim, yaitu pada peringkat 489 secara nasional dan peringkat 22,825 secara global, yang kemudian disusul oleh Portal Islam pada peringkat 532 secara nasional dan peringkat 26,416 secara global. Perbandingan antara data yang diambil pada 28 Oktober 2017 dan 30 November 2017 menunjukkan bahwa sebagian besar website Islam yang mengalami kenaikan adalah Era Muslim, Portal Islam, NU Online, Hidayatullah, Muslim Moderat, dan Dewan Dakwah. Website yang mengalami penurunan adalah VOA Islam, Dakwatuna, Arrahmah, Suara Islam, Suara Muhammadiyah, MTA, Thoriquna, dan Majelis Mujahidin. Perbandingan antara pemeringkatan Alexa dan SimilarWeb menunjukkan bahwa Alexa dan SimilarWeb berbeda dalam menentukan posisi pertama dan kedua (antara Portal Islam dan Era Muslim), posisi keempat dan kelima (antara Hidayatullah dan VOA-Islam), dan posisi ketujuh, kedelapan, dan kesembilan (antara Muslim Moderat, Arrahmah, dan Suara Islam). Baik Alexa maupun SimilarWeb sama-sama menempatkan NU Online pada posisi ketiga dan Suara Muhammadiyah pada posisi kesepuluh.

2. Website organisasi Islam arus utama telah ikut aktif dalam menanggapi fenomena radikalisme di masyarakat dan secara konsisten menyampaikan pesan-pesan damai sesuai dengan misi masing-masing organisasi dan melakukan penolakan terhadap narasi radikalisme. Pesan-pesan damai dari organisasi Islam arus utama tercermin baik di dalam kolom editorial maupun artikel yang dimuat di website organisasi Islam arus utama.

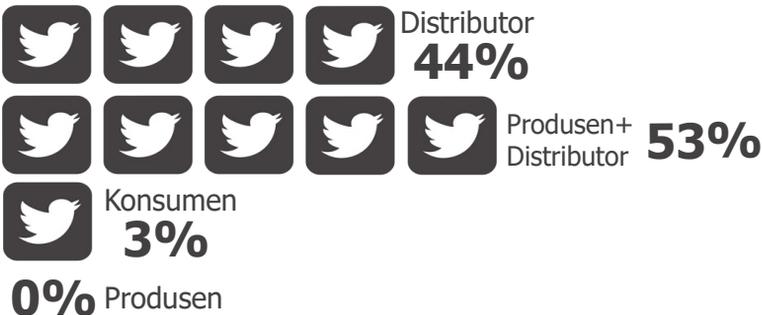
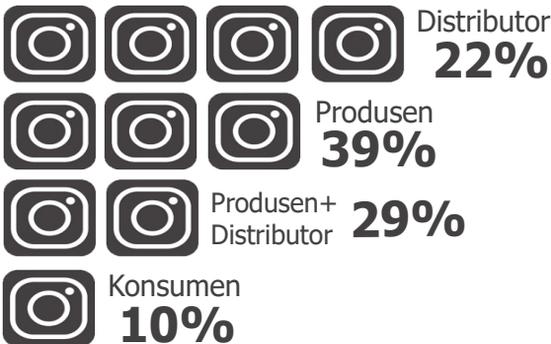
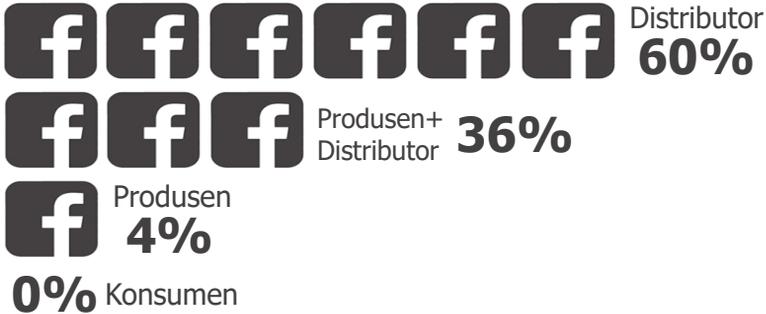
Sebagian besar website organisasi Islam kontemporer tidak banyak memproduksi teks untuk merespon fenomena radikalisme. Website organisasi Islam kontemporer lebih banyak memproduksi teks yang terkait dengan aktivitas organisasi sendiri. Website berfungsi sebagai humas yang memberitahukan kepada publik tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. Dengan demikian, website organisasi Islam kontemporer sebenarnya tidak memberikan respon atau bersikap pasif terhadap fenomena radikalisme di masyarakat.

Sebagian website organisasi Islam non-afiliasi mendukung fenomena radikalisme. Dukungan terhadap radikalisme tercermin melalui beberapa frasa kunci, seperti “mendirikan khilafah” dan “NKRI Bersyariah” yang menyiratkan anti-sistem, dan ungkapan “bunuh Ahok” dan “bunuh pendeta” yang menyiratkan penggunaan kekerasan dalam mencapai tujuan. Pesan-pesan radikal dan ujaran kebencian ditemukan di sebagian website non-afiliasi, terutama Portal Islam, Era Muslim, dan VOA-Islam.

3. Jumlah akun media sosial yang diteliti sebanyak 437 akun, yang terdiri dari 180 akun FB, 200 akun Instagram, dan 57 Twitter. Akun ketiga platform media sosial tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) Akun dengan identitas nama asli, (2) akun dengan identitas nama samaran, dan (3) akun dengan identitas nama kelompok. Adapun persentase ketiga jenis akun dari ketiga platform media sosial tersebut adalah sebagaimana pada gambar 4.



Selain itu, dalam konteks penyebaran pesan radikal, 1 dari 3 akun yang kita teliti aktif menjadi produsen sekaligus distributor di media sosial. Kecenderungan ini hampir bisa ditemukan pada semua platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Sedikit dari akun-akun yang kita teliti yang sekedar menjadi konsumen atau penerima per se pesan-pesan radikal. Bahkan, berdasarkan Gambar 5, hampir semua akun yang telah diteliti dapat dikategorikan sebagai akun yang giat mendistribusikan pesan-pesan radikal.



Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pegiat media sosial diperoleh informasi bahwa mereka belajar agama dari buku-buku tentang sejarah Nabi (tarikh), madzhab fiqih, Youtube, dan tokoh agama. Di antara nama-nama tokoh agama yang populer di media sosial yang berhasil diidentifikasi melalui web-scraping adalah Yusuf Mansur, Abdullah Gymnastiar, dan Felix Siauw.

## **KESIMPULAN**

1. Sebagian besar website organisasi Islam yang populer di kalangan pengguna internet adalah website organisasi Islam non-afiliasi.
2. Dalam merespon fenomena radikalisme di masyarakat, website ketiga kategori organisasi Islam mempunyai sikap sebagai berikut:
  - a. Website organisasi Islam arus utama konsisten menyajikan narasi menentang radikalisme.
  - b. Website organisasi Islam kontemporer bersikap “diam” (tidak mendukung, tidak pula melawan) fenomena radikalisme di masyarakat.
  - c. Narasumber yang sering disebut di website organisasi Islam mainstream dan kontemporer merupakan tokoh-tokoh yang populer di masing-masing organisasi.
  - d. Sebagian website organisasi Islam non-afiliasi mendukung radikalisme
  - e. Sebagian besar website organisasi Islam yang banyak dikunjungi oleh pengguna internet adalah website yang termasuk dalam kategori non-afiliasi.
3. Respon pengguna media sosial terhadap radikalisme adalah sebagai berikut:
  - a. Sebagian besar pengguna media sosial yang memproduksi dan menyebarkan pesan radikal menggunakan identitas nama samaran dan nama kelompok.
  - b. Narasumber yang sering disebut di kalangan pengguna media sosial bukan tokoh-tokoh yang populer di website organisasi Islam mainstream.
4. Motivasi pengguna media sosial memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pesan-pesan radikal adalah: (1) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media untuk mengkritisi pemerintah; (2) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media untuk menghentikan hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya; (3) ingin menjadikan akun media sosialnya sebagai media dakwah.

## **REKOMENDASI**

1. Pengelola website organisasi Islam kontemporer dan non-afiliasi perlu diajak bekerja sama dan dilibatkan di dalam upaya-upaya bina damai dan melawan radikalisme yang dapat mengarah pada ekstremisme kekerasan dan terorisme, dengan pendekatan inklusif yang mengedepankan metode nir-kekerasan.
2. Untuk mendukung upaya-upaya bina damai dan melawan radikalisme diperlukan langkah-langkah advokasi, baik terkait dengan literasi media maupun etika berinternet (netiquette), utamanya pada generasi milenial.



RINGKASAN EKSEKUTIF

PENGUATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN  
KESISWAAN (OSIS) DALAM  
MEMPERKUAT KEBINEKAAN DAN  
KEHIDUPAN INKLUSIF DI SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN MADRASAH ALIYAH

MAARIF INSTITUTE



## LATAR BELAKANG

Sejak bergulirnya iklim kebebasan dan demokrasi pasca-Reformasi dalam dua dasawarsa terakhir ini, penyebaran pemikiran keagamaan eksklusif dan radikal mulai gencar memasuki lembaga pendidikan formal. Sekolah swasta, utamanya yang bernaung di bawah lembaga keagamaan semisal NU dan Muhammadiyah, dan sekolah negeri menjadi sasaran infiltrasi kelompok radikal karena lemahnya pemahaman kebangsaan.

Keterbatasan pengetahuan keagamaan yang didapatkan siswa di sekolah, ditambah hasrat ingin tahu yang besar, dimanfaatkan sebagai peluang oleh jaringan radikalisme untuk menginfiltrasi siswa dengan pengetahuan agama yang radikal dan bernuansa kekerasan. Melalui aktivitas OSIS, para aktivis dan mentor keagamaan yang berafiliasi pada organisasi radikal menyemaikan pemikiran agama yang bercorak intoleran, eksklusif dan anti-kebangsaan.

Kenyataan ini semakin memprihatinkan karena guru, utamanya para guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, belum menunjukkan kemampuan yang cukup dalam mengambil peran untuk memantapkan ideologi kebangsaan serta menyebarkan paham keagamaan yang inklusif dan toleran. Situasi ini diperburuk oleh kenyataan bahwa minimnya pengetahuan para pengajar dan pimpinan sekolah tentang peta gerakan kelompok intoleran dan radikal, menyebabkan pandangan dan sikap membiarkan dari pimpinan sekolah terhadap berbagai aktivitas jaringan gerakan radikal melalui kegiatan di sekolah.

Semua proses ini pada gilirannya menjadi faktor signifikan bagi melemahnya mekanisme ketahanan sekolah melawan penyebaran ideologi radikal. Lantas, apakah terdapat kontestasi di sekolah dalam mengelola OSIS antara kelompok radikal dan kelompok moderat? Bagaimana pula sekolah menerjemahkan dan mengimplementasikan regulasi dari pemerintah pusat yang kerap kali dipengaruhi regulasi dari pemerintah daerah terkait pengelolaan OSIS? Terkait dengan kemungkinan kelompok radikal melakukan penetrasi ke sekolah, apakah sekolah memiliki kebijakan khusus untuk menangkal dan mengantisipasinya? Bagaimana pula internalisasi nilai kebinekaan di tubuh OSIS yang akan memengaruhi program kerjanya? Dan adakah praktik-praktik baik pengelolaan OSIS di sekolah yang memungkinkan direplikasi di sekolah atau daerah lain?

Arti penting kajian ini terletak pada upaya menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah, sistematis, dan implementatif untuk menangkal ideologi kekerasan di sekolah. Secara khusus, dalam rangka merevitalisasi kebijakan terkait OSIS dan memperkuat peran sekolah dalam mendeteksi secara dini berkembangnya jaringan dan organisasi radikal melalui kegiatan keagamaan. Karena jika tidak diambil langkah kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengarahkan kegiatan siswa di sekolah melalui OSIS, bukan tidak mungkin kegiatan pendidikan dan kebudayaan di sekolah akan turut memperlambat visi dan nilai-nilai kebangsaan yang majemuk

di kalangan siswa, akibat dari kekeliruan memahami tugas, mandat dan fungsi OSIS. Padahal harusnya keberadaan OSIS mampu mendorong pembangunan karakter siswa yang berorientasi pada persatuan, kemajuan, dan merayakan kemajemukan. Dengan cara demikian, diharapkan rekomendasi kajian ini dapat mendorong munculnya inisiatif dan strategi dari pemangku kebijakan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan yang toleran dan inklusif bagi siswa.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam proses pengumpulan data, dengan cara melakukan wawancara mendalam semi terstruktur. Penelitian berlangsung di enam kota di Indonesia, yakni Kota Padang (Sumatera Barat), Kab. Cirebon (Jawa Barat), Kab. Sukabumi (Jawa Barat), Kota Surakarta (Jawa Tengah), Kota Denpasar (Bali), dan Kota Tomohon (Sulawesi Utara). Kabupaten/Kota ini dipilih dengan mempertimbangkan sebaran, tipologi, dan karakteristik yang melekat dengannya.

Dengan pertimbangan tersebut, dipilih 40 sekolah sebagai sampel penelitian (*purposive sampling*). Sekolah yang dijadikan sampel hanya SMA/MA dengan mengacu kepada temuan-temuan sebelumnya di mana kecenderungan intoleransi dan radikalisme banyak ditemukan di SMA, serta ingin melakukan pemetaan serupa di MA. Pemilihan sekolah didasarkan kepada kategori perkotaan-pedesaan, unggulan-non unggulan, dan homogen-heterogen.

Pada 2-21 Oktober 2017, terdapat 440 orang informan sebagai narasumber yang diwawancarai. Mereka terdiri dari Kepala Sekolah, Wakasek Kesiswaan, Pembina OSIS, Siswa Pengurus dan Bukan Pengurus OSIS, Komite Sekolah serta Pengawas Sekolah untuk SMA dan MA. Diwawancarai pula orang-orang yang dapat memberikan informasi tambahan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya (*snowballing process*).

## **TEMUAN UTAMA**

Dalam penelitian yang bertajuk "Penguatan Kebijakan Pembinaan Kesiswaan (OSIS) dalam Memperkuat Kebinekaan dan Kehidupan Inklusif di Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah" ini terdapat empat kata kunci yang perlu didefinisikan, yakni kebijakan, kebinekaan, inklusif, dan radikalisme.

Terkait dengan konsep yang dimaksud, maka kebijakan adalah regulasi-regulasi yang memengaruhi cara pandang dan pengelolaan kegiatan OSIS. Hal ini dapat diindikasikan dengan (1) Regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti Permendiknas No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan, dan Instruksi Walikota Padang No. 451.442/Binsos-iii/2005 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja, Didikan Subuh dan Anti Togel/Narkoba serta Pakaian Muslim/Muslimah bagi siswa/i SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA; (2) Aturan-aturan hasil rapat warga sekolah seperti yang tertuang dalam Tata Tertib Sekolah; (3) Kesepakatan Bersama terkait hal insidental yang biasanya tidak terpikir dan tidak tertuang sebelumnya; dan (4) Kebiasaan yang

Mengikat melalui hegemoni kultur.

Sementara kebinekaan yang dimaksud adalah sebuah kondisi yang utuh dengan agama, adat istiadat, warisan sejarah yang plural yang diharapkan akan bertahan lama, dengan syarat harus dihormati dan tidak pernah dikhianati oleh siapa pun. Hal ini terindikasi dari: (1) Rekognisi sebagai aspek tenggang rasa, di antaranya meliputi akses terhadap fasilitas tempat ibadah, praktik yang membatasi kelompok tertentu, dan pemaksaan sebuah nilai berdasarkan keyakinan tertentu; (2) Representasi sebagai aspek politik, di antaranya meliputi keterwakilan di OSIS dan hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan OSIS; dan (3) Redistribusi sebagai aspek sosial-ekonomi, di antaranya meliputi akses mendapatkan dana sekolah dan akses mendapatkan beasiswa.

Sedangkan inklusif yang dimaksud adalah sifat akomodatif terhadap hal lain yang memungkinkan terbukanya pandangan dan sikap terhadap hal lain yang berbeda, dengan cara (1) memandang secara positif terhadap perbedaan dan (2) membangun kerjasama dengan orang atau kelompok yang berbeda demi mencapai tujuan bersama.

Adapun radikalisme yang dimaksud, mengacu kepada Martin F. Marty, sering disamakan dengan fundamentalisme, yakni suatu fenomena sosial (politik, ekonomi dan keagamaan) yang bersinggungan dengan masalah ideologi atau tindakan yang berseberangan dengan apa yang terlihat hendak diubah. Hal ini diindikasikan dengan (1) menolak sistem yang sedang berlangsung, sehingga merasa perlu adanya perubahan secara mendasar; (2) tidak bersedia melakukan interpretasi atas teks keagamaan; (3) bersifat oposisi atas mereka yang memiliki pemikiran dan sikap yang berbeda dengan pandangan yang dianut; dan (4) jika memungkinkan, maka perlu mengambil alih sistem ekonomi-politik dan paham keagamaan.

Konseptualisasi di sini hendak dijadikan pijakan untuk menjelaskan temuan penelitian. Adapun temuan-temuan utama yang didapat dari studi ini adalah sebagai berikut:

### **Kontestasi Radikalisme dan Moderatisme**

Infiltrasi radikalisme di sekolah masuk melalui tiga pintu, yakni alumni, guru, dan kebijakan sekolah. Alumni masuk melalui kegiatan ekstrakurikuler. Lima dari enam sekolah di Surakarta yang menjadi sampel penelitian, misalnya, dibina oleh alumni yang tergabung dalam Kriya Mandiri melalui aktivitas seperti liqa dan halaqah. Corak tarbiyah yang melekat pada lembaga inilah yang mendominasi paradigma aktivis Rohis di Surakarta. Pola pembinaan serupa juga dijumpai di Padang dan Sukabumi.

Guru melakukan indoktrinasi di dalam dan di luar kelas. Seorang Guru Bahasa Inggris di SMAN 1 Jamblang Cirebon memahami bahwa negara ini adalah thagut, kemudian menyampaikannya kepada para siswa di dalam kelas. Dengan pemahaman seperti itu, guru tersebut menolak membayar iuran PGRI. Bahkan yang bersangkutan pernah mengirimkan siswanya yang non-Muslim untuk mengikuti pendidikan di Pesantren Ar-Royyan karena tidak lulus mata pelajaran yang dia ampu.

Kepala sekolah, karena ketidaktahuannya, seringkali mengambil serta mengeluarkan kebijakan dengan membuka lebar pintu bagi kelompok intoleran dan radikal untuk membina siswanya dalam penguatan keagamaan. SMAN 5 Surakarta, misalnya, menggandeng Pesantren Darus Syahadah, Simo, Boyolali, yang seringkali disebut sebagai Al-Mukmin yang asli karena masih memegang teguh prinsip dan ajaran Abdullah Sungkar, untuk melakukan pembinaan kesiswaan.

Arus radikalisme yang terjadi di sekolah mendapatkan respons dari kelompok keagamaan moderat. Salah satunya terjadi di SMAN 1 Plumbon Cirebon. Pembina Rohis di sekolah tersebut didatangi oleh seorang Muslimah dengan membawa setumpuk kurikulum tentang kajian keislaman yang berisi tentang Khilafah, Negara Islam dan cara bergaul dalam Islam, melakukan advokasi dengan menggunakan jejaring lembaga di luar sekolah. Untuk memutus embrio intoleransi yang bisa berujung pada radikalisme, Pembina Rohis itu menginisiasi pembentukan Pengurus Komisariat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) hingga melibatkan Fahmina Institute dengan tujuan memberikan intervensi kepada Rohis untuk memberikan nilai-nilai keterbukaan agar lebih inklusif. Namun dukungan seperti itu banyak berubah seiring dengan pergantian kepala sekolah. Inisiatif yang dilakukan untuk menghadirkan organisasi kepemudaan di sekolah tersebut kini tidak terdengar lagi gemanya, karena kepala sekolah tidak memahami peta gerakan radikal, dan di saat yang sama juga terjadi pergantian Pembina Rohis.

### **Kuasa Negara yang Terlupakan**

Di tingkat paling atas terdapat sejumlah regulasi yang memayungi kegiatan OSIS seperti Peraturan Menteri tentang Kegiatan Pembinaan Kesiswaan. Regulasi ini menjadi payung hukum untuk mendorong OSIS berperan dalam pembangunan karakter siswa yang berorientasi pada persatuan dan merayakan kemajemukan. Di sisi lain, karena tata kelola dan pelaksanaan pendidikan sekolah masuk dalam tanggung jawab Pemerintah Daerah, sejumlah kebijakan juga dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur kegiatan terkait OSIS. Tidak jarang peraturan itu bertolak belakang bahkan menghambat penerapan dan operasi kegiatan OSIS yang telah digariskan di tingkat pusat.

Tumpang tindih dan kurang jelasnya peraturan untuk memayungi kegiatan OSIS inilah yang mendorong sekolah mereduksi kegiatan OSIS menjadi sebatas pada penguatan aspek keagamaan semata. Akibatnya banyak kegiatan ekstrakurikuler difokuskan semata-mata pada kegiatan keagamaan. Program Pendidikan Karakter yang dicanangkan negara sejak 2011, seringkali diterjemahkan sebatas pada praktik ritual dan pandangan satu agama tertentu secara monolitik. Hal inilah yang turut memperlemah visi dan nilai-nilai kebangsaan yang majemuk di kalangan siswa.

Penerjemahan kebijakan tersebut dipandang sangat diskriminatif atau tidak relevan bagi kelompok minoritas. Bahkan tidak sesuai bila diterapkan di sebuah sekolah menengah atas negeri yang sepatutnya bisa lebih terbuka pada realitas perbedaan. Penggunaan jilbab bagi seluruh siswi di Kota Padang, mis-

alnya. Meskipun awalnya tidak wajib bagi non-muslim, akan tetapi pada praktiknya terjadi pemaksaan secara tidak langsung. Mereka terpaksa menggunakan jilbab karena merasa ada beban psikologis jika tidak menggunakannya, dan akan mudah diidentifikasi sebagai kelompok yang berbeda ditengah mayoritas Muslim.

### **Daya Tahan yang Rentan**

Kurangnya pemahaman dan kesadaran sekolah tentang peta gerakan radikalisme telah melemahkan mekanisme ketahanan warga sekolah dalam menghadapinya. Sejauh ini tidak ditemukan kebijakan khusus dari sekolah untuk memproteksi diri dari penetrasi paham dan gerakan radikal. Namun beberapa sekolah sudah menjalankan mekanisme ketahanan melalui (a) Sistem Filter dan Kontrol Narasumber. Mekanisme ini dapat dijumpai di SMAN 6 Surakarta dan beberapa SMAN di Cirebon dengan melakukan screening terhadap mentor atau narasumber dari luar sekolah. OSIS melacak rekam jejak dan kapasitas keilmuan narasumber, kemudian diteruskan kepada Guru Pembina hingga Kepala Sekolah, dan (b) Sistem Deteksi Dini. Meskipun hanya inisiatif pribadi, seorang Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 1 Plumbon Cirebon berupaya menyusun sistem deteksi dini dengan cara menyusun daftar perilaku-perilaku siswa yang terindikasi paham dan gerakan radikal, seperti tidak mau hormat pada bendera Merah Putih dengan dalih thagut.

### **Internalisasi Nilai Kebinekaan**

Pandangan mengenai OSIS sebagai katalisator sekolah dengan kegiatan kesiswaan mengakibatkan Pembina OSIS mendominasi usulan program. Sayangnya, transmisi dan penerjemahan nilai kebinekaan seringkali dibatasi oleh sekat-sekat primordialisme atas nama keagamaan, yang didukung oleh pihak sekolah. Pandangan mengenai liyan atau orang lain yang berbeda agama maupun paham, seringkali membuat OSIS hanya mengakomodir pengurus dari agama, golongan, kelompok, hingga jenis kelamin tertentu yang didukung oleh guru. Salah dua contohnya bisa ditemui di SMAN 3 Denpasar yang enggan melibatkan siswa non-Hindu sebagai pengurus OSIS dengan dalih tugas utama OSIS adalah membantu sekolah dalam menyiapkan ritual upacara keagamaan, dan MAN 1 Padang yang menyatakan bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin.

### **Mencari Model Ketahanan di Sekolah**

Model ketahanan ini sifatnya kasuistik. Efektif di satu sekolah atau daerah, belum tentu efektif di sekolah atau daerah lain. Berikut model ketahanan sekolah yang ditemukan dari penelitian ini:

1. Screening terhadap mentor seperti dijelaskan pada temuan "Daya Tahan yang Rentan".
2. Mendorong siswa untuk belajar dari guru, tidak dari internet, seperti yang digalakkan di SMAN 6 Surakarta.

3. Merekatkan hubungan guru, orang tua, dan siswa, dengan cara mewajibkan siswa kelas X untuk berangkat ke sekolah (SMAN 3 Surakarta) dengan diantar orang tua dalam waktu setahun, agar orang tua turut memperhatikan pendidikan anaknya.
4. Mendirikan Pesantren Sekolah sebagai rujukan pandangan keagamaan yang moderat ditempuh oleh MAN 3 Sukabumi (Surade) untuk memutus ketergantungan siswa dalam mencari informasi keagamaan dari pihak luar.
5. Mendirikan Organisasi Kepemudaan (IPNU dan IPPNU) dan bekerjasama dengan kelompok moderat (Fahmina Institute) menjadi upaya yang ditempuh oleh SMAN 1 Plumbon Cirebon dalam rangka menghalau radikalisme sebagaimana dijelaskan pada temuan "Kontestasi Radikalisme dan Moderatisme".
6. Kunjungan atau Anjongsana ke Kelompok Agama yang Berbeda, dengan cara mengunjungi sejumlah tempat ibadah agama selain Islam dipandang sebagai satu-satunya cara yang paling realistis dalam memperkenalkan kebinekaan oleh Guru Sosiologi yang juga merupakan Pembina Paskibraka di SMAN 1 Jamblang Cirebon.
7. Kunjungan ke Lokasi Bersejarah, Waruga dan Makam Pejuang Muslim Tondano, sebagai upaya memperkenalkan kearifan lokal bahwa "kita semua bersaudara" digagas oleh Guru Sejarah di SMA Kristen 1 Tomohon.
8. karnaval Kebinekaan dengan cara mengenakan pakaian pahlawan nasional tertentu yang berasal dari agama, suku, budaya dan daerah yang berbeda menjadi salah satu kreasi OSIS di SMAN 1 Kab. Cirebon.
9. Partisipasi Aktif Kementerian Agama Cirebon melalui kerjasama dengan sejumlah pesantren dalam rangka penguatan kapasitas tentang wawasan kebangsaan dan kebinekaan kepada guru dan siswa.
10. Alokasi Dana Pendidikan untuk kesejahteraan guru dan kepala sekolah menjadi langkah yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Tomohon agar dapat maksimal menumbuhkan budaya toleran dan harmoni di sekolah.
11. Respons terhadap Isu-isu Aktual dengan cara menggelar seminar juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Tomohon. Salah satu isu aktual yang sempat dibahas terkait seminar Islamologi dengan menekankan ajaran Islam yang Rahmatan lil 'Alamin sebagai respons terhadap Aksi Bela Islam di Jakarta pada penghujung 2016 lalu.

## REKOMENDASI

Temuan-temuan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Kemendikbud dan Kemenag perlu membuat regulasi yang dapat mengomodasi keterlibatan kelompok masyarakat sipil moderat yang terbukti mampu melakukan pembinaan dan pendampingan dalam memperkuat toleransi, inklusivitas, dan kebinekaan. Sementara Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag dan Sekolah perlu selektif dalam mengundang maupun menerima kelompok yang hendak melakukan pembinaan kesiswaan di sekolah, seperti yang terjadi di Kab. Cirebon.
2. Kemendikbud dan Kemenag serta pemangku kebijakan di tingkat lokal (Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag) perlu merumuskan ulang dan mendiseminasikan berbagai regulasi terkait OSIS dalam bahasa yang mudah dipahami. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah.
4. Kemendikbud dan Kemenag serta pemangku kebijakan di tingkat lokal (Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenag dan Sekolah) harus merumuskan Standar Operational Procedure (SOP) terkait Sistem Deteksi Dini, Mekanisme Pengaduan dan Mekanisme Penanganan terkait radikalisme di sekolah serta standardisasi mentor dalam kegiatan OSIS.
5. Perlu dilakukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan siswa untuk melakukan pertemuan dan pergaulan lintas suku, agama, ras dan budaya dalam bentuk kegiatan OSIS, seperti dialog antarsekolah yang beragam dari sisi agama, suku, dan budaya.

Sekolah harus memperkuat kebinekaan dan ideologi kebangsaan melalui model ketahanan sekolah yang beberapa di antaranya ditemukan dalam penelitian ini, seperti Anjangsana ke kelompok agama, suku maupun etnis yang berbeda.

RINGKASAN EKSEKUTIF

# EKONOMI KAUM MUDA DAN PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA

PUSAT STUDI TIMUR TENGAH DAN PERDAMAIAN GLOBAL  
(PSTPG) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JAKARTA



PUSAT STUDI TIMUR TENGAH  
DAN PERDAMAIAN GLOBAL

## PENDAHULUAN

Kaum muda mengalami tantangan kuat bagaimana membendung pengaruh radikalisme dan terorisme. Penetrasi pemahaman kekerasan dan teror masuk lewat media sosial dan media online. Ketersediaan artikel, khutbah Jumat, dan materi pelajaran di media yang didominasi pemahaman radikal jihadis membuat kaum muda, khususnya siswa dan mahasiswa, lebih radikal dalam pemahaman keagamaan. Dalam Survey Nasional PPIM UIN Jakarta terhadap siswa dan mahasiswa di sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia ditemukan 23.35% siswa dan mahasiswa menyatakan “aksi terror melalui bom bunuh diri diakui dalam Islam,” dan 37,71% mengakui “Jihad (qital) adalah nilai dalam Islam yang ditujukan kepada non-Muslim.”<sup>1</sup> Mayoritas mereka (52.29%) menilai kondisi ekonomi dan kesenjangan kaya miskin sangat parah dan 43.46% menilai kondisi perekonomian negara sedang terpuruk. Opini dan pemikiran radikal di kalangan siswa dan mahasiswa menjadi bahan dan target potensial bagi kelompok radikal dan teroris untuk merekrut mereka bergabung ke dalam gerakan-gerakan pro-kekerasan.

Dalam UU no. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dikatakan bahwa pemuda adalah “warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun” (BPS 2015). Jumlah pemuda Indonesia sekitar 65 juta orang atau sekitar 25% dari total penduduk Indonesia. UN ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) menyatakan bahwa pemuda yang berumur 15-24 di Asia Pasifik berjumlah lebih dari 750 juta atau sekitar 60 persen dari total pemuda dunia.<sup>2</sup> Mereka menentukan masa depan Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik.

Penelitian ini mengkaji pengalaman kaum muda mantan teroris dan kombatan yang melakukan transformasi sebagai pemimpin-pemimpin komunitas dan memengaruhi ratusan pemuda dan mantan teroris lainnya untuk meninggalkan jalan kekerasan. Dukungan BNPT, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kelompok pengusaha di tingkat daerah kabupaten, kota, dan provinsi telah mendorong kepercayaan diri mereka dalam melakukan perubahan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji pentingnya pengamanan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, Malaysia dan Filipina.

---

<sup>1</sup> PPIM, “Api Dalam Sekam Keberagaman Gen Z: Survei Nasional Tentang Keberagaman Di Sekolah Dan Universitas di Indonesia” (Ciputat: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, 2017).

<sup>2</sup> United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “Youth in Asia-Pacific | United Nations ESCAP,” accessed March 12, 2018, <http://www.unescap.org/resources/youth-asia-pacific>.

## **METODE**

Studi ini merupakan hasil wawancara lebih dari seratus responden, FGD, dan observasi ke Nunukan (Kalimantan Utara), Poso (Sulawesi Tengah), Solo (Jawa Tengah), Lamongan (Jawa Timur), dan Medan (Sumatra Utara) dari 1 Agustus 2017 hingga 29 Januari 2018. Di antara responden yang diwawancarai adalah siswa, mahasiswa, aktivis organisasi pemuda dan kemahasiswaan, ormas, LSM, pengusaha, dinas-dinas pemerintah daerah, kementerian dan lembaga di pemerintah pusat terkait dengan "Asesmen Program Ekonomi bagi Kaum Muda dan Upaya Penanggulangan Terorisme."

Studi ini bertujuan untuk memahami dan evaluasi kebijakan pemerintah melalui BNPT dan kementerian terkait dalam melakukan pemberdayaan ekonomi sebagai pendekatan dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan terorisme. Argumen dari studi ini adalah bahwa pendekatan ekonomi efektif dalam mencegah terorisme bagi kaum muda. Catatan utama dari studi ini adalah pentingnya melakukan pemberdayaan ekonomi secara sistematis dan berkesinambungan melalui kerjasama dan keterlibatan seluruh stakeholder.

## **KAUM MUDA DAN KONTRATERORISME**

Kaum muda, khususnya mantan napiter dan mantan kombatan, memiliki tekad dan komitmen untuk berubah dan meninggalkan pengalaman kekerasan dalam terorisme dan konflik melalui program ekonomi. Pemerintah, khususnya Polisi (Densus 88) dan BNPT, telah melakukan inisiatif awal dalam mengatasi terorisme melalui pendekatan ekonomi. Sebagai inisiatif, polanya jangka pendek dan dananya terbatas. Bantuan modal usaha malah berakhir menjadi konsumsi.

Kehadiran kementerian, dinas-dinas, dan pengusaha lokal dalam membantu pemberdayaan ekonomi kaum muda memiliki arti yang signifikan, terutama terkait keterjaminan bantuan dan dukungan usaha secara jangka panjang dan berkelanjutan. Kaum muda ini termasuk mereka yang pernah terlibat dalam aksi terorisme, konflik, dan kriminal lainnya.

## **KAUM MUDA DAN KEAMANAN PERBATASAN**

Kaum muda mendapat tantangan lambatnya ekonomi dan keamanan di daerah perbatasan. Ketergantungan komoditi dari negeri jiran Malaysia juga terus menghantui, dikhawatirkan membelah rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Karena itu, dibandingkan daerah lain, kaum muda Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik lebih sering mendapatkan pelatihan bela negara.

Mereka juga mendapat tekanan kelompok bisnis narkoba lintas negara melalui jalur perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang sangat luas. Tujuh puluh persen pemuda yang dipenjara di Kabupaten Nunukan akibat kasus perdagangan narkoba. Mereka juga memilih bekerja di perkebunan sawit di Sabah, Malaysia, meskipun dengan cara ilegal.

Kaum muda juga menjadi penunjuk jalan gerakan terorisme transnasional dari JI hingga ISIS. Dalam FGD lintas stakeholder di kantor Kesbang-pol Kab. Nunukan dinyatakan: “dua dari sepuluh WNI berasal dari Nunukan yang terlibat dalam aksi terorisme di Marawi, Filipina Selatan.” Mereka masuk melalui jalur resmi pelabuhan.

## **KAUM MUDA, EKONOMI DAN PERDAMAIAN**

Pemberdayaan ekonomi di Poso, Sulawesi Tengah, memiliki fungsi dan peran berbeda. Sebagai daerah pascakonflik, kaum muda dihadapkan pada kompleksitas trauma konflik, lambatnya investasi dan pembangunan, dan segregasi sosial yang belum pulih.

Upaya aktivis LSM dan pemerintah pusat dan daerah terus dilakukan melalui beragam pelatihan dan pemberian modal secara terbatas. Kaum muda mantan kombatan Poso mulai membangun kegiatan ekonomi secara mandiri tanpa tergantung pada bantuan pemerintah.

Mereka secara berkelompok membangun komunitas untuk mengembangkan perkebunan dan pertanian, berwirausaha, dan kegiatan ekonomi lain. Kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam program ekonomi mereka akan membuat mereka terus kuat dan berkelanjutan dalam melakukan wirausaha dan membangun kemandirian. Diharapkan kegiatan ekonomi melibatkan komunitas muda lintas etnis dan agama untuk menciptakan pengembangan perdamaian lebih permanen di Poso.

## **MULTI-STAKEHOLDER**

Pemda dan dinas-dinas di Solo dan Lamongan juga lebih aktif dalam pendekatan dan pemberdayaan ekonomi terhadap kaum muda dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme dan radikalisme.

Program ekonomi bagi kaum muda di Medan, Sumatra Utara, tidak terfokus pada upaya mengatasi terorisme dan radikalisme. Sebagai daerah metropolitan, kaum muda lintas etnis, daerah, dan agama telah terbiasa dalam kegiatan ekonomi. Keberadaan Pesantren Al-Hidayah sebagai pusat rehabilitasi dan deradikalisasi anak-anak mantan teroris dan potensial terpapar gerakan teroris yang dikembangkan atas inisiatif Densus 88 dan BNPT tidak mendapatkan dukungan cukup dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lokal.

## **TANTANGAN**

Kendala terbesar yang dirasakan dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda adalah masih kuatnya ego sektoral antarkementerian, lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, serta dinas-dinas. Mengatasi terorisme dan radikalisme di kalangan kaum muda membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme (RAN-PE) BNPT 2018 yang

melibatkan sekitar 32 kementerian dan lembaga pemerintah menjadi titik tolak menurunkan ego sektoral dan mulai memikirkan kepentingan bangsa dan masyarakat.

Masyarakat Muslim Indonesia juga masih terbelah dalam memahami bahaya dan ancaman radikalisme dan terorisme bagi kaum muda. Bahkan Ketua Pemuda Muhammadiyah Medan masih menganggap "peristiwa terror di Medan sebagai pengalihan isu politik di Jakarta." Argumen ala Orde Baru bahwa aksi terror yang dilakukan oleh kaum muda di Medan, Lamongan, Solo, Poso, dan Jakarta sebagai konspirasi tentu menciptakan ketidakkompakan masyarakat dalam mengatasi tantangan radikalisme dan terorisme di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pemberdayaan ekonomi efektif dalam pencegahan terorisme. Komunitas kaum muda termasuk mantan napiter melakukan penguatan ekonomi di Lamongan, Solo dan Medan. Mereka berhasil membendung pengaruh kelompok teroris yang mencoba mempengaruhi anggota komunitas karena dukungan pendampingan dan aktivitas ekonomi baik dari pemerintah (BNPT dan Kementerian) maupun masyarakat.

Program ekonomi bagi kaum muda dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme tidak bisa dilakukan BNPT sendiri, perlu sinergi dan kerjasama seluruh stakeholder antarkementerian dan lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta dunia usaha dan masyarakat.

Studi ini direkomendasikan kepada BNPT, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM dalam penguatan ekonomi kaum muda untuk membendung radikalisme, terorisme dan aksi kriminal yang rentan dialami kelompok anak muda. Dunia pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristek-Dikti, dan Kemenag juga perlu memberi perhatian lebih terhadap ekonomi kaum muda. Pendidikan dan pelatihan yang lebih terarah memperkuat mereka dalam persaingan kerja secara regional dalam rangka Komunitas Ekonomi ASEAN.



RINGKASAN EKSEKUTIF

**ASSESMEN PROGRAM  
PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI  
KEMASYARAKATAN DI DAERAH  
PERBATASAN YANG TERKENA DAMPAK  
RADIKALISME**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LP2M) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO



**Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Pada Masyarakat (LP2M)**

## LATAR BELAKANG

Ada sejumlah peraturan yang menegaskan pentingnya pembangunan daerah perbatasan. Salah satunya Peraturan Presiden no. 44 tahun 2017. Perpres ini mencabut kewenangan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan), sebuah badan yang sebelumnya disertai tugas mengelola daerah perbatasan, dan selanjutnya pengelolaan tersebut diserahkan kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan ini, program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan bersifat lintas sektoral.

Daerah perbatasan memiliki persoalan sosial dan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Bisnis terlarang, perdagangan manusia, komunitas yang terisolasi, penegakan hukum yang sangat lemah, tingkat pendidikan yang rendah, dan kesehatan yang buruk merupakan isu sosial dan ekonomi di daerah perbatasan.

Pemerintahan pusat bertekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran, daerah dan desa dalam rangka memperkuat NKRI. Namun demikian, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama. Sejauh ini program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat di daerah perbatasan sangat terbatas. Program terbatas tersebut juga bersifat sentralistik, politikal dan tidak dikaitkan dengan kegiatan pencegahan radikalisme.

## METODOLOGI

Laporan ini didasarkan pada asesmen program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan di daerah perbatasan yang berkaitan dengan pencegahan radikalisme, meliputi penelitian lapangan, FGD, Seminar Hasil Penelitian, Serial Engagement Meeting I dan II serta diseminasi policy brief di 3 daerah perbatasan: (1) kepulauan sangihe, sulawesi utara; (2) nunukan, kalimantan utara; dan (3) batam, kepulauan riau.

## HASIL ASSESMEN

Program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan di daerah perbatasan meliputi; 1) pemberian alat-alat yang digunakan untuk kegiatan perikanan, kelautan, pertanian dan industri, 2) pelatihan produksi, pengolahan, kemasan, kendali mutu dan pemasaran hasil produksi, 3) pemberian perizinan usaha dan kegiatan ekonomi, 4) pembangunan gedung pusat usaha, 5) pelatihan peningkatan kesadaran wirausaha masyarakat dan 6) sadar wisata 7) pemberian keringanan bahan pokok sembako melalui pasar murah 8) penyediaan transportasi gratis angkut barang dagangan khusus sembako, 9) penyediaan pendampingan/penyuluh, 10) pemberian bendera merah putih kepada nelayan di daerah perbatasan.

Hasil assessmen LP2M IAIN Manado menunjukkan bahwa setiap program mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelemahan-kelemahan program meliputi; informasi program yang tidak luas di masyarakat, kurangnya pemilihan peserta dari berbagai suku, agama dan ras, tidak adanya seleksi peserta yang baik,

kurangnya koordinasi pelaksana program dengan lembaga lain yang terkait, implementasi program yang berubah dan tidak berkelanjutan, peningkatan kegiatan ekonomi setelah program yang belum tercapai, program belum menyelesaikan persoalan utama masyarakat banyak.

Namun demikian, LP2M menilai program pelatihan pengolahan dan pembudidayaan rumput laut di Nunukan sebagai salah satu program pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat terbaik di daerah perbatasan. Program ini terbaik karena (pertama) memberikan kesempatan kepada masyarakat banyak untuk (kedua) memanfaatkan wilayah laut sebagai sumber ekonomi usaha rumput laut yang (ketiga) pemasarannya sudah baik sehingga usaha rumput telah (keempat) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nunukan.

Hasil assessmen LP2M IAIN Manado juga menunjukkan program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan belum dikaitkan dengan kegiatan pencegahan radikalisme di daerah perbatasan. Sementara itu, kegiatan pencegahan radikalisme di daerah perbatasan sangat fokus pada penangkapan dan pencegahan keberangkatan pelaku-pelaku radikalisme ke luar dan ke dalam negeri. Kegiatan lain adalah peningkatan system keamanan lingkungan melalui pemutakhiran data pekerja, pengunjung, DPO, dan peningkatan kewaspadaan masyarakat melalui penyadaran dan kewaspadaan kepada ancaman radikalisme melalui media massa dan pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam mengeliminasi niat radikalisme yang muncul dari pemahanan jihad dan teori konspirasi terhadap umat Islam.

Kurangnya program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan di daerah perbatasan yang dikaitkan dengan kegiatan counter radikalisme dipengaruhi oleh sedikitnya warga perbatasan yang terlibat langsung dengan kegiatan radikalisme dan mereka sering hanya sebagai pendamping pelaku radikalisme dari daerah lain. Padahal program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan yang dikaitkan dengan pencegahan radikalisme di Indonesia diberikan kepada mereka para napiter dan combatan teroris.

Daerah perbatasan lebih banyak digunakan sebagai jalur lalu lintas pergerakan radikalisme bukan sebagai tempat perekrutan anggota. Jalur lalu lintas gerakan radikalisme ini juga merupakan jalur perdagangan yang sudah lama ada antar masyarakat daerah perbatasan dengan negara tetangga. Masyarakat yang berada di jalur lalu lintas perdagangan antar negara ini sangat penting dilibatkan dalam gerakan counter radikalisme. Pelibatan masyarakat dalam pencegahan radikalisme bisa dilakukan dengan mengkoordinasikan program-program pemberdayaan sosial ekonomi kemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah dengan lembaga yang memimpin gerakan pencegahan radikalisme, seperti BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terrorisme) dan kepolisian.

Pemberian program-program pemberdayaan sosial ekonomi kepada masyarakat di jalur lalu lintas gerakan radikalisme akan meningkatkan kesadaran mereka akan peran dan fungsi negara bagi masyarakat tersebut. Hubungan saling menguntungkan antara negara dan masyarakat di daerah lalu lintas gerakan radikalisme ini akan meningkatkan bukan hanya kepercayaan masyarakat terhadap

negara tetapi juga dalam mencapai keadilan ekonomi di daerah perbatasan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan radikalisme. Disamping itu, pemberian penghargaan berupa uang tunai dalam jumlah tertentu, pemberian beasiswa pendidikan, bantuan bedah rumah dan atau pemberian status pegawai pemerintah kepada warga perbatasan yang membantu kegiatan pencegahan radikalisme secara langsung dapat dimulai untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan counter radikalisme.

RINGKASAN EKSEKUTIF

**KEGIATAN ASESMEN PROGRAM-  
PROGRAM DERADIKALISASI  
DI DALAM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN**

DAYA MAKARA UNIVERSITAS INDONESIA (UI)-  
DIVISSION OF APPLIED SOCIAL PYSCHOLOGY RESEARCH (DASPR)



## **LATAR BELAKANG**

Program deradikalisasi yang banyak dilakukan oleh institusi pemerintah maupun swasta belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sebaliknya, penyebaran paham radikal justru masih marak terjadi di kalangan masyarakat umum, tak terkecuali warga binaan lembaga pemasyarakatan. Menelaah situasi ini, sudah seharusnya semua pihak dapat bekerjasama merumuskan masalah untuk menemukan penyelesaian agar situasi ini tidak terus terjadi.

Division for Applied Social Psychology Research (DASPR) – Daya Makara UI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia telah melakukan asesmen terhadap sejumlah program deradikalisasi yang dilakukan lembaga-lembaga di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dan Focused Group Discussion (FGD) sebagai proses pengumpulan data. Kami mewawancarai orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam program deradikalisasi, baik itu lembaga pelaksananya, petugas Lapas, dan warga binaan yang pernah menjadi peserta program deradikalisasi. Melalui hasil wawancara dan FGD penelitian ini mendapatkan pandangan dan penilaian terkait dengan efektifitas dan keberhasilan program tersebut. Wawancara dan FGD dilakukan pada waktu dan tempat yang terpisah, selama kurang lebih 2 bulan, terhitung antara Oktober pertengahan dan akhir November 2017.

## **RESPONDEN ASESMEN**

Tiga kelompok sasaran dengan latar belakang berbeda menjadi responden asesmen penelitian asesmen ini:

1. Empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang pernah melakukan program deradikalisasi kepada narapidana dalam lapas, yaitu; Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Search for Common Ground (SFCG), UNI CRI, dan CDS.
2. Empat lembaga pemasyarakatan yang memiliki warga binaan kasus terorisme dan pernah bekerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan program deradikalisasi, yaitu: Lapas Cibinong, Lapas Pasir Putih, Lapas Cipinang, dan Lapas Kedungpane.
3. Warga binaan Pemasyarakatan yang pernah mengikuti program deradikalisasi dan tinggal di salah satu Lapas.

## TEMUAN

Temuan utama dari asesmen ini bisa disimpulkan sebagai berikut: tidak ada koordinasi yang jelas antar lembaga-lembaga program deradikalisasi di lembaga masyarakat, baik lembaga pemerintah, LSM maupun lembaga riset. Hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting mengingat koordinasi dalam hal perencanaan, pendanaan, serta pengimplementasian program sangat merang-kai sebuah cetak biru dalam penanganan narapidana teroris.

*"Nggak usah yang diskusi, yang assessment aja, profiling aja kan mereka udah paham, nomor 1 nomor 5 pasti nanya ini nih pak, pasti nanya ini, karena mereka udah berulang-ulang. Udah dikasih tau, jadi udah hapal duluan" (Staf Lapas Cipinang).*

Temuan lain yang ditemukan dalam asesmen ini adalah tidak ada kejelasan berupa penetapan pemerintah mengenai pihak yang paling memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk pelaksanaan program deradikalisasi di lembaga masyarakat. Ketika di lapangan, ada dualisme dalam pemegang wewenang antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Direktorat Jenderal Masyarakat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal ini berimplikasi pada jalur komunikasi penyelenggaraan program deradikalisasi dalam lembaga masyarakat yang dilakukan oleh pihak eksternal seperti LSM dan lembaga riset.

*"Iya kalau untuk prosedur kan memang seharusnya kan semua kan melewati Dirjenpas ya. Memang harus ada MoU dulu dengan Dirjenpas. Harus satu pintunya Dirjenpas. Tapi beberapa, ada sih kemarin--. Langsung sebut aja gak apa-apa. Dari PRIK ya. PRIK itu awal-awal pertama kali mereka kalau setiap datang ke sini pasti ada pendamping dari Dirjenpas" (Staf Lapas Semarang)*

Dalam bidang kapasitas dari petugas lembaga masyarakat, ditemukan tidak adanya keseragaman dalam hal petunjuk pelaksanaan serta kriteria individu para pamong untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing narapidana teroris. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan efektivitas pada program deradikalisasi di masing-masing lembaga masyarakat. Para pamong tidak dipilih berdasarkan kapasitas, melainkan penunjukan langsung dari kepala lembaga masyarakat. Lebih lanjut, pamong juga tidak memiliki jenjang karir struktural yang jelas. Padahal, di sisi lain, pamong justru memiliki resiko yang lebih besar seperti mendapatkan ancaman dari pihak narapidana dan jaringannya, atau memiliki resiko terpapar dengan ajaran-ajaran radikal.

*"Petugas yang disebut pamong itu belum masuk struktur, hanya ditunjuk aja sama Kalapas [kepala lapas] tanpa kriteria yang jelas. Struktur ga ada, insentif juga ga ada. Ga jelas deh, kasian sebenarnya." (Staf Ditjenpas)*

Mengenai teknis kegiatan program deradikalisasi, diperlukan adanya penelusuran demografi narapidana terorisme di masing-masing lembaga pemasyarakatan agar tepat sasaran. Efektivitas dan respons narapidana teroris terhadap program deradikalisasi berbeda-beda untuk setiap topik program deradikalisasi dibanding dengan topik lainnya. Selain itu, perpindahan narapidana teroris ke satu lembaga pemasyarakatan lain, dengan minimnya koordinasi antarlembaga penyedia program, membuat narapidana tersebut tidak dimonitor dalam jangka panjang.

*"Pembinaan itu sebetulnya baiknya itu diajak dialog. Diajak bersama perjuangan, bukan hanya masalah ekonomi lah. Kan ekonomi itu satu dua yang masih membutuhkan. Tapi kalo kita-kita yang bener itu ngga hanya masalah ekonomi. Saya itu walaupun hidup nggak pernah kaya, istilah hidup kekurangan, tapi saya nggak pernah mikir masalah ekonomi. Yang penting itu pembinaan nanti arahnya iso buat pondok, umat islam ini bisa baik gimana gitu. Lingkungan jadi islami gimana."*  
(Napiter Lapas Cibinong)

Tidak hanya itu, Dalam hal menentukan topik yang menarik agar program dapat diikuti oleh para narapidana teroris menjadi perhatian dan tantangan tersendiri. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa tema diskusi yang bersifat membenturkan ideologi cenderung membuat para narapidana teroris menolak berpartisipasi, atau berpartisipasi hanya untuk mendapatkan kemudahan remisi ataupun pembebasan bersyarat.

*"Pertama keberlanjutannya itu loh ini apa setelah kegiatan. Karena biasanya kan teman-teman ini ngadakan kegiatan sebulan sekali, dua bulan sekali sedangkan kita berinteraksi dengan pemikiran ini bukan sehari dua hari. Gitu kan. Ya kan kita juga bukan sehari dua hari sering kita sudah lama kita bergelut dengan ini. Ingin kita sebenarnya teman-teman juga ingin, apa, teman diskusi dengan beda pemikiran kan sehingga apa yang kami pikir apa yang kami pahami sekarang ini bisa mungkin bisa lebih terbuka bisa ada koreksi dari teman-teman lain atau kami memberikan masukan kepada pihak-pihak lain apa yang kami pahami gitu sehingga saling mengisi kan. Kalau teman-teman kami sih sebenarnya kami terbuka aja kalau untuk diskusi sih insyaallah kami terbuka aja. Tapi, bukan untuk memaksakan kehendak. Memaksakan pemahaman, kita kalau asas kita berdiskusi itu kan bukan saling, sudah membawa kebenaran dulu terus dipasang di sini. Harus ini yang kalian pahami, kan enggak, yang namanya diskusi ya memang yang kita diskusi itu kan di kalangan ulama-ulama kita memang termasuk apa ya bukan sesuatu yang sudah ushul, cuma masalah salah cabang aja sebenarnya."* (napiter lapas Cipinang)

*"Iya, jadi kalau mau diskusi ayo kita diskusi sering kita sampaikan kepada bapak-bapak BNPT yang mungkin punya lebih banyak fasilitas kan untuk menghadirkan acara seperti kalau diskusi ayo secara langsung, livelah, supaya yang lain juga tau kan, iya kan jangan tertutuplah. Sekarang yang namanya kebenaran apalagi yang menyangkut suatu agama Islam kan kami selama ini membawa nama agama Islam. Pengennya apa-apa yang kami lakukan pastinya kami usahakan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kami pahami. Kalau kami punya salah, oke hadirkan ulama-ulama lain dari organisasi lain gitu. Hadirkan berikan kami pencerangan tapi sekali lagi jangan saling memaksa gitu kan. Saling maksa gitu. Namanya diskusi kan." (napiter lapas Cipinang).*

Pendekatan yang dilakukan oleh salah satu partisipan program asesmen, yaitu Search for Common Ground, memberikan paradigma baru pada program Countering Violent Extremism (CVE) dalam lembaga pemasyarakatan yaitu: 1) program inklusif yang tidak hanya diperuntukkan kepada narapidana teroris namun juga narapidana kejahatan lainnya, serta 2) mengangkat topik pelatihan yang tidak bersifat konfrontatif terhadap ideologi yang dipercaya para narapidana teroris. Berdasarkan hasil temuan ini, tim peneliti memutuskan untuk mendukung kegiatan Conflict Management Training (CMT) dan Life Management Training (LMT) yang dilakukan oleh Search for Common Ground di beberapa lembaga pemasyarakatan di Indonesia, sebagai best practice untuk program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan.

*"Mungkin warga binaan juga yang tidak berani berinteraksi atau berbicara. Tapi, waktu ada acara dari Common Ground itu semua dibicarakan keinginannya setelah bebas atau keinginannya selama di dalam." (napiter lapas Cipinang)"*

*"Common Ground itu programnya CMT-LMT. Conflict Management Training ya. Manajemen training. Itu juga mendapatkan kesan yang positif juga ya dari napiter di sini. Mereka bisa mengeksplor bentuk program itu. Bahkan mereka malah pingin modulnya. Pingin berbagi modul kan, pingin diaplikasikan di luar." (Staf Lapas Semarang)*

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan kami merekomendasikan beberapa kebijakan kepada para pemangku kebijakan, khususnya BNPT dan Kemenkumham:

### 1. Pemangku Kepentingan Utama Program Deradikalisasi dalam Lembaga Pemasarakatan

Para pemangku kepentingan perlu membukukan payung hukum yang menegaskan pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab utama dalam penanganan narapidana terorisme di lembaga pemasarakatan. Hal ini penting karena diharapkan dapat mampu mencegah miskoordinasi dalam pelaksanaan program deradikalisasi. Payung hukum ini lebih lanjut juga mengatur jalur komunikasi antarlembaga pelaksana program serta garis besar silabus perencanaan pembinaan narapidana teroris. Direktorat Jenderal Pemasarakatan memegang peranan penting dalam isu ini, sehingga DASPR Daya Makara UI merekomendasikan Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai pemangku kepentingan utama bagi penanganan narapidana teroris serta program-program deradikalisasi yang dilaksanakan baik secara internal maupun melibatkan lembaga lain.

### 2. Peningkatan Kapasitas Staf Lembaga Pemasarakatan

Terdapat fakta bahwa terjadi ketimpangan dalam kapasitas para staf lembaga pemasarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap narapidana teroris, serta ada kekhawatiran dari para staf lembaga pemasarakatan atas keterpaparan terhadap ideologi-ideologi radikal. Hal ini membuat DASPR Daya Makara UI merekomendasikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dari elemen pemerintah untuk menyusun dan mengimplementasikan program-program peningkatan kapasitas petugas lembaga pemasarakatan dalam menjalankan tugasnya membina narapidana teroris. Peningkatan kapasitas ini bisa berupa peningkatan pemahaman terhadap ajaran radikal dan bagaimana cara melawannya, atau peningkatan pengetahuan maupun kemampuan dalam pembinaan narapidana teroris di luar aspek-aspek ideologis. Selain peningkatan kapasitas, para staf lembaga pemasarakatan yang menangani langsung narapidana teroris, yang biasa disebut pamong, diberikan status resmi dalam struktur kepegawaian lembaga pemasarakatan sekaligus insentif terkait tanggung jawab dan wewenang tersebut.

### 3. Teknis dan Konten Program Deradikalisasi

Format dan topik-topik yang digulirkan dalam program-program radikalisasi lembaga pemasarakatan sangat beragam. Efektifitasnya juga beragam. DASPR Daya Makara UI merekomendasikan untuk diperbanyak program-program yang bersifat:

Inklusif; melibatkan narapidana umum

Sesuai dengan keadaan demografi narapidana teroris di masing-masing lembaga pemasarakatan

Tidak berupaya mempertentangkan ideologi-ideologi Islam

Memiliki tujuan yang spesifik untuk pembinaan tingkah laku tertentu

Dari asesmen yang telah dilakukan, penting untuk dicatat bahwa pemerintah mendukung kegiatan Conflict Management Training – Life Management Training (CMT-LMT) yang telah dirintis oleh Search for Common Ground, sebagai program yang layak untuk diteruskan dan dipertahankan dalam program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan hasil asesmen tim DASPR Daya Makara UI.



RINGKASAN EKSEKUTIF

**ASESMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MANTAN NAPITER & KOMBATAN DI  
JABODETABEK,  
LAMONGAN DAN POSO**

ALIANSI INDONESIA DAMAI (AIDA) –  
INDONESIAN STRATEGIC POLICY INSTITUTE (ISPI)



## **PENGANTAR**

Kolaborasi yang dibangun antara Aliansi Indonesia Damai (AIDA) dan Indonesian Strategic Policy Institute (ISPI) telah melakukan asesmen atas program pemberdayaan ekonomi bagi para mantan narapidana teroris dan kombatan di Jabodetabek, Lamongan dan Poso. Didukung oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta dan United Nations for Development Programme (UNDP), kegiatan ini diberi nama "Assessment of Existing Economic Skills-Oriented Program for Former Terrorist Convicts with Policy Recommendation on Economic Empowerment for Former Terrorist Convicts and Support for Best Practices.

Asesmen ini fokus menyorot program-program pemberdayaan ekonomi bagi para mantan narapidana teroris dan kombatan di Indonesia adalah tingkat radikalisme para penerima bantuan. Program intervensi yang baik seharusnya melakukan pengukuran/penilaian tingkat radikalisme penerima bantuan sebelum program diberikan. Hal ini bertujuan untuk menyediakan informasi dasar yang akan menjadi patokan atau dasar pembandingan bagi hasil pemantauan dan penilaian kemajuan dan efektivitas kegiatan selama pelaksanaan dan setelah program selesai. Berangkat dari keyakinan awal bahwa dengan meningkatnya kemampuan ekonomi, maka tingkat radikalisme akan menurun, maka variabel kedua yang menjadi perhatian adalah status ekonomi. Penelitian evaluasi program pemberdayaan ekonomi ini dilakukan untuk melihat sejauh apa dampak intervensi yang sudah diberikan kepada para mantan narapidana teroris dan kombatan di Indonesia.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini adalah studi deskriptif, di mana tujuannya untuk melihat gambaran dampak program intervensi ekonomi. Studi ini menggunakan pendekatan *expost facto*, di mana data yang menjadi unit analisis (karakteristik responden) sudah ada sebelum penelitian ini dilakukan.

Dalam penelitian ini, apa yang dimaksud dengan program ekonomi adalah program bantuan ekonomi tunai dan non-tunai. Bantuan ekonomi tunai adalah bantuan dalam bentuk tunai umum (*hardmoney*) dan tunai khusus (dalam bentuk barang). Sementara itu bantuan ekonomi dalam bentuk non-tunai berupa pelatihan ekonomi (baik *hardskill* maupun *softskill*). Berdasarkan materinya, pelatihan terbagi dua: ada pelatihan ekonomi murni, serta pelatihan campuran di mana materi-materi kewirausahaan dicampur dengan materi deradikalisasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah para mantan narapidana teroris dan kombatan di Indonesia yang pernah menerima program pemberdayaan ekonomi. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non-probability sampling* dimana tidak semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak mungkin menjangkau seluruh populasi dan keterbatasan ketersediaan data terkait mantan narapidana teroris dan kombatan yang pernah menerima

bantuan. Pemilihan sampel ditentukan berdasarkan aksesibilitas dalam pengambilan data.

Variabel utama yang diukur dalam penelitian ini adalah dampak ekonomi yang diukur dari pekerjaan dan pendapatan saat ini, serta tingkat radikalisme. Populasi responden penelitian adalah mantan napiter dan atau mantan kombatan yang sudah pernah mendapatkan bantuan ekonomi, baik secara tunai maupun non-tunai. Pengertian mantan kombatan adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam konflik komunal bersenjata seperti konflik Ambon, Poso, bahkan Mindanao Filipina, tapi tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pengumpulan dan pengolahan data menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method).

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner radikalisme sebagai alat ukur terhadap derajat radikalisme responden yang dirumuskan secara independen berdasarkan tantangan-tantangan deradikalisasi di Indonesia. Alat ukur lain sebagai indikator dampak program ekonomi adalah Subjective Well-Being Scale, Domain Life Satisfaction Scale, dan pengukuran status ekonomi yang mengadaptasi dari sensus ekonomi. Pengolahan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode statistik deskriptif dan korelasional untuk mendapatkan gambaran mengenai tingkat radikalisme dan status ekonomi penerima bantuan.

Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teknik kuesioner, wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan penerima program ekonomi dan lembaga penyelenggara program. Jumlah sampel penerima program ekonomi adalah 38 orang mantan narapidana kasus terorisme (napiter) dan mantan kombatan yang pernah mendapatkan bantuan program ekonomi di tiga wilayah, yaitu Jabodetabek, Lamongan serta Poso. Perinciannya: 11 orang mantan napiter di Jabodetabek, 17 orang mantan napiter dan mantan kombatan di Lamongan, dan 10 mantan napiter serta mantan kombatan di Poso. Sementara itu, ada 12 lembaga yang memberikan program ekonomi kepada para partisipan baik lembaga pemerintah seperti BNPT dan Pemda Poso, maupun CSO seperti YPP, PRIK UI, IMC2 dan lain-lain. BNPT sendiri merupakan lembaga terbesar yang memberikan bantuan program ekonomi. Waktu pengumpulan data dilakukan dari Agustus hingga November 2017.

## **HASIL PENELITIAN**

Dari hasil studi yang dilakukan terdapat sejumlah temuan mengenai pelaksanaan program bantuan ekonomi dan bantuan tunai langsung yang untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan program deradikalisasi.

### ***Penilaian dan Pengukuran (Assessment) Dalam Program***

Hampir pada seluruh pelaksanaan program, terdapat kelemahan mendasar yang membuat program tidak berjalan sebagaimana yang ditetapkan.

Kelemahan pokok tersebut adalah tidak ada penilaian pengukuran di awal dan akhir yang memadai terhadap para partisipan penerima bantuan ekonomi.

Penilaian dan pengukuran yang dimaksud adalah penilaian dan pengukuran atas derajat radikalisme serta kemampuan ekonomi partisipan. Disebut tidak memadai karena mayoritas lembaga pemberi bantuan tidak melakukan penilaian dan pengukuran awal dan akhir. Ada lembaga yang mulai melakukan penilaian dan pengukuran awal, tapi tidak melakukan hal tersebut pada akhir program. Padahal aktivitas ini penting untuk mengukur dampak serta keberhasilan program.

### ***Pertalian (Correlation) Antara Program dengan Derajat Radikalisme***

Dalam studi ini terlihat bahwa tidak ada korelasi antara jumlah pelatihan ekonomi murni dengan tingkat radikalisme. Artinya, banyaknya pelatihan yang diberikan tidak berkaitan dengan naik turunnya derajat radikalisme partisipan. Pada sisi lain, ada korelasi negatif antara jumlah pelatihan ekonomi serta bantuan tunai yang dicampur dengan materi deradikalisasi dengan tingkat radikalisme. Namun, temuan ini belum bersifat kesimpulan final, karena ada bias responden di mana para partisipan yang menerima program ekonomi baik dari BNPT maupun CSO sudah diseleksi melalui penunjukan langsung terhadap partisipan yang tingkat radikalismenya sudah rendah.

Para partisipan yang punya tingkat radikalisme rendah bisa dilihat dari fakta bahwa 21 mantan napi teroris yang menerima program adalah mereka yang sudah mengalami disengagement atau tingkat radikalismenya rendah. Pada saat berada di lembaga pasyarakatan, mereka adalah narapidana yang kooperatif dan juga mengajukan Pembebasan Bersyarat (PB) yang beberapa syaratnya adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justicecollaborator. Begitu juga dengan 17 mantan kombatan, mereka adalah orang-orang yang sudah bergabung dengan komunitas mantan napiter yang telah mengalami disengagement. Misalnya, para mantan kombatan di Lamongan adalah para aktivis Lingkar Perdamaian pimpinan Ali Fauzi.

### ***Tingkat Keberhasilan Program***

Mayoritas partisipan belum berhasil menjadikan bantuan tunai dan bantuan tunai khusus berupa barang menjadi modal produktif. Hanya 2% atau 7 orang yang bisa menjadikan bantuan tunai atau bantuan tunai khusus berupa pemberian barang (belanja modal) menjadi modal ekonomi yang produktif. Ketujuh orang tersebut adalah mereka yang sudah memiliki usaha sebelumnya, dan bantuan tunai yang didapat dipergunakan untuk menambah modal. Pemberian bantuan ekonomi bermanfaat terhadap kegiatan ekonomi partisipan ketika si penerima bantuan sudah memiliki usaha sebelum bantuan diberikan.

Hasil studi ini menunjukkan tidak ada korelasi antara pelatihan ekonomi dengan persepsi manfaat ekonomi yang didapat dari mengikuti program tersebut. Artinya, pelatihan-pelatihan ekonomi yang diberikan tidak sesuai dengan

kebutuhan ekonomi para partisipan. Hal ini bisa disebabkan karena pelatihan ekonomi tersebut tidak dibuat berdasarkan penilaian dan pengukuran kebutuhan para partisipan.

Terdapat korelasi positif antara jumlah bantuan tunai dan bantuan barang yang diberikan dengan persepsi manfaat ekonomi yang didapat. Persepsi manfaat ekonomi ini bukan kondisi objektif ekonomi si partisipan, seperti meningkatnya penghasilan ekonomi setelah mendapatkan bantuan tunai. Dalam pandangan para partisipan, makin banyak bantuan yang diberikan makin dirasa manfaat ekonominya. Bantuan tunai dianggap lebih bermanfaat dari pelatihan ekonomi. Partisipan kemudian lebih menilai bahwa bantuan tunai jauh lebih bermanfaat daripada pelatihan ekonomi.

Tidak adanya korelasi antara pelatihan dan persepsi manfaat ekonomi adalah karena tidak ada pendampingan dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang memadai. Sebanyak 55% atau 21 orang mengaku mendapatkan pendampingan dan Monev, namun pendampingan yang dimaksud oleh mereka adalah pendampingan hanya sampai pada pemberian bantuan tunai atau mendampingi partisipan untuk membeli barang yang akan digunakan sebagai modal (belanja modal). Setelah itu, tidak ada lagi pendampingan atau pun Monev terhadap partisipan. Akibatnya, uang tunai yang diterima atau belanja modal umumnya menjadi tidak produktif.

### ***Potensi Radikalisme***

Program deradikalisasi berkaitan dengan penurunan derajat deradikalisasi, dan berkaitan dengan peningkatan harapan, persepsi kualitas hidup, dan persepsi aspek-aspek kehidupan sekarang. Ini bisa diuraikan sebagai berikut: karena korelasi sifatnya dua arah, dan bukan hubungan sebab-akibat, maka perlu dipertimbangkan bahwa yang mendapatkan program deradikalisasi adalah responden yang sejak awal tingkat radikalitasnya memang sudah rendah. Dugaan sementara, program deradikalisasi bermanfaat buat kombatan/eks-napiter yang kadar radikalitasnya sudah rendah sejak awal.

Meskipun seluruh partisipan sudah mencapai tahap disengagement dengan menganggap bahwa aksi terorisme di Indonesia tak lagi memiliki legitimasi, namun ada 65,8% atau 25 orang yang masih berpotensi kembali melakukan kekerasan dalam kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah bila terjadi konflik komunal seperti kasus Poso dan Ambon, di mana orang Islam menjadi korban, mereka bersedia untuk terlibat kembali dalam aksi kekerasan. Dari temuan ini bisa disimpulkan bahwa konflik komunal bisa menjadi pemicu fenomena pemulihan spontan (*spontaneous recovery*), di mana secara tiba-tiba orang dapat kembali kepada perilaku lama yang sudah lama ditinggalkan.

## REKOMENDASI

1. Untuk menghasilkan program ekonomi yang punya dampak menurunkan tingkat radikalisme, penting mencampur intervensi ekonomi dengan kegiatan deradikalisasi atau intervensi ideologi untuk menurunkan tingkat radikalisme para partisipan.
2. Untuk menghasilkan sebuah program ekonomi yang membuahkan manfaat ekonomi dan menurunkan tingkat radikalisme secara maksimal, diperlukan tiga tahap program kegiatan:
  - a) Pra-intervensi berupa penilaian dan pengukuran atau baseline study terhadap calon partisipan. Dalam kegiatan pra-intervensi ini dilakukan penilaian dan pengukuran terhadap para calon partisipan, dimulai dari pengukuran tingkat radikalisme melalui instrumen pengukuran radikalisme, pengukuran kondisi ekonomi melalui instrumen ekonomi, serta kompetensi kewirausahaan calon partisipan. Mengukur kompetensi calon partisipan tujuannya untuk mengetahui kapasitas yang bersangkutan dalam berwirausaha. Baseline study ini penting bukan hanya untuk mengidentifikasi jenis intervensi yang tepat tapi juga datanya akan membantu proses monitoring serta evaluasi keberhasilan program intervensi ekonomi yang akan dilakukan.
  - b) Intervensi. Program ini dimulai dengan intervensi ideologi dalam rangka menurunkan tingkat radikalisme para partisipan. Selepas program intervensi barulah dilakukan penilaian dan pengukuran ulang terhadap derajat radikalisme sekaligus untuk menentukan besaran bantuan ekonomi yang akan diberikan. Pengukuran derajat radikalisme yang kedua ini hasilnya dibandingkan dengan hasil pengukuran awal soal tingkat radikalisme. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi dampak kegiatan intervensi ideologi. Tahap selanjutnya, diberikan pelatihan kewirausahaan serta bantuan tunai langsung atau pun bantuan tunai khusus berupa barang. Selama masa pelatihan kewirausahaan, materi intervensi ideologi tetap harus diberikan untuk memastikan pelatihan ini punya dampak menurunkan tingkat radikalisme.
  - c) Pendampingan usaha serta monitoring dan evaluasi. Mentoring atau pendampingan usaha menjadi penting bagi partisipan, terutama membantu mereka dalam menghadapi dan menemukan solusi atas masalah-masalah di lapangan. Dalam banyak kasus, kegagalan pemberian bantuan tunai atau belanja modal tidak bisa menjadi produktif disebabkan karena partisipan kesulitan menghadapi berbagai masalah hingga akhirnya menyerah di tengah jalan. Selama proses pendampingan, kegiatan intervensi ideologi tetap harus dilakukan untuk terus menurunkan derajat radikalisme partisipan. Kegiatan pendampingan dan monitoring ini diakhiri dengan

evaluasi. Kegiatan evaluasi meliputi evaluasi keberhasilan intervensi ekonomi serta intervensi ideologi melalui instrumen ekonomi dan instrumen untuk mengukur derajat radikalisme. Hasil akhir ini akan dibandingkan dengan baseline study soal kemampuan ekonomi dan derajat radikalisme partisipan.

3. Dalam proses program berjalan penting untuk membangun koneksi antara para partisipan dengan lembaga-lembaga ekonomi lokal, lembaga pemerintah dan kelompok moderat, serta korban terorisme. Koneksi ini bukan hanya saja penting memudahkan monitoring serta membantu kesulitan para partisipan ketika menjalankan usaha, tetapi juga akan bermanfaat untuk deradikalisasi dan proses reintegrasi sosial para partisipan dengan masyarakat tempatan.
4. Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap konflik komunal, seperti konflik SARA di Ambon dan Poso. Pasalnya, konflik komunal seperti itu merupakan faktor pemicu spontaneous-recovery di mana para partisipan yang sudah mengalami disengagement-tiba-tiba terlibat lagi dalam kekerasan.



RINGKASAN EKSEKUTIF

# REVITALISASI PRAMUKA DAN KARANG TARUNA DALAM RANGKA MENANGKAL EKSTRIMISME-KEKERASAN

PARAMADINA INSTITUTE OF ETHICS AND CIVILIZATION  
(PIEC) UNIVERSITAS PARAMADINA



## LATAR BELAKANG

Pramuka dan Karang Taruna memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang menaungi kegiatan kepemudaan. Keduanya punya kontribusi penting dalam menanamkan semangat nasionalisme dan kecintaan pada alam (Pramuka), serta semangat kreativitas dan produktivitas (Karang Taruna).

Namun, sejak Reformasi, sepak terjang Pramuka dan Karang Taruna cenderung mengalami kemunduran. Pramuka, misalnya, kurang diminati para siswa di sekolah. Hasil survei Setara Institute pada 2016 menemukan bahwa Pramuka hanya diminati oleh 11,2% siswa dan menempati posisi ke-3 di bawah olah raga dan kerohanian Islam (rohis). Begitu juga Karang Taruna. Organisasi Karang Taruna di daerah yang dulunya aktif sekarang menjadi kurang aktif dan bahkan ada yang benar-benar mati suri.

Riset asesmen yang dilakukan PIEC (2017) menunjukkan ada dua faktor utama yang menyebabkan hal tersebut. Pertama, liberalisasi politik pasca-Reformasi memunculkan banyak partai politik dan semakin maraknya aktivitas politik dari pusat sampai daerah. Hal ini menyedot banyak sekali jumlah pemuda yang masuk ke dunia politik, terutama karena aktivitas politik yang masih dominan praktik-praktik transaksional atau apa yang kita kenal sebagai politik-uang (money politics). Kedua, semakin menjamurnya lembaga-lembaga non-pemerintah (LSM/ Lembaga Swadaya Masyarakat) dari level internasional, nasional, regional sampai lokal dan dengan isu-isu yang semakin beragam, membuat Karang Taruna semakin tidak dilirik.

Kenyataan ini jelas memprihatinkan. Di tengah semakin mundurnya eksistensi organisasi kepemudaan, pemahaman dan gerakan intoleransi dan radikalisme justru semakin merebak di generasi zaman now. Realitas ini terjadi karena anak-anak muda (remaja) tengah berada dalam fase transisi dari anak-anak ke dewasa. Mereka tengah mencari identitas jati-diri, suka akan tantangan dan petualangan, belum memiliki beban tanggungan. Situasi ini membuat mereka berada dalam posisi yang rentan disusupi oleh pandangan yang bisa menyeret mereka pada ideologi dan aktivisme ekstrimisme-kekerasan.

## MENGAPA KAJIAN INI PENTING

Mandat dan peran organisasi Pramuka dan Karang Taruna tergambar jelas dalam Undang-Undang yang mengatur tentang organisasi kepemudaan. Untuk Pramuka, paling tidak terdapat sejumlah aturan yang menjadi landasan eksistensi gerakan mereka, yaitu pertama, Undang-Undang No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; dan kedua, Permendikbud No. 63 Tahun 2014 tentang kepramukaan yang mengatur secara eksplisit tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib.

Sementara itu, payung hukum Karang Taruna terdapat pada, pertama, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 13 yang menyatakan bahwa Karang Taruna merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kedua, Permendagri No 5 Tahun 2007 pasal 1 yang mengatur pedoman penataan lembaga kemasyarakatan secara

umum, termasuk Karang Taruna. Ketiga, Permensos No. 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Karang Taruna. Keempat, Permensos No 23 tahun 2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna.

Dengan mandat seperti itu, peran organisasi Pramuka dan Karang Taruna secara kelembagaan diharapkan menjadi pusat kegiatan-kegiatan kepemudaan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Karena itu, melemahnya daya tarik dan peran dari dua organisasi ini bagi pemuda mendorong PIEC Universitas Paramadina bekerjasama dengan PPIM UIN Jakarta melakukan asesmen tentang bagaimana upaya-upaya revitalisasi Pramuka dan Karang Taruna bisa dilakukan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Beberapa tahap kegiatan penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Riset asesmen tentang hambatan dan peluang pengembangan Pramuka dan Karang Taruna melalui wawancara mendalam. Untuk Pramuka, wawancara dilakukan terhadap 100-an siswa anggota dan pembina Pramuka di SMA/SMK/MA di empat tempat yakni Bogor, Sukabumi, Serang, dan Pandeglang. Untuk Karang Taruna wawancara dilakukan terhadap 50-an pemuda anggota pengurus dan pembina Karang Taruna di 4 wilayah tersebut.
2. Survei daya tahan Pramuka & Karang Taruna terhadap ekstrimisme-kekerasan. Untuk Pramuka, survei dilakukan terhadap 150 siswa peserta camping di Bogor dan Pandeglang. Untuk Karang Taruna, survey dilakukan terhadap 70 pemuda peserta training di Sukabumi dan Serang.
3. Focused Group Discussion (FGD) tentang kebijakan terkait Pramuka dan Karang Taruna; FGD Pramuka diikuti oleh 15 orang wakil dari Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora, Kwarnas, perwakilan sekolah, Pramuka, tokoh muda dan lainnya. Sementara FGD Karang Taruna diikuti oleh 15 orang wakil dari Kemensos, Kemendes, Forum Karang Taruna Kabupaten/Kota, anggota dan pembina Karang Taruna, sosiolog dan lainnya.
4. FGD Pembuatan Modul Revitalisasi Pramuka dan Karang Taruna yang dimaksudkan menjadi materi menangkal radikalisme dan ekstremisme.
5. Uji coba modul dalam bentuk kemah (Pramuka) dan pelatihan (Karang Taruna) dengan tema nasionalisme, kreatifitas dan toleransi. Kemah dilaksanakan di Bogor dan Pandeglang yang diikuti oleh 150-an anggota Pramuka dan pelatihan dilaksanakan di Serang dan Sukabumi yang diikuti oleh 70 pemuda Karang Taruna.
6. FGD Policy Brief dengan para pemangku kebijakan terkait Pramuka, Karang Taruna, dan CVE. Diikuti oleh 15 orang wakil dari Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora, BNPT, Kemendes, Kemensos dan lainnya.

## TEMUAN PENELITIAN

### ***Pramuka***

1. Hambatan: Sejumlah faktor telah menjadi hambatan dalam pengembangan kegiatan Pramuka. Hambatan tersebut muncul dari kebijakan institusi sekolah, minat pelajar, dan kebijakan yang lebih makro (dari Pemerintah). Sebagian besar pimpinan sekolah tidak lagi menjadikan Pramuka sebagai prioritas dalam kegiatan ekstrakurikuler dan lebih fokus ke aspek akademik para siswa. Akibatnya, Pramuka tidak berkembang. Pelaksanaan Kurikulum 2013 telah memaksa banyak sekolah menjadi *study-oriented*, karena beban mata pelajaran yang banyak dan rumit, khususnya menyangkut kompetensi dan standar nilai.

Hambatan lain dari para pelajar sendiri. Munculnya bentuk-bentuk baru kegiatan pemuda berbasis teknologi telah menimbulkan kesan kegiatan Pramuka ketinggalan zaman dan tidak menarik. Hampir 71% responden yang diwawancarai menyatakan bahwa belajar semaphore, sandi-sandi, dan lainnya dalam kegiatan kepramukaan tidak menarik. Sebaliknya, internet, media sosial, dan permainan di komputer telah menjadi kegiatan umum bagi pemuda di luar jam sekolah. Kegiatan Pramuka dianggap kurang menarik karena kesan yang timbul di kalangan para siswa, bahwa Pramuka identik dengan semi-militer: kedisiplinan tinggi, kekerasan, seperi verbal bullying (membentak-bentak), dan lain-lain.

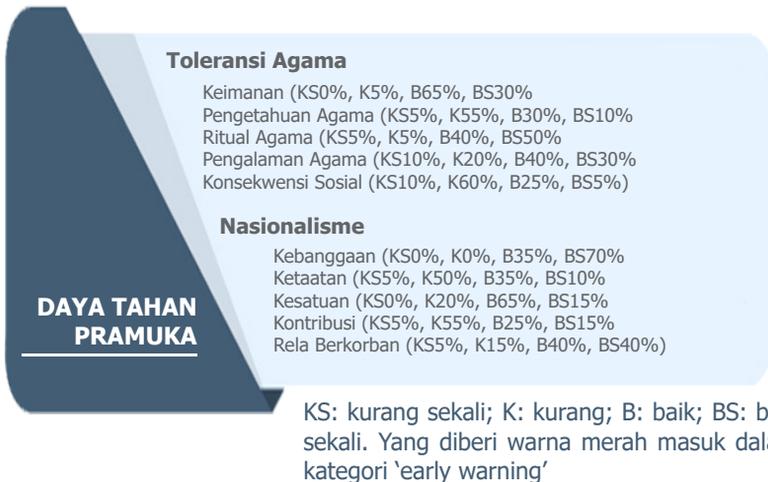
Ada juga hambatan yang berasal dari masih kurangnya jumlah pembina Pramuka di beberapa sekolah. Terutama pembina yang sudah lulus KMD/Kursus Mahir Dasar dan KML/Kursus Mahir Lanjutan. Idealnya, 1 pembina mengampu 150 sampai 200 anggota Pramuka. Tapi di beberapa sekolah yang jumlah siswanya di atas 1000 mereka hanya memiliki 1 atau 2 pembina yang sudah lulus KMD dan KPL. Akibatnya pembinaan pendidikan kepramukaan kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Hambatan lainnya adalah koordinasi yang kurang baik di kementerian terkait (Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpora) yang tercermin pada masih banyaknya tumpang tindih kebijakan dan juga implementasinya. Misalnya, anggota pramuka terutama tingkat siaga dan penggalang, berusia 7-15 tahun. Sementara gerakan pramuka tidak berada di bawah Kemendikbud melainkan di bawah Kemenpora yang mengurus pemuda dan olah raga, di mana pemuda adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas.

2. Peluang: Sampai saat ini Pramuka masih dipandang sebagai medium penanaman nilai-nilai nasionalisme paling efektif di kalangan pelajar. Ketika banyak pelajar mengalami kelunturan nasionalisme, gerakan Pramuka bisa diharapkan menjadi media yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini melalui penghayatan dan pengamalan Tri Satya dan Dasa Dharma sebagai pedoman dasar Pramuka. Pramuka juga mempunyai tradisi dan sejarah panjang yang telah ditorehkan sebagai organisasi dengan jum-

lah anggota yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia; dari Sabang sampai Merauke, dari kota besar sampai ke pelosok desa dan pedalaman. Data menyebutkan bahwa anggota pramuka jumlahnya sekarang lebih dari 20 juta; baik dari SD, SMP maupun SMA. Apalagi, sejak tahun 2014, Permendikbud menyatakan bahwa Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib, sehingga semua sekolah otomatis memiliki aktivitas pendidikan kepramukaan.

Dalam konteks itu, penelitian ini menemukan bahwa organisasi Pramuka mempunyai posisi strategis untuk mendiseminasi nilai-nilai anti kekerasan dan anti ekstrimisme bagi pemuda, khususnya usia sekolah.



Berdasarkan tabel di atas, ada beberapa hal yang menjadi keunggulan Pramuka dalam meredam ekstremisme-kekerasan. Daya tahan Pramuka terhadap propaganda ideologi radikalisme dan ekstrimisme secara umum baik; rata-rata 67% menjawab B/Baik dan Baik Sekali, dan hanya 33% yang menjawab K/Kurang dan KS/Kurang Sekali.

Dalam hal toleransi agama, aspek keimanan, ritual agama dan pengalaman agama juga cukup baik (rata-rata 85% menjawab Baik dan Baik Sekali). Para siswa merasa memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang mereka anut, mereka juga rutin beribadah terutama salat lima waktu, zakat dan puasa serta ibadah lain terutama sedekah. Para siswa juga merasa bahwa pengalaman keagamaan mereka memberi pengaruh positif pada stabilitas emosi, pertimbangan perilaku, dan penyesalan setelah melakukan kesalahan. Hanya pengetahuan agama (karena responden SMA, SMK dan MA jadi cuma MA yang mengakui baik) dan konsekwensi sosial perlu diperbaiki (mereka bingung dengan batas-batas praktik toleransi). Rata-rata untuk dua hal itu, hanya 35% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para siswa MA/Madrasah Aliyah mendapatkan pelajaran agama hampir tiap hari, 5-6 hari selama seminggu se-

kolahnya dan secara komprehensif mulai dari fiqih, tarikh-tasyri, qur'an-hadits, dan lainnya. Sementara para siswa SMA dan SMK hanya mendapatkan pelajaran agama secara umum dan hanya 2 jam dalam seminggunya.

Sementara nasionalisme Pramuka secara umum baik terutama aspek kebanggaan, kesatuan dan rela berkorban (rata-rata 87% menjawab Baik dan Baik Sekali). Para siswa anggota Pramuka merasa memiliki kebanggaan sebagai warga negara Indonesia karena mereka menganggap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, penduduknya banyak, banyak budaya, suku dan agama serta sekarang semakin maju secara ekonomi. Para siswa juga merasa bahwa persatuan sangat penting meski berbeda-beda suku, bahasa dan agamanya. Para siswa merasa rela berkorban untuk bangsanya. Akan tetapi karena sekarang bukan zaman perang, mereka merasa cara berkorbannya dengan belajar keras untuk memajukan bangsa. Aspek ketaatan belum baik (ini sebenarnya problem umum masyarakat Indonesia) dan juga kontribusi (karena masih muda). Rata-rata untuk dua hal itu hanya 42% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para siswa merasa ada dilema ketika berada di ruang publik. Di satu sisi mereka diajarkan disiplin dan menaati peraturan di Pramuka, tapi di sisi lain mereka melihat masyarakat banyak yang tidak disiplin dan melanggar peraturan. Mereka kadang menegur tetapi tidak dihiraukan, dan kadang mereka mengakui juga ikut-ikutan tidak disiplin dan melanggar peraturan.

### **Karang Taruna**

1. Nasib organisasi Karang Taruna juga tidak jauh berbeda. Sejumlah tantangan telah meminggirkan perannya sebagai organisasi pemuda di desa-desa. Secara internal, kebanyakan anggota Karang Taruna, umumnya lebih dari 60%, adalah pengangguran dan berpendidikan rendah (lulusan SMA dan bahkan ada yang hanya SMP dan SD). Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat kreatifitas dan produktifitas Karang Taruna. Baik Karang Taruna di kota (Bogor dan Serang), maupun di desa (Sukabumi dan Pandeglang), prosentasenya sama-sama tinggi yang pengangguran dan berpendidikan rendah (lebih dari 60%).

Sementara itu secara eksternal, munculnya banyak NGO, Ormas, dan partai politik sebagai alternatif yang lebih menarik minat pemuda, khususnya dari sisi finansial. Ini mengkonfirmasi cerita di balik profil pemuda pelaku bom JW Marriot. Dani Dwi Permana (17 tahun) awalnya adalah anggota Karang Taruna di desanya di Bogor. Namun, karena dari keluarga miskin dan kesulitan membayar biaya sekolah SMA-nya, Dani lebih memilih aktif sebagai marbot (penjaga mushalla) di desanya, di mana dia mendapatkan bantuan biaya sekolah dan sedikit uang saku. Lama-lama Dani meninggalkan sama sekali aktivitasnya di Karang Taruna. Dari kasus ini setidaknya terlihat bahwa sekalipun Karang Taruna adalah organisasi pemerintah, perhatian yang kurang turut menjadikan anggotanya menjadi kurang memiliki nilai nasionalisme yang kuat.

Faktor utama yang juga menjadi masalah dalam upaya pengembangan Karang Taruna adalah minimnya dukungan desa. Kebanyakan Karang Taruna yang maju didukung oleh faktor kepemimpinan yang kuat dari kepala desanya. Ada beberapa kasus Karang Taruna maju namun kepala desa kurang mendukung. Kemudian pada periode kepemimpinan selanjutnya, sang ketua Karang Taruna terpilih menjadi kepala desa. Artinya, sebenarnya Karang Taruna memiliki posisi yang strategis di desa, hanya terkadang masih kurang disadari.

Masalah lainnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung mereka untuk bisa semakin kreatif dan produktif juga dianggap belum merata dan belum berkelanjutan. Karang Taruna terutama di pelosok desa merasa kurang mendapat cukup pembinaan dari Kemensos. Sementara Karang Taruna yang beberapa kali mendapat pembinaan menganggap kurang berkelanjutan.

2. Peluang dan Keunggulan: peluang dan keunggulan dari Karang Taruna tercermin dalam semangat gotong royong antaranggota dalam berbagai kegiatan. Karang Taruna juga masih menjadi wadah kegiatan kepemudaan yang bisa mengurangi tingkat kriminalitas di lingkungan masyarakat desa dan kelurahan. Ini terlihat dari kebiasaan koordinasi Karang Taruna dengan aparat kepolisian, sehingga pengawasan yang menyangkut urusan keamanan dan ketertiban di desa bisa dilaksanakan secara baik.

Posisi ini menjadikan Karang Taruna berpotensi sebagai organisasi kepemudaan untuk menangkal bahaya ekstremisme kekerasan dan radikalisme di kalangan kaum muda. Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh PIEC, Karang Taruna memiliki daya tahan terhadap pemikiran dan gerakan-gerakan ekstrim.

### Toleransi Agama

Keimanan (KS5%, K20%, B60%, BS15%)  
 Pengetahuan Agama (KS10%, K50%, B25%, BS15%)  
 Ritual Agama (KS0%, K20%, B45%, BS35%)  
 Pengalaman Agama (KS0%, K15%, B70%, BS15%)  
 Konsekwensi Sosial (KS5%, K55%, B15%, BS25%)

### Nasionalisme

Kebanggaan (KS10%, K45%, B35%, BS10%)  
 Ketaatan (KS5%, K50%, B45%, BS5%)  
 Kesatuan (KS5%, K25%, B35%, BS35%)  
 Kontribusi (KS0%, K10%, B55%, BS35%)  
 Rela Berkorban (KS5%, K15%, B40%, BS40%)

## DAYA TAHAN KARANG TARUNA

KS: kurang sekali; K: kurang; B: baik; BS: baik sekali. Yang diberi warna merah masuk dalam kategori 'early warning'

Berdasarkan tabel di atas, daya tahan Karang Taruna terhadap propaganda ideologi ekstrimisme secara umum baik, rata-rata 65% menjawab B/Baik dan Baik Sekali, dan hanya 35% yang menjawab K/Kurang dan KS/Kurang Sekali.

Dalam hal toleransi agama, aspek keimanan, ritual agama dan pengalaman agama cukup baik. Rata-rata 80% menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna merasa memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama yang mereka anut. Mereka juga rutin beribadah, terutama salat lima waktu, zakat, dan puasa serta ibadah lain terutama sedekah. Mereka juga merasa bahwa pengalaman keagamaan mereka memberi pengaruh positif pada stabilitas emosi, pertimbangan perilaku, dan penyesalan setelah melakukan kesalahan. Hanya pengetahuan agama dan konsekwensi sosial perlu diperbaiki (sebagaimana pada Pramuka, mereka juga bingung tentang batas-batas praktik toleransi). Rata-rata untuk dua hal itu hanya 40% siswa yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna umumnya tidak memiliki pengetahuan agama yang baik. Sedikit sekali dari mereka yang alumni madrasah, pesantren dan IAIN, prosentasenya di bawah 30%. Kebanyakan adalah lulusan SMA, SMK, SMP dan SD. Mayoritas atau lebih dari 50% adalah lulusan SMA dan SMK.

Sementara nasionalisme Karang Taruna secara umum baik terutama aspek kesatuan, kontribusi dan rela berkorban. Rata-rata 80% menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna merasa bahwa persatuan sangat penting meski berbeda-beda suku, bahasa dan agamanya. Mereka merasa rela berkorban untuk bangsanya, termasuk untuk berperang melawan negara lain atau ikut kegiatan bela bangsa seperti wajib militer dan sejenisnya. Hanya aspek kebanggaan dan ketaatan masih harus diperbaiki. Rata-rata untuk dua hal itu hanya 47% yang menjawab Baik dan Baik Sekali. Para anggota Karang Taruna umumnya mengaku bangga menjadi bangsa Indonesia, karena itu bangsa yang besar, kaya sumber daya alam, kaya budaya dan suku bangsa. Akan tetapi mereka juga kecewa dengan modal kekayaan sumber daya alam dan budaya mereka yang masih miskin. Mereka juga tidak bangga karena korupsi di Indonesia masih tinggi dan terutama oleh para pejabat dan elit di Indonesia yang menurut mereka sebenarnya justru sudah kaya. Para anggota Karang Taruna merasa ada dilema ketika berada di ruang kaya. Di satu sisi mereka sadar bahwa tidak disiplin dan tidak menaati peraturan akan merusak ketertiban sosial, tapi di sisi lain mereka melihat masyarakat banyak yang tidak disiplin dan melanggar peraturan. Mereka kadang menegur tetapi tidak dihiraikan dan kadang mereka mengakui juga ikut-ikutan tidak disiplin dan melanggar peraturan.

## REKOMENDASI

### ***Pramuka***

1. Untuk kepala sekolah sebagai Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka (Mabigus): harus memberikan dukungan penuh terhadap Pramuka. Dukungan tersebut dapat berupa himbauan, pengawasan, dukungan material, dukungan moral agar Pramuka di sekolah masing-masing semakin diminati para siswa dan semakin aktif dalam berkegiatan. Apalagi sesuai dengan Permendikbud, Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib. Kepala sekolah juga harus melibatkan para orang tua dan pihak-pihak lain terkait untuk memajukan Pramuka di sekolahnya.
2. Untuk Kemendikbud: dalam rencana revisi permendikbud No 63/2014 tentang Pramuka Sebagai Ekstrakurikuler Wajib perlu menyertakan usulan agar Pendidikan Kepramukaan juga menjadi media sosialisasi Counter Violent Extremism (CVE), khususnya melalui model blok (MPLS/masa pengenalan lingkungan sekolah), selain model aktualisasi dan reguler. Di model blok, sosialisasi lebih kepada pengetahuan umum tentang CVE (mengenal bahaya VE, ideologi dan aktivismenya dan sebagainya). Sementara di model aktualisasi dan reguler lebih secara khusus tentang bagaimana menangani VE di kalangan siswa, bagaimana mencegah VE, kampanye seperti apa, dan sejenisnya. Revisi juga harus memperjelas OTK/Organisai Tata Kelola implementasi Permen ini agar masalah kekurangan pembina Pramuka di sekolah seperti dikeluhkan dalam riset asesmen PIEC (2017) dan juga FGD Pramuka bisa diatasi.
3. Untuk BNPT dan Kwarnas: agar menjadikan semangat anti-ekstremisme kekerasan menjadi salah satu krida (atau sekumpulan kecakapan khusus) di bawah saka (satuan karya) Bhayangkara yang sudah ada. Kecakapan khusus yang diperlukan antara lain; pengetahuan tentang VE baik ideologi maupun aktivitasnya, bagaimana mengidentifikasi awal VE menjangkiti para siswa, bagaimana penanganannya, bagaimana pencegahan atau kampanye agar VE tidak menjangkiti sekolah dan lainnya.
4. Untuk Kemendikbud dan Kemenpora; perlu diperjelas UU Kepramukaan apakah tetap di bawah Kemenpora atau Kemendikbud, karena Pramuka selain berbasis sekolah juga usia mulai 7-25 tahun, sementara Kemenpora dalam urusan pemuda usia mulai 17-45. Sebaiknya ada revisi UU Kepramukaan agar gerakan pramuka berada di bawah Kemendikbud, tidak di bawah Kemenpora.

## **Karang Taruna**

1. Untuk kepala-desa & lurah: Karena secara kebijakan sudah diatur alokasi dana desa, masalah muncul pada implementasi di lapangan. Kepala desa harus mendukung penuh kegiatan Karang Taruna di desa masing-masing terutama melalui alokasi dana desa dari 7 sumber untuk program Karang Taruna yang bisa dimanfaatkan salah satunya untuk kegiatan CVE. Kegiatan bisa berupa sosialisasi, simulasi penanganan, pencegahan dan sejenisnya. Untuk kelurahan karena tidak mendapat dana desa, maka diharapkan mampu mendorong Karang Taruna memanfaatkan dana bantuan lain dari pemerintah (melalui Perda, Musrenbang dll) dan non-pemerintah seperti Corporate Social Responsibility(CSR) dan lainnya untuk kegiatan Karang Taruna, baik seni dan olah raga, ketahanan nasional, usaha ekonomi kreatif, maupun usaha kesejahteraan sosial, termasuk kegiatan CVE seperti di atas.
2. Untuk BNPT: perlu memanfaatkan Karang Taruna secara optimal dalam kegiatan CVE. Perlu mengembangkan potensinya sebagai forum diseminasi nilai-nilai seperti nasionalisme secara umum, terjaminnya keberadaan Karang Taruna di semua desa-kelurahan di Indonesia, dan langsung bersentuhan dengan kaum muda di wilayah masing-masing.
3. Untuk Kemendes: revisi Permendes No 2 tahun 2015 tentang Pedoman Musyawarah Desa dan Permendes terkait lainnya sehingga nasib Karang Taruna tidak lagi tergantung pada Kepala Desa. Selama ini, maju atau mundurnya Karang Taruna banyak bergantung pada komitmen Kepala Desa sehingga yang dominan adalah pendekatan politis. Revisi Permendes ditujukan agar pendekatan teknokratis dan partisipatif bisa terimplementasi di lapangan.
4. Untuk Kemensos: Kemensos sesuai Permensos 77 Tahun 2010 selaku yang bertanggung jawab atas pembinaan Karang Taruna harus memastikan bahwa program pembinaan menjangkau lebih banyak Karang Taruna terutama di pelosok, lebih berkelanjutan, dan berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal. Pembinaan perlu lebih diintensifkan lagi agar revitalisasi Karang Taruna bisa diwujudkan.

RINGKASAN EKSEKUTIF  
RESPON PEMBACA TERHADAP  
PUBLIKASI BULETIN MUSLIM MUDA  
INDONESIA

THE POLITICAL LITERACY INSTITUTE



## LATAR BELAKANG

Maraknya fenomena radikalisme di Indonesia menjadi faktor utama mengapa penelitian ini penting dilakukan. Sejumlah riset dan survei mengatakan bahwa paham radikalisme telah menyebar ke sebagian penduduk Indonesia (BNPT 2017), dan tak jarang berujung pada tindakan ekstrim dan teror (Wahid Foundation & LSI 2016). Bila dibiarkan, kondisi ini akan mengakibatkan rusaknya harmoni di Indonesia.

Masjid, sebagai salah satu tempat berkumpulnya orang-orang Muslim, menjadi lahan basah bagi persebaran gerakan radikal, ekstrimis, dan politis. Salah satu gerakan radikal yang massif mengedarkan ideologi mereka adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menggunakan media bulletin jumat yang disebar setiap minggu, gerakan ini sangat militan mengampanyekan ide-ide perjuangannya, yakni penolakan terhadap demokrasi dan tegaknya Khilafah Islamiyyah di Tanah Air Indonesia. Secara konsisten, lewat bulletin bernama Kaffah, HTI menyebarkan propagandanya secara massif kepada masyarakat bahwa Khilafah Islamiyah adalah sebuah sistem yang lebih baik dibanding dengan sistem demokrasi. Salah satunya ialah dengan terus-menerus mewacanakan dan memandang bahwa kebijakan Pemerintah adalah salah dan melenceng dari ajaran syariat. Sehingga, pada derajat tertentu, propaganda ini berhasil menancapkan pengaruh pada masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dalam konteks memetakan bulletin-bulletin jumat yang beredar di masjid-masjid di kawasan Jabodetabek. Hasil penelitian ini sangat penting dalam melakukan kontra narasi terhadap bulletin yang selalu disebar oleh kelompok HTI. Lewat bulletin jumat yang bernama Muslim Muda Indonesia, kami mencoba memberikan satu alternatif kepada jamaah Shalat Jumat agar mendapatkan variasi dan keragaman dalam berislam, sekaligus menunjukkan bahwa dalam sistem demokrasi ada juga nilai-nilai keadaban (civic) yang bisa menjadi landasan dalam bernegara. Di ujung, kami mempunyai cita-cita agar Bulletin Muslim Muda Indonesia juga menjadi corong dalam mendiseminasi pesan-pesan kedamaian dan toleransi agar keutuhan Republik Indonesia tetap terjaga.

## METODE PENELITIAN

Mencoba menghadirkan makna dan deskripsi yang tebal dan mendalam, kami memilih metode penelitian kualitatif dalam riset ini. Adapun pengambilan data yang dilakukan adalah lewat wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terdapat 36 responden yang diwawancarai dalam penelitian ini, yang terdiri dari pengurus masjid, khatib/imam, dan jamaah yang punya kebiasaan membaca bulletin jumat.

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 1-28 Februari 2018 di 6 wilayah yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Bekasi. Berikut ini masjid yang tersebar di 6 wilayah:

1. Masjid di Tangerang Selatan; Masjid al-Mughirah Situ dan Masjid Al-Ittihad
2. Masjid di Jakarta; Masjid Al-Aqwam dan Masjid Al-Wiqoyah
3. Masjid di Depok; Masjid Jami Al-Khairatul Islam dan Masjid Jami Nurul-Muhajirin
4. Masjid di Kota Tangerang; Masjid al-Ijtihad dan Masjid Al-Muhajirin
5. Masjid di Bogor; Masjid Darul Jannah dan Masjid Al-Huriyah
6. Masjid di Bekasi; Masjid Amar Ma'ruf dan Masjid Al-Ikhlash

Masjid di atas dipilih karena masjid-masjid tersebut terindikasi sebagai masjid yang dijadikan tempat peredaran bulletin Kaffah. Walaupun aktivitas HTI telah dilarang oleh pemerintah karena dianggap sebagai organisasi terlarang, namun segala aktifitas HTI masih dilakukan seperti biasanya, tak terkecuali penyebaran bulletin jumat. Memang konten yang dimuat di dalam Bulletin Kaffah terkesan lebih soft bila dibandingkan dengan bulletin milik HTI versi sebelumnya, Al-Islam, yang secara terang-terangan menentang penerapan sistem demokrasi di Indonesia.

## **BEBERAPA TEMUAN**

1. 78% responden penelitian ini menyatakan pernah menemukan dan membaca bulletin jumat beredar di masjid mereka setiap hari Jumat. Sementara sisanya mengaku pernah menemukan namun tidak di setiap Jumat.
2. Dari sisi efektifitas, Bulletin Muslim Muda Indonesia bisa dibilang berhasil dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi, inklusifitas, dan persamaan. Hal ini bisa dilihat dari tanggapan para pembaca yang jumlahnya sampai 86%. Sementara 14% sisanya merasa bahwa Bulletin Muslim Muda Indonesia sama seperti bulletin jumat lainnya.
3. Sejauh ini para pembaca bulletin Muslim Muda Indonesia mengakui bahwa bulletin cenderung efektif dalam menangkal penyebaran paham radikalisme. Setidaknya, 44% responden mengatakan bahwa konten bulletin sudah sangat baik dalam melakukan kontra narasi terhadap paham radikalisme di Indonesia. Sementara sisanya merasa bahwa Bulletin Muslim Muda Indonesia sudah cukup baik dalam membendung paham radikal.
4. Beberapa ragam dan fitur yang ada dalam Bulletin Muslim Muda Indonesia juga menjadi hal yang dinanti oleh para pembaca bulletin. Setidaknya, dari varian yang tersedia di Buletin Muslim Muda Indonesia, puisi (5%) berada di posisi yang paling sedikit diminati. Sebagian besar para pembaca menyukai Muslim Muda Indonesia sebagai sebuah bulletin yang utuh (53%), tanpa memecah dan mengesampingkan fitur-fitur di dalamnya.
5. Menyikapi Bulletin Kaffah, kami mengajukan pertanyaan ke para responden apakah setuju bila Bulletin Muslim Muda Indonesia terus dipertahankan dan disebar di masjid-masjid? 83% responden menjawab setuju dan perlu agar Bulletin Muslim Muda Indonesia terus dipertahankan. Hanya 3% responden yang menjawab belum atau tidak perlu mempertahankan Bulletin Muslim Muda Indonesia.

6. Terkait media apa yang efektif dan digemari sebagai sumber informasi, mayoritas responden menjawab televisi sebagai sumber informasi yang valid dan dapat mempengaruhi kesadaran dan wawasan dalam beragama. Selain itu, responden masih menjadikan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan yang lainnya sebagai media yang memiliki peran cukup besar dalam memberikan informasi dan memengaruhi kesadaran dan wawasan beragama para responden. Sementara itu, bulletin hanya 5% responden yang percaya bahwa bulletin dapat menjadi sumber rujukan dan informasi dalam memperluas kesadaran dan wawasan beragama.
7. Dalam penelitian ini kami melihat bahwa ada masjid-masjid yang mengharuskan para distributor bulletin meminta izin kepada pengurus masjid saat ingin menyebarkan bulletin. Tapi pada saat yang bersamaan, ada juga masjid yang abai soal perizinan pendistribusian bulletin ke masjid-masjid yang mereka kelola. Bagi masjid yang abai, hal ini jelas menjadi potensi yang berbahaya sebab dapat menjadi ladang subur dalam penyemaian dan pembiakan paham-paham radikalisme dan ekstrimisme.
8. Masukan-masukan dari responden penelitian ini tentang Bulletin Muslim Muda Indonesia pun cenderung sama dan dapat disederhanakan ke dalam beberapa poin berikut:
  - a) Hendaknya tidak menuliskan ayat-ayat suci di dalam bulletin, namun cukup menampilkan terjemahannya saja.
  - b) Sebaiknya bahasa yang digunakan dapat dikemas lebih ringan sehingga dapat dipahami semua golongan dari berbagai latar belakang.
  - c) Diharapkan supaya Bulletin Muslim Muda Indonesia dapat mengangkat isu-isu yang faktual.
  - d) Hendaknya Bulletin Muslim Muda Indonesia membuat terobosan baik dari sisi tema, tata letak maupun desain supaya menarik minat baca jamaah masjid. Bahkan, beberapa pengurus masjid berharap agar Bulletin Muslim Muda Indonesia dapat membuat bulletin khusus untuk anak-anak dan remaja.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Bulletin Muslim Muda Indonesia telah berhasil memberikan wacana keislaman yang sejuk, toleran, namun tetap netral. Selain itu, selama proses pelaksanaan penelitian tidak ditemukan kegiatan pengurus maupun jamaah masjid yang mengarah pada kegiatan radikalisme dan ekstrimisme, apalagi terorisme. Hal serupa pun ditemui saat para khatib sedang memberikan khutbah pada saat Shalat Jumat. Lebih jauh, secara umum, para khatib berusaha memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan Qur'an, hadist dan sumber lain yang relevan. Menggunakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, baik dahulu maupun kontemporer, juga penting agar Bulletin Muslim Muda Indonesia dapat merespon isu-isu faktual yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

## **REKOMENDASI**

1. Penyebaran Bulletin Muslim Muda Indonesia masih sangat dibutuhkan karena HTI masih menyebarkan bulletinnya sampai saat ini. Oleh karena itu harus ada bulletin alternatif yang disebar di masjid-masjid untuk tetap memberikan pilihan kepada jamaah jumat agar tidak terpengaruh terhadap unsur radikalisme yang disebar.
2. Gencarnya penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi harus dijadikan jalan dalam menyebarkan pesan-pesan inklusif dan toleran kepada para pembacanya. Pesan-pesan ringan namun bermakna dalam harus giat dilakukan di beragam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, Twitter, dan lain sebagainya.
3. Hendaknya pemangku kebijakan melakukan kerjasama yang baik dengan seluruh pengurus masjid yang ada di Indonesia untuk senantiasa waspada terhadap pemahaman radikalisme yang kerap terjadi di lingkungan masjid dan sekitarnya.

## LEMBAGA KONTRIBUTOR



Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

PPIM adalah lembaga penelitian otonom di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awalnya, lembaga ini didirikan pada 1 April 1995 bertujuan untuk meng-gajak sejumlah sarjana dari berbagai macam disiplin ilmu dan latar belakang untuk mengadakan beberapa kegiatan penelitian, pengkajian, pelatihan, dan penyebaran informasi khususnya tentang Islam dan Indonesia dan Islam Asia Tenggara pada umumnya. Saat ini PPIM merupakan lembaga kajian strategis berbasis universitas di Indonesia yang berpengalaman di bidang kajian agama dan masalah sosial dengan publikasi dan jaringan yang luas, baik di dalam maupun dan luar negeri.



Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta

CSRC adalah lembaga kajian dan riset di bidang agama dan sosial-budaya, didirikan berdasarkan SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 April 2006. Pusat studi ini merupakan pengembangan dari bidang budaya pada Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengingat semakin meningkatnya tuntutan untuk mengembangkan kajian dan penelitian agama (utamanya Islam) dalam relasi-relasi sosial-budaya dan politik. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja peran penting yang dapat disumbangkan agama guna mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, kuat, demokratis, dan damai.



### Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sejak tahun akademik 1983/1984 UIN Sunan Kalijaga merintis pendidikan formal bagi para sarjana yang ingin memperoleh gelar Magister dan Doktor. Rintisan ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 26 Tahun 1983 yang ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Agama No. 208 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1999. Pada tahun akademik 1985/1986 untuk pertama kalinya Program Pascasarjana melahirkan lulusan Magister dan mulai saat itu pula dilaksanakan kegiatan perkuliahan Program Doktor.



### Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

PSBPS UMS adalah lembaga yang memiliki minat pada persoalan-persoalan yang terkait dengan kebudayaan, terutama keanekaragaman budaya, dan perubahan sosial, baik dalam bentuk pendidikan, kajian/penelitian, maupun aksi. Program-program PSBPS UMS didasarkan atas nilai-nilai dasar Islam dan kemanusiaan universal dengan menekankan pada relevansi dan kontekstualisasi nilai-nilai tersebut dengan tuntutan zaman dan pemberian arah pada perubahan sosial.



### Maarif Institute: For Culture and Humanity

Keberadaan Maarif Institute merupakan bagian tidak terpisahkan dari jaringan gerakan Pembaruan Pemikiran Islam (PPI) yang ada di Indonesia dewasa ini. Gerakan pembaruan merupakan sebuah keniscayaan sekaligus tuntutan sejarah. Kompleksitas masalah kemanusiaan modern berikut isu-isu kontemporer yang mengikutinya seperti demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, gender, dialog antar-agama dan peradaban serta sedert isu lainnya menuntu pemahaman dan penjelasan bari dari ajaran Islam. Selain itu, Maarif Institute tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan sosiologis persyarikatan Muhammadiyah, meskipun tidak ada hubunga organisatoris dengan organisasi ini dan tanpa mengurangi komitmen untuk terus memperluas radius pergaulan lembaga.



Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

PSTPG FISIP UIN Jakarta didirikan pada November 2015. Lembaga ini bertujuan menjadi mercusuar dalam bidang penelitian, training, dan pengembangan masyarakat pada isu-isu geopolitik Timur Tengah, konflik internasional, kontra-terorisme dan binadamai di Asia Tenggara dan dunia. Organisasi ini secara resmi diluncurkan oleh Prof. Zulkifli pada sebuah seminar yang bertajuk "The Map of Terrorist Networks in Southeast Asia After Jakarta Attack".



Daya Makara Universitas Indonesia (UI) – Division of Applied Social Psychology Research (DASPR)

Anggota tim DASPR telah mendalami isu-isu terorisme dan deradikalis sejak tahun 2007. Pada tahun 2007, di bawah arahan Prof. Sarlito, dimulailah riset dalam menggali motif aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Islam. Lebih lanjut, pada tahun 2009, DASPR membangun kerjasama dengan Pusat Studi Quran (PSQ) untuk melakukan program pilot re-edukasi ke tahanan-tahanan teroris dan eks-kombatan serta mujahidin. Kerjasama ini menghasilkan sebuah buku yang berjudul Kekerasan Atas Nama Agama.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

LP2M IAIN Manado merupakan lembaga yang menjembatani seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga melalui lembaga inilah para dosen dan praktisi akademik dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat. Pada prinsipnya, lembaga ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pedoman bagi dosen tentang petunjuk teknis baik itu penulisan penelitian maupun pengabdian dosen kepada masyarakat.



### Aliansi Indonesia Damai (AIDA)

AIDA didirikan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih damai melalui peran korban dan mantan pelaku terorisme. AIDA fokus menyoal mereka karena mantan pelaku adalah cermin utuh dari seorang teroris, sedangkan korban merupakan cermin utuh dari sadisme kekerasan terorisme. Korban dan mantan pelaku bisa saling mengisi dan melengkapi sebuah cita-cita perjuangan yang sama: hilangnya pelaku kekerasan dan korban terorisme. Selain itu, AIDA ingin membangun Indonesia yang damai berdasarkan nilai saling menghormati, kepercayaan dan persaudaraan. AIDA punya misi memberdayakan, melatih, dan mendorong korban terorisme untuk menjadi duta perdamaian.



### Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC) Universitas Paramadina

PIEC didirikan untuk memberikan pandangan ke masyarakat luas bahwa agama seharusnya tidak dimanipulasi sebagai pemberi justifikasi ketidakadilan dalam berbagai bidang. PIEC ingin membentuk pemahaman masyarakat yang kritis-normatif dengan bertanya dan menjawab persoalan tentang karakter pembangunan yang secara etis dikehendaki, apa yang secara etis dapat dibenarkan untuk meraih tujuan kemajuan dan kemakmuran ekonomi, dan mendiskusikan berbagai dilemma etis yang diakibatkan oleh upaya tersebut.



### The Political Literacy Institute (The Policy)

The Policy didirikan pada 12 Desember 2008 oleh sekelompok aktivis muda, intelektual dan jurnalis progressif. Lembaga ini merupakan sebuah lembaga independen, non-partisan, dan nirlaba yang didanai utamanya melalui dana hibah dan sumbangan-sumbangan tidak mengikat dari berbagai pihak. Visi lembaga ini berupaya membangun kesadaran politik rasional warga masyarakat berbasis pengetahuan dan kemampuan politik serta mendorong munculnya partisipasi politik individual maupun komunal yang kritis dengan kematangan intelektual, moral, organisasional maupun sosial, sehingga bisa mempercepat demokratisasi di Indonesia.



Enhancing the Role of Religious Education in  
Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten  
15419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com)

Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



*Empowered lives.  
Resilient nations.*

ISBN 978-623-94591-1-6



9 786239 459116